



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**IMPLEMENTASI GEOPOLITIK RUSIA DALAM PERANG RUSIA - GEORGIA  
TAHUN 2008**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora**

**Oleh**

**DANI PRABOWO**

**NPM 0706296995**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA  
PROGRAM STUDI RUSIA**

**DEPOK**

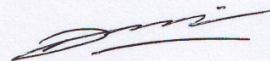
**JULI 2011**

## HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi saya ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

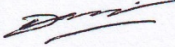
Depok, 14 Juli 2011



Dani Prabowo

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber, baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Dani Prabowo**  
**NPM : 0706296995**  
**Tanda Tangan : **  
**Tanggal : 14 Juli 2011**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Sripsi yang diajukan oleh:

Nama : Dani Prabowo

NPM : 0706296995

Program Studi : Rusia

Judul : Implementasi Geopolitik Rusia Dalam Perang Rusia-Georgia Tahun 2008

ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian pengesahan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Sastra Rusia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia

**DEWAN PENGUJI**

Pembimbing : Mina Elfira, Ph. D (.....)

Pengaji : Ahmad Fahrurodji M.A (.....)

Pengaji : Dr. Zeffry Alkatiry (.....)

Ditandatangani di : Depok

Tanggal : 14 Juli 2011

Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya

Dr. Bambang Wibawarta

NIP. 1965102319900310

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur dan alhamdulillah penulis ucapkan atas rahmat yang Allah SWT berikan, karena akhirnya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang menjadi tugas akhir saya sebelum mendapatkan gelar Sarjana Humaniora Program Studi Rusia pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia. Berbagai macam halangan dan rintangan selama penulisan skripsi ini akhirnya dapat dilewati penulis dan menghasilkan sebuah karya yang menyempurnakan karya-karya yang telah ada sebelumnya. Penulis sadar bahwa untuk mencapai tahap ini tidak sedikit bantuan yang penulis peroleh, terutama dari orang-orang terdekat penulis, baik berupa dukungan moril maupun materil. Untuk itu saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

- Allah SWT atas berkat rahmat serta nikmat ilmu yang telah diberikan kepada saya sehingga saya akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- Orang tua penulis, Ibu Dede Sakainah dan Bapak Hardiyanto (Alm.), yang telah memberikan saya semangat untuk segera menyelesaikan kuliah saya.
- Orang tua angkat penulis, Om Larto dan Tante Rin, yang telah memberikan bantuan baik berupa moril ataupun materil agar penulis tetap semangat untuk menyelesaikan skripsi penulis.
- Ibu Mina Elfira Ph.D selaku dosen pembimbing penulis. Beliau banyak memberikan dukungan kepada penulis agar penulis tetap semangat dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
- Bapak Ahmad Fahrurroddi M.A dan Bapak DR. Zeffry Alkatiry S.S., M. Hum, selaku dosen pembaca yang telah banyak memberikan masukan dan memudahkan penulis untuk merevisi penulisan ini.
- Segenap dosen program studi Rusia: Bapak Ahmad Sujai M.A, Ibu Sari Endahwarni M.A, Ibu Nia Kurnia Sofiah M. App.Ling., Ibu Thera Widyastuti M. Hum, Ibu Prof. Dr. N. Jenny MT Hardjatno, Kak Sari Gumilang S. Hum, Bapak Banggas Limbong M.Hum, Bapak Mohammad Nasir Latief, M.A., Abuzhar Roushanfikri S. Hum, Hendra Kaprisma S. Hum, R. de Archellie S. Hum dan Bapak Dr. Singkop Boas Boangmanalu (Alm.) Terima kasih penulis ucapkan karena telah membantu penulis dalam mempelajari dan mendalami ilmu mengenai Bahasa Rusia selama 4 tahun ini.

- Rekan-rekan seperjuangan 2007, baik yang sedang skripsi (Fransiskus Benny Wetik, Delvy Kasman, Ais Satria, Fellicia Rianita Lamongi, Friensininda, Mega Trinanda, Isabella Manurung, Sarwa Damayanti, Imelda Valentina, dkk.), maupun yang akan skripsi (Diptasari Saadudin, Achmad Yazid Ichsan, Christopher Cynar Saulinggi, Eko Bawono, Tasya Mindra, dkk.), atau bahkan yang sudah lulus (Isnaini Indrayanti), 4 tahun sudah kita jalani kuliah bersama meskipun kita tidak bisa lulus bersama akan tapi semuanya tetap berkesan. Untuk yang akan skripsi semester depan jaga semangat kalian.
- Rekan-rekan 2008 (Riga, Ferdi, Arif, Arman, dkk) dan 2009 (Erik, Chandra, Dito, Ardi, Renu, Rani, Dio, dkk) yang tidak dapat penulis sebutkan semua namanya. Terima kasih banyak untuk waktunya. Tetap semangat dalam melanjutkan kuliah kalian. Semoga kalian juga cepat menyusul dalam menyelesaikan kuliah kalian.
- Ucapan terima kasih spesial untuk Agustina Wulandari untuk seluruh waktu yang sudah kamu berikan selama ini. Terima kasih sudah dukung aku sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini.

Banyak pengalaman dan juga manfaat yang penulis rasakan selama 4 tahun belajar di Program Studi Rusia ini. Penulis ingin memberikan penghargaan sebesar-besarnya kepada seluruh rekan dan jajaran dosen yang telah membantu penulis selama ini. Penulis juga ingin memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran karyawan Perpustakaan FIB UI dan Perpustakaan Pusat UI karena telah banyak memberikan bantuan kemudahan kepada penulis dalam urusan peminjaman buku..

Akhir kata, *tiada gading yang tak retak*, tiada karya yang tak luput dari kesalahan. Penulis menyadari kekurangan yang penulis rasakan selama melakukan penelitian dalam menulis skripsi ini. Untuk itu penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan yang penulis lakukan selama penelitian ataupun di dalam hasil penelitian penulis. Adapun jika ada kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis tampung untuk kedepannya membantu penulis dalam mengembangkan tulisan penulis.

Hormat saya,

Dani Prabowo

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dani Prabowo  
NPM : 0706296995  
Program Studi : Rusia  
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya  
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**"Implementasi Geopolitik Rusia Dalam Perang Rusia-Georgia Tahun 2008"**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia, atau formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Dengan demikian persyaratan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 14 Juli 2011

Yang menyatakan



(Dani Prabowo)

vii

Universitas Indonesia

vii

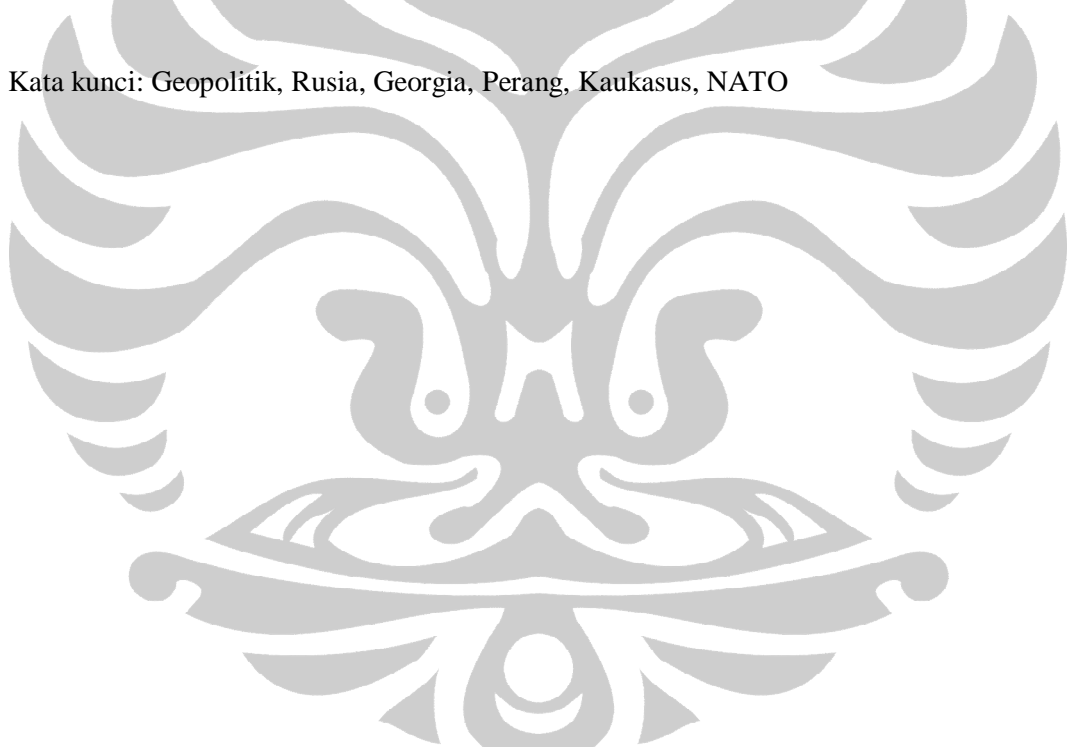
Universitas Indonesia

## ABSTRAK

Nama : Dani Prabowo  
Program Studi : Sastra Rusia  
Judul : Implementasi Geopolitik Rusia dalam Perang Antara Rusia- Georgia Tahun 2008

Topik skripsi ini adalah strategi implementasi geopolitik Rusia dalam perang Rusia-Georgia tahun 2008. Penulis menggunakan metode penulisan sejarah dan untuk menganalisa skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil analisa yang dilakukan oleh penulis dengan menerapkan teori geopolitik dan dihubungkan dengan permasalahan yang ada menyatakan bahwa perang antara Rusia-Georgia pada tahun 2008 merupakan bagian dari implementasi geopolitik Rusia khususnya di wilayah Georgia dan wilayah Kaukasus pada umumnya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor yang menjadi pemicu timbulnya konflik tersebut, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perang tersebut adalah perluasan NATO di wilayah Kaukasus yang pada akhirnya menyebabkan Rusia harus mengambil sikap tegas untuk menentukan sikapnya.

Kata kunci: Geopolitik, Rusia, Georgia, Perang, Kaukasus, NATO





## ABSTRACT

Name : Dani Prabowo  
Study Program : Russian Literature  
Title : The Implementation of Russia Geopolitics in War Between Russia-Georgia 2008

The topic of this under graduate thesis is the strategy of the implementation of Russia geopolitics in the Russia-Georgia war in 2008. The author use historical writting method and for the analysis use descriptive-analitic method. After analyzing with connecting the problem with geopolitical theory, the result showing that Russia-Georgia war in 2008 is a part of the implementation Russia geopolitics in Georgia especially and in the Caucassus in generally. This is can be seen from some factors that becomme the trigger of the conflict. One of the factors that lead to war is an extension of NATO in the Caucasus region which eventually led to Russia must take a firm stand in a stand.

Keywords: Geopolitic, Russia, Georgia, War, Caucassus, NATO



## DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masaalah	1
1.2 Pokok Permasalahan	7
1.3 Batasan Masalah	7
1.4 Tujuan Penulisan	7
1.5 Metode Penulisan	7
1.6 Tinjauan Pustaka	9
1.7 Landasan Teori	10
1.8 Sistematika Penulisan	11
BAB 2. HUBUNGAN UNI SOVIET DENGAN GEORGIA DALAM KAITANNYA DENGAN OSSETIA SELATAN SERTA FAKTOR-FAKTOR PEMICU KETEGANGAN DI KAWASAN TERSEBUT DALAM KURUN WAKTU 1989-1991	12
2.1 Sejarah Hubungan Uni Soviet dan Georgia	12
2.2 Hubungan Uni Soviet dan Georgia dalam Kaitannya dengan Ossetia Selatan	16
2.3 Keterlibatan Uni Soviet dalam Eskalasi Konflik dan Perang Sipil di Wilayah Georgia Tahun 1989 - 1991	20
BAB 3. HUBUNGAN UNI SOVIET DENGAN PAKTA WARSAWA DAN PERLUASAN NATO KE KAWASAN KAVKASUS DALAM KAITANNYA DENGAN IMPLEMENTASI GEOPOLITIK	25
3.1 NATO	26

3.1.1 Sejarah NATO	26
3.1.2 Perluasan NATO ke Timur	30
3.2 Pakta Warsawa	35
3.2.1 Sejarah Pembentukan Pakta Warsawa	35
3.2.2 Keruntuhan Pakta Warsawa	39
<b>BAB 4. IMPLEMENTASI GEOPOLITIK RUSIA DALAM PERANG RUSIA-GEORGIA TAHUN 2008</b>	<b>43</b>
4.1 Konsep Geopolitik Rusia	44
4.2 Kebijakan Keamanan Nasional Rusia	49
4.3 Konflik Rusia-Georgia	61
<b>BAB 5. KESIMPULAN</b>	<b>73</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu unsur terpenting yang harus dimiliki oleh negara adalah wilayah kedaulatan.<sup>1</sup> Wilayah suatu negara merupakan bagian dari kajian geostrategi dan geopolitik dalam hal menentukan kebijakan politik, keamanan, militer, dan ekonomi. Ratzel dalam *Politische Geographie* mengatakan bahwa negara adalah organisme ruang (*spatial organism*)<sup>2</sup> yang senantiasa berkembang seperti organisme hidup, oleh karena itu wilayah geografis merupakan salah satu unsur terpenting dalam pembentukan suatu negara. Seperti telah kita ketahui bahwa pada dasarnya negara memiliki sifat dinamis, yaitu negara selalu berubah tidak hanya dalam bentuk wilayahnya yang berubah akan tetapi juga dalam hubungan yang di jalin dengan negara lain. Perubahan tersebut dapat dikatakan memiliki konotasi negatif jika dilakukan dengan cara intervensi yang menggunakan kekuatan militer sehingga mengakibatkan bergesernya tatanan geografis suatu negara, atau dapat dikatakan berkonotasi positif jika dilaksanakan melalui kerjasama bilateral antar negara, baik itu di dalam kawasan regional maupun hubungan bilateral antar regional. Pernyataan Ratzel tersebut semakin diperkuat dengan pernyataan Collin yang menyatakan bahwa “*geopolitics is about the relation of international political power to the geographical setting.*”<sup>3</sup> Hal ini dapat dilihat ketika Uni Soviet membentuk Pakta Warsawa pada tahun 1955 yang merupakan bagian dari strategi keamanan Uni Soviet dalam mengimbangi hegemoni NATO di wilayah Eropa.

---

<sup>1</sup> Berdasarkan Konvensi Montevideo mengenai Hak dan Tugas Negara tahun 1933, menyatakan bahwa di dalam sebuah Negara harus terdapat: 1) Populasi (*a permanent population*); 2) Wilayah (*a defined territory*); 3) Pemerintahan; dan 4) kapasitas untuk masuk ke dalam hubungan dengan Negara lain. Sumber: Lynch, Dov., *Separatist States and Post-Soviet Conflicts*. Diakses dari: <http://www.jstor.org/stable/3095759> pada 8 Maret 2011 pukul 15.03 WIB. Terjemahan oleh penulis

<sup>2</sup> Dikshit, R D., *Geography The Spatiality of Politics 3<sup>rd</sup> Edition*, (India: Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, 2000), Hal. 23.

<sup>3</sup> Gray, Colin S, *The Geopolitics of Super Power*, (Lexington: The University Press of Kentucky, 1988), Hal. 14.

Pemerintah Uni Soviet membentuk Pakta Warsawa sebagai upaya untuk mengantisipasi adanya gangguan yang mengancam stabilitas keamanan wilayah Uni Soviet karena adanya pembentukan NATO. Di samping itu pembentukan Pakta Warsawa juga dimanfaatkan untuk semakin memperkuat posisi Uni Soviet terutama di kawasan Eropa Timur. Dalam isu ancaman keamanan negara, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, permasalahan wilayah perbatasan antar negara (*frontier*). Kedua, perang kebudayaan. Ketiga, perang ideologi (*soft power*). Keempat, Intervensi dari dalam atau dapat disebut disintegrasi bangsa, dan yang kelima, intervensi dari luar dalam bentuk perang kekuatan militer (*hard power*), hal ini dapat dilihat seperti dalam kasus perang Rusia dan Georgia tahun 2008.

Perang Rusia dan Georgia pada bulan Agustus 2008 merupakan sebuah konflik luka lama yang terbuka kembali. Konfrontasi yang dilakukan oleh tentara Georgia terhadap tentara penjaga perdamaian Rusia serta warga sipil Ossetia Selatan memancing pemerintah Rusia untuk membalas serangan tersebut ke wilayah Ossetia Selatan. Saakasvili berdalih bahwa serangan tersebut dilakukan dengan alasan ingin mengembalikan kekuasaan Tbilisi atas kelompok separatis Ossetia Selatan. Oliver Gebel mengacu pada Ruth Kufner menyatakan bahwa separatisme adalah sebuah istilah yang diambil dari istilah politik dan menjelaskan suatu kondisi dimana terdapat keinginan untuk meninggalkan sesuatu entitas politik besar (negara) dalam rangka untuk membentuk sebuah negara baru dan independensi politik.<sup>4</sup> Sementara itu, serangan yang dilakukan oleh tentara Georgia di kawasan Ossetia Selatan dipandang pemerintah Rusia sebagai sebuah ancaman terhadap warganya. Masyarakat Ossetia Selatan yang sebagian besar merupakan etnis Rusia memiliki ikatan historis yang kuat dengan warga Ossetia Utara yang berada di wilayah kekuasaan Rusia. Sehingga pemerintah Rusia menggunakan permasalahan etnis sebagai salah satu alasan serangan tersebut.

---

<sup>4</sup> Gebel, Oliver. *Separatism in Canada - a Nation at Stake? The Example of Québec and Newfoundland and Labrador*, hal. 5, merujuk pada Ruth Kufner (ed.), *Großes Fremdwörterbuch*, Leipzig: 1985, hal. 692.

Keruntuhan Uni Soviet tahun 1991 dan meningkatnya krisis etnis yang terjadi di wilayah Georgia sejak tahun 1980-an, semakin memperkuat keinginan Ossetia Selatan untuk memerdekakan diri. Ossetia Selatan sendiri sebenarnya telah menerima status *autonomous oblast* sejak masa pemerintahan Uni Soviet. Jika dilihat dari status wilayah, secara *de facto*<sup>5</sup> kemerdekaan Ossetia Selatan telah diakui oleh pemerintah Uni Soviet, namun secara *de jure*<sup>6</sup> Ossetia Selatan masih merupakan bagian dari wilayah hukum Georgia. Pemberian status *de facto* terhadap Ossetia Selatan berarti memberikan hak kepada Ossetia Selatan untuk membentuk pemerintahannya sendiri. Sejak awal, Georgia telah menolak pemberian status *de facto* atas wilayah Ossetia Selatan. Untuk itu pemerintah Georgia selalu menekan pemerintahan yang berlangsung di Ossetia Selatan.

Kekalahan Uni Soviet dalam Perang Dingin telah memberikan dampak besar bagi perkembangan Rusia. Rusia pada masa awal pemerintahan Boris Yeltsin mengalami apa yang disebut krisis pengaruh. Sejak keruntuhan Uni Soviet, pengaruh Rusia di negara-negara eks-Uni Soviet semakin menurun. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya negara eks-Uni Soviet yang memilih untuk bergabung ke dalam bagian Uni Eropa atau melakukan kerjasama militer dengan NATO. Melemahnya peran CIS (*Commonwealth of Independent States*) di kawasan Eropa Timur dan Kaukasus semakin membuat hegemoni Rusia di kawasan tersebut menurun. Hal ini berdampak buruk bagi perkembangan Rusia kedepannya. Sementara itu, munculnya NATO sebagai satu-satunya aliansi *super power* di mandala Eropa semakin mempertegas bahwa hegemoni Rusia kini telah semakin menurun. Jika Pada masa Perang Dingin NATO memiliki slogan “*keep America in, Germany down and Russia out*”<sup>7</sup> sebagai suatu bentuk instruksi yang

<sup>5</sup> Scott Pegg dalam bukunya berjudul *International Society and De Facto State* menyatakan bahwa “A de facto state exists where there is an organized political leadership which has risen to power through some degree of indigenous capacity; receives popular support; and has achieved sufficient capacity to provide governmental services to a given population in a specific territorial area, over which effective control is maintained for a significant period of time. The de facto state views itself as capable of entering into relations with other states and it seeks full constitutional independence and widespread international recognition as a sovereign state.” Diambil dari Lynch, Dov. *Op. Cit, Separatist States and Post-Soviet Conflicts*. Diakses dari: <http://www.jstor.org/stable/3095759> pada 19 Januari 2011 pukul 10.30 WIB.

<sup>6</sup> *De jure* diartikan sebagai pengakuan secara hukum.

<sup>7</sup> Ullman, Harlan. *NATO Needs A Slogan*, diakses dari [http://www.acus.org/new\\_atlanticist/nato-needs-slogan](http://www.acus.org/new_atlanticist/nato-needs-slogan) pada 19 Mei 2011 pukul 20.17 WIB.

ditujukan kepada seluruh anggota NATO untuk melawan Uni Soviet, kini keberadaan Rusia tidak terlalu dipandang sebagai sebuah ancaman bagi NATO terutama pada masa-masa awal keruntuhan kekalahan Uni Soviet. Hal ini dapat dilihat yaitu pada awal tahun 1994 dalam pertemuan tingkat tinggi NATO di Brussels pihak sekutu menegaskan kembali keinginan mereka untuk menambah anggota baru.<sup>8</sup> Presiden Amerika saat itu Bill Clinton menyatakan bahwa perluasan keanggotaan NATO “tidak tergantung pada kemunculan ancaman baru di Eropa”. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa apapun tindakan yang dilakukan oleh Rusia baik itu langkah negatif maupun positif tidak akan mempengaruhi upaya perluasan NATO.<sup>9</sup>

Sementara posisi NATO semakin meluas di kawasan Eropa Timur dan Kaukasus, posisi Rusia semakin terjepit akibat kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara eks-Uni Soviet dengan NATO. Untuk itu Rusia perlu berpikir keras demi menjaga kondisi keamanan negaranya serta pengaruhnya terhadap negara-negara terdekatnya tersebut. Salah satu usaha yang dilakukan Rusia dalam menjaga keamanan wilayahnya adalah mengangkat permasalahan isu etnis yang selama ini berkembang di kawasan Kaukasus terutama di wilayah Georgia. Ketika pada masa pemerintahan Uni Soviet, di bawah kepemimpinan Lavrenty Beria, Georgia memiliki status yang lebih istimewa daripada republik-republik lainnya. Tingkat pendidikan dan standar hidup di Georgia lebih tinggi, dan Georgia juga relatif lebih independen dari Moskow dalam arti merupakan salah satu republik yang mampu mempertahankan identitas dan nasionalismenya sepanjang sejarah Uni Soviet.<sup>10</sup> Namun sayangnya kebebasan dalam memperoleh pendidikan yang luas hanya dapat diperoleh oleh etnis Georgia, bahkan selain adanya keterbatasan dalam hal mendapatkan pendidikan, etnis-etnis diluar etnis Georgia dihadapkan pada permasalahan agama kepercayaan. Etnis Georgia merupakan

<sup>8</sup> NATO. *NATO Handbook*. (Brussels: NATO: 2001), hlm. 61, diakses dari <http://www.nato.int/docu/handbook/2001/hb030101.htm>

<sup>9</sup> Smith, Julian. *The NATO – Russia Relationship Defining Moment or Déjà vu?* CSIS and IFRI November 2008, diakses dari [csis.org/files/media/csis/pubs/081110\\_smith\\_natorussia\\_web.pdf](http://www.csis.org/files/media/csis/pubs/081110_smith_natorussia_web.pdf) pada 20 Mei 2011 pukul 16.23 WIB.

<sup>10</sup> Paladin Ansharullah, *Faktor-Faktor Penyebab Intervensi Militer Rusia Terhadap Georgia Tahun 2008*, (Jakarta: FISIP UI, 2009), hal. 39, mengacu pada Svante E. Cornell, *Autonomy and Conflict: Ethnoterritoriality and Separatism in the South Caucasus – Cases in Georgia*, (Swedia: Uppsala University, 2002), hal. 142.

etnis yang menganut agama kristen ortodoks. Sedangkan etnis minoritas yang lain seperti Azerbaijan, Armenia, Ossetia dan Abkhaz merupakan kelompok etnis yang memeluk agama Islam. Permasalahan timbul ketika pemerintah Georgia memaksakan kebijakan untuk memeluk agama kristen terhadap etnis-etnis lain di luar etnis Georgia. Stephen F. Jones dalam tulisannya berjudul *Georgia: a failed democratic transition* menyatakan bahwa kebijakan kristenisasi yang diterapkan oleh pemerintah Georgia dengan melakukan pembaptisan terhadap kaum muslim merupakan kesalahan fatal yang memicu timbulnya rasa ketidakpuasan terhadap kontrol pemerintah Georgia.<sup>11</sup>

Dominasi kekuasaan dan pengaruh pemerintah Georgia di wilayah Ossetia Selatan menyebabkan situasi dan kondisi di Georgia semakin memanas. Puncak kondisi tersebut berujung pada perang terbuka pada bulan Januari 1991. Tentara Georgia menguasai wilayah Tskinali ibukota Ossetia Selatan dan menyebabkan wilayah tersebut terbagi ke dalam dua sisi yaitu sisi Georgia dan sisi Ossetia Selatan serta menyebabkan wilayah tersebut berada di dalam kondisi perang selama satu tahun.<sup>12</sup> Selama kurun waktu satu tahun tersebut, terjadi penyanderaan terhadap orang-orang Ossetia Selatan yang dilakukan oleh pihak berwenang Georgia. Lebih dari 3000 orang terbunuh dalam perang terbuka tersebut dan 40.000 orang Ossetia Selatan mengungsi ke wilayah Ossetia Utara. Jumlah korban yang ditimbulkan akibat perang tersebut semakin meningkat. Pada tahun 1992 tercatat 7000 orang meninggal dan hampir sejumlah 200.000 hingga 250.000 dari 550.000 orang Georgia sebelum masa perang antara Georgia dan

---

<sup>11</sup>“In July 1989, before the war in Ossetia began, bloody clashes over Abkhazian education rights in the Autonomous Republic’s capital of Sukhumi left fourteen dead and over 500 wounded. Armenians and Azerbaijan clashed with Georgians over rights to land and cultural monuments. The Georgian Muslims, known as Ajaris, protested the new government’s Christianization program, including its encouragement of mass baptisms clashed in Muslim areas and the appointment of Georgian Orthodox priests as government officials... With overwhelming support, the Ossetian popular front *Adamon Nykhas* (“Popular Shrine”) and its Abkhazian equivalent, *Aidgilara* (“Unity”) used the existing soviet structures to promote regional kontrol and express dissatisfaction with their exclusion from power.” Lihat buku Ian Bremer dan Ray Taras, *Nations and Politics in the Soviet Successor States*, (USA: Cambridge University Press, 1993), hal. 296.

<sup>12</sup> International Crisis Group, *Georgia: Avoiding War in South Ossetia (Europe Report No. 159)*. Tbilisi/Brussels: ICG, 26 November 2004, hal. 3-4.



Abkhazia menjadi pengungsi.<sup>13</sup> Konflik tersebut mereda setelah Rusia ikut andil dalam menengahi permasalahan konflik. Rusia, Georgia dan Ossetia Selatan merumuskan pembentukan *Joint Peacekeeping Force (JPKF)*<sup>14</sup> sebagai solusi membekukan konflik tersebut. Namun sayangnya keberadaan *Joint Peacekeeping Force* tersebut tidak begitu mampu membawa perdamaian di Georgia. Revolusi Mawar pada tahun 2003 menyebabkan turunnya kekuasaan Presiden Georgia, Eduard A. Shevardnadze, dan digantikan oleh Mikhail Saakasvili. Sejak awal menjabat sebagai presiden, Saakhasvili telah menunjukkan sikap pro-Barat. Saakhasvili bertekad ingin menjadikan Georgia sebagai bagian dari NATO. Untuk itu pada tahun 2007 Saakhasvili meningkatkan anggaran pertahanannya hingga dua kali lipat menjadi USD 922 juta dari nilai sebelumnya pada tahun 2006 sebesar USD 375,5 juta<sup>15</sup> sebagai usaha Georgia untuk memenuhi standar kriteria yang ditetapkan oleh NATO.

Sejak awal, Rusia tidak memandang permasalahan yang terjadi di dalam wilayah kedaulatan Georgia sebagai sebuah masalah besar yang mengancam kedaulatan wilayah Rusia. Namun, ada agenda tersembunyi yang melandasi Rusia dalam membela kepentingan Ossetia Selatan dan hal ini berkaitan dengan permasalahan strategi geopolitik Rusia. Penulis tertarik untuk menganalisa penerapan kebijakan geopolitik yang diterapkan Rusia di wilayah Kaukasus tersebut, karena selama ini belum pernah dibahas secara mendalam. Penulis berharap skripsi ini dapat melengkapi karya-karya yang telah ada sebelumnya.

<sup>13</sup>“Situation Arround Abkhazia and Ossetia” diakses dari <http://www.un.int/russia/new/MainRoot/docs/warfare/statement051208en.htm> pada 13 Januari 2011 pukul 19.02 WIB. Terjemahan oleh penulis.

<sup>14</sup> JPKF dibentuk pada 14 Juli 1992 di wilayah konflik antara Georgia dan Ossetia. JPKF merupakan gabungan tentara tiga Negara yaitu Rusia, Georgia dan Ossetia. Pembentukan JPKF berdasarkan pertemuan antara presiden Rusia, Boris N. Yeltsin, dengan presiden Georgia, Eduard A. Shevardnadze pada 24 Juni 1992 di Sochi yang menandatangani perjanjian untuk memecahkan masalah konflik Georgia-Ossetia. Perjanjian Sochi tersebut juga mengatur mengenai permasalahan *Joint Control Commision (JCC)* untuk Resolusi Konflik Georgia. Dalam hal ini OSCE berpartisipasi di dalam JCC sebagai pengawas.

<sup>15</sup> International Crisis Group, *Georgia: Sliding towards Authoritarianism? (Europe Report No. 189)*. Tbilisi/Brussels: ICG, 19 Desember 2007, hal. 11-12.

## 1.2 Pokok Permasalahan

Sejauh mana strategi geopolitik yang diterapkan oleh Rusia dalam perang Rusia dan Georgia tahun 2008.

## 1.3 Batasan Masalah

Dalam penulisan ini, penulis akan membatasi masalah hanya pada penerapan geopolitik yang diadopsi oleh Rusia di kawasan Kaukasus dalam perang antara Rusia dan Georgia tahun 2008.

## 1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai implementasi geopolitik Rusia dalam perang antara Rusia dan Georgia pada tahun 2008 dengan proses analisa atas berbagai sumber yang telah dikumpulkan.

## 1.5 Metode Penulisan

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, maka penulisan ini menggunakan metode penelitian deskriptif-analitis. Secara umum deskriptif-analitis disini dapat diartikan sebagai penelitian yang menggambarkan keadaan dari data yang dikumpulkan melalui berbagai macam sumber-sumber yang ada, untuk kemudian diberikan penjelasan serinci mungkin dengan melakukan perbandingan dan pelengkapan dari berbagai sumber yang didapat.

Untuk mendukung penulisan ini, maka penulis menggunakan metode penulisan sejarah. Menurut Luis Gottschalk, metode penulisan sejarah adalah sebuah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau manusia. Rekonstruksi yang imajinatif dari masa lampau itu berdasarkan data yang diperoleh (melalui kritik sumber) dengan menenmpuh cara itu, disebut historiografi.<sup>16</sup> Erns Bernheim dalam bukunya yang berjudul *Lehrbuch der Historischen Methode und der Geschichtsphilosophie*, 1889 menjelaskan dengan lebih sederhana tentang empat tahapan dalam penelitian sejarah yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Gottschalk, Luis, *Mengerti Sejarah*. Terj. Nugroho Notosusanto, (Jakarta: UI-Pres, 1975), Hal. 32.

<sup>17</sup> *Ibid.* Notosusanto.

Tahap *heuristik* adalah menemukan dan menghimpun bukti-bukti sejarah. Dalam mengumpulkan sumber-sumber penulisan, penulis banyak mendapat referensi bacaan yang penulis peroleh melalui media internet dan buku-buku dari perpustakaan. Tahapan selanjutnya adalah *kritik* yang meliputi pengujian, dan penilaian melalui perbandingan sumber yang banyak terdapat kesamaan maupun ketidaksamaan antara sumber yang satu dengan sumber yang lain, yang dilanjutkan dengan tahap *auffassung* atau interpretasi yang menafsirkan fakta-fakta sejarah yang telah terkumpul, lalu diklarifikasikan satu sama lain dan dilihat apakah ada keterikatan antara fakta-fakta tersebut. Tahap terakhir adalah tahap *darstellung* atau historiografi yang merupakan proses menuliskan dan menyajikan fakta-fakta yang telah dikumpulkan dan telah diinterpretasikan menjadi kisah sejarah yang disusun secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan dan secara moral.

Sumber-sumber yang digunakan oleh penulis dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Sumber primer. Sumber primer adalah kesaksian dari orang yang hadir atau terlibat dalam suatu peristiwa yang dikisahkan, serta dokumen yang terkait langsung dengan suatu peristiwa sejarah.<sup>18</sup> Sumber primer yang penulis gunakan adalah *statement* presiden Rusia, Dmitry Medvedev, bertajuk *Заявление в Связи с Ситуацией в Южной Осетии* pada tanggal 8 Agustus 2008 yang dilansir oleh laman [www.kremlin.ru](http://www.kremlin.ru) ketika terjadi serangan terhadap tentara penjaga perdamaian Rusia di wilayah Ossetia Selatan. Penulis juga menggunakan pidato yang disampaikan oleh Vladimir Putin ketika menjabat menjadi presiden Rusia paska terjadinya serangan 9/11 di Amerika Serikat. Pidato tersebut diakses oleh penulis melalui laman [www.youtube.com](http://www.youtube.com). Di samping itu, penulis juga menggunakan media-media Rusia untuk melihat situasi dan kondisi pada masa itu yang diakses melalui laman [www.rianovosti.ru](http://www.rianovosti.ru) dan [www.pravda.ru](http://www.pravda.ru).

---

<sup>18</sup> *Ibid.* Notosusanto.

- b. Sumber sekunder. Sumber sekunder adalah kesaksian dari siapapun yang tidak terlibat dalam suatu kejadian bersejarah.<sup>19</sup> Sumber sekunder yang digunakan penulis adalah thesis yang diajukan oleh Paladin Nasrulah demi mendapatkan gelar Magister Sains dalam Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI pada tahun 2009 berjudul *Faktor-Faktor Penyebab Intervensi Militer Rusia Terhadap Georgia Tahun 2008* yang digunakan oleh penulis sebagai bahan perbandingan dalam penyusunan skripsi ini. Selain itu penulis juga menggunakan artikel laporan yang dilansir oleh PBB yang bertajuk *Situation Around Abkhazia and Ossetia* yang dapat diakses dari laman [www.un.int](http://www.un.int). Melalui artikel tersebut penulis berusaha membaca kondisi politik yang terjadi di wilayah Abkhazia dan Ossetia selama kurun waktu paska runtuhnya Uni Soviet.

### 1.6 Tinjauan Pustaka

Dalam menulis skripsi ini, penulis menggunakan buku *Nations and Politics in the Soviet Successor States* yang ditulis oleh Ian Bremmer dan Ray Taras. Di dalam buku tersebut dijelaskan tahapan-tahapan runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, serta dijelaskan pula mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antara Ossetia Selatan dan Abkhazia dengan Georgia. Berbagai permasalahan antar etnik mewarnai yang menjadi salah satu faktor terbesar dalam runtuhnya Uni Soviet. Permasalahan antar etnik tersebut pada akhirnya melahirkan kebijakan politik etnik yang terkadang mendiskreditkan etnis tertentu.

Penulis juga melihat thesis dari Palladin Nasrulah yang bertajuk *Faktor-Faktor Penyebab Intervensi Militer Rusia Terhadap Georgia Tahun 2008* sebagai salah satu acuan dalam menganalisa konflik yang terjadi antara Rusia dan Georgia. Dalam thesis tersebut disebutkan beberapa peristiwa yang menjadi faktor terjadinya perang Rusia dan Georgia. Palladin melihat bahwa perang tersebut terjadi akibat intervensi-intervensi yang dilakukan Rusia sebelumnya selama masa Uni Soviet. Hal yang membedakan penulis dengan thesis yang

---

<sup>19</sup> *Op. Cit.* Notosusanto.

dibuat oleh Palladin adalah penulis menganalisa bahwa perang tersebut merupakan bagian dari strategi geopolitik Rusia. Penulis mengembangkan teori yang digunakan oleh McKinder untuk menganalisanya dengan menyampaikan realita fakta yang ada.

Di samping menggunakan thesis yang telah di tulis oleh Palladin, penulis juga menggunakan skripsi yang ditulis oleh Donny Hermaswangi yang bertajuk Kebijakan Vladimir Putin Terhadap Gerakan Etnonasionalis Chechnya di Rusia (2000-2005). Penulis mengambil konsep etnonasionalis untuk menganalisa faktor-faktor yang mengakibatkan eskalasi konflik antar etnis yang terjadi antara Ossetia Selatan dan Abkhazia dengan Georgia. Hal yang membedakan penulis dengan skripsi yang ditulis oleh Donny adalah objek penelitian. Penulis menganalisa permasalahan yang terjadi di wilayah Georgia, sedangkan Donny menganalisa permasalahan yang terjadi di Chechnya.

Penulis juga menggunakan buku karya Stephen White yang bertajuk *After Gorbachev*. Di dalam buku tersebut berisi mengenai langkah-langkah kebijakann politik yang diambil oleh Gorbachev. Penulis menggunakan buku ini sebagai acuan untuk melihat kondisi perpecahan kelompok-kelompok etnonasionalis Rusia yang nantinya menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya perang Rusia dan Georgia.

### **1.7 Landasan Teori**

Dalam menganalisa permasalahan yang terdapat di dalam skripsi ini, penulis menggunakan teori geopolitik dan geostrategi dalam menganalisa penerapan strategi yang diambil oleh pemerintah Rusia di dalam perang antara Rusia dan Georgia tahun 2008. Seperti telah disebutkan di awal latar belakang masalah bahwa menurut Collin geopolitik merupakan sebuah hubungan politik internasional dalam kaitannya dengan wilayah, dimana dengan kata lain dapat dikatakan bahwa geopolitik merupakan suatu kajian mengenai hubungan internasional baik itu kerjasama regional ataupun antar-regional.

Selain itu penulis menggunakan teori Halford McKinder yang menyatakan bahwa bola dunia merupakan suatu kesatuan yang bulat, kesatuan

ruang yang sembilanperduabelas bagian adalah pulau-pulau.<sup>20</sup> Berdasarkan teori tersebut, penulis berusaha menganalisa setiap kebijakan yang diterapkan pemerintah Rusia dalam mempertahankan wilayah serta hegemoninya di kawasan Kaukasus. McKinder sendiri juga menawarkan konsep-konsep strategi keamanan yang menggambarkan peta kekuatan wilayah perbatasan-perbatasan terluar Rusia yang dapat dimanfaatkan oleh Rusia dalam menerapkan kebijakan keamanannya.

### **1.8 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengajukan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan berisi mengenai penjabaran latar belakang masalah, permasalahan, batasan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II akan membahas mengenai hubungan Uni Soviet dengan Georgia dalam kaitannya dengan Ossetia Selatan.

Bab III akan membahas mengenai hubungan Uni Soviet dengan Pakta Warsawa dan perluasan NATO ke kawasan Kaukasus dalam kaitannya dengan strategi geopolitik yang diterapkan oleh Uni Soviet di wilayah Kaukasus.

Bab IV berisi analisis strategi geopolitik dan geostrategi Rusia dalam perang antara Rusia dan Georgia di kawasan Ossetia Selatan.

Bab V berisi kesimpulan.

---

<sup>20</sup> Ermaya Suradinata, *Geopolitik dan Konsepsi Ketahanan Nasional, Pemikiran Awal Pengembangan dan Prospek*, (PT. Paradigma Cipta Yatsigama, 2001), Hal. 63.

## **BAB 2**

### **HUBUNGAN UNI SOVIET DENGAN GEORGIA DALAM KAITANNYA DENGAN OSSETIA SELATAN SERTA FAKTOR-FAKTOR PEMICU KETEGANGAN DI KAWASAN TERSEBUT DALAM KURUN WAKTU 1989 - 1991**

#### **2.1 Sejarah Hubungan Uni Soviet dan Georgia**

Seperti telah dijelaskan pada latar belakang bahwa salah satu faktor yang menjadi ancaman dalam isu keamanan negara adalah intervensi dari luar. Intervensi dari luar pada umumnya dilakukan dengan menggunakan kekuatan fisik atau militer untuk menakhluikkan kekuasaan pemerintah suatu negara. Langkah ini diambil apabila suatu negara memiliki kepentingan dengan negara lain dan telah gagal melakukan proses konsolidasi ataupun rekonsiliasi sebagai bagian dari pemecahan masalah. Salah satu contoh intervensi dari luar adalah terjadinya perang Rusia dan Georgia pada bulan Agustus 2008.

Sejak Awal pembentukan Uni Soviet pada tahun 1917, Rusia telah menjalin hubungan dengan Ossetia Selatan. Hubungan tersebut dimulai setelah kemenangan kelompok *Bolshevick* (*Большевик*)<sup>1</sup> dalam menggulingkan kekuasaan rezim kekaisaran dinasti Romanov di Rusia yang telah berkuasa sejak abad ke 17 ketika terjadi Revolusi Oktober. Pada masa-masa awal paska revolusi, kekuasaan kelompok *Bolshevick* di Rusia belum terlalu kuat. Hal ini dimanfaatkan oleh kelompok *Menshevick* (*Меньшевик*)<sup>2</sup> yang menguasai wilayah Georgia untuk mendeklarasikan kemerdekaan Georgia pada tanggal 26 Mei 1918. Selama kurun waktu tiga tahun Georgia sempat merasakan atmosfer kemerdekaan. Pada masa awal pemerintahan Vladimir Iliyich Lenin (*Владимир Ильич Ленин*)<sup>3</sup>, Lenin berjanji akan memberikan status republik otonom kepada kelompok-kelompok minoritas. Hal ini termanifestasikan di dalam pembentukan

---

<sup>1</sup> Kaum *Bolshevick* (*Большевик*) merupakan kelompok radikal pimpinan Lenin yang selalu kontra terhadap kelompok *Menshevick* (*Меньшевик*).

<sup>2</sup> Kelompok tandingan kelompok *Bolshevick*.

<sup>3</sup> Pada masa itu, Lenin merupakan presiden Rusia yang pertama

uni yang dahulu disebut *CCCP*<sup>4</sup> pada tahun 1922 yang terdiri dari empat negara utama pada awalnya, yaitu Republik Federasi Soviet Sosialis Rusia, Republik Soviet Sosialis Ukraina, Republik Soviet Sosialis Belarusia, dan Republik Federasi Soviet Sosialis Transkaukasus dimana di dalamnya terdiri dari Georgia, Armenia dan Azerbaijan. Pembentukan Uni Soviet dapat dikatakan sebagai suatu bentuk peng'aneksasi'an wilayah Georgia secara tidak langsung, karena status Georgia berubah menjadi negara bagian Uni Soviet, yang memiliki tanggung jawab langsung kepada pemerintah Moskow.

Dalam kebijakan awal Lenin, terlihat bahwa Lenin sangat mendukung pengembangan kaum etnis minoritas di Uni Soviet. Hal ini mengacu pada hasil Kongres Seluruh Soviet Rusia Kedua pada 7 November 1917, yang menyatakan bahwa akan menjamin seluruh bangsa-bangsa yang mendiami Rusia suatu hak yang utuh bagi penentuan nasib sendiri.<sup>5</sup> Hal ini juga tampak di dalam Deklarasi Hak-Hak Rakyat Rusia<sup>6</sup> yang menyatakan bahwa, pertama, persamaan dan kedaulatan bagi rakyat Rusia, kedua, hak untuk menentukan nasib sendiri termasuk pemisahan diri dan pembentukan pemerintahan independen, ketiga, penolakan terhadap hak-hak istimewa bangsa-bangsa dan agama bangsa dan keempat pengembangan bebas seluruh bangsa minoritas dan kelompok-kelompok etnografis yang tinggal di wilayah Rusia.

Jika dilihat dari isi deklarasi tersebut, maka wajar jika etnis Ossetia Selatan menuntut hak atas pengakuan otonomi wilayah mereka kepada Georgia. Poin kedua dan keempat deklarasi tersebut menegaskan bahwa setiap etnis memiliki hak untuk mendeklarasikan kemerdekaannya. Namun disisi lain, dengan adanya pemberian hak untuk memerdekakan diri dapat dinilai sebagai salah satu faktor yang mampu mengecilkan pengaruh Uni Soviet. Untuk itu dibentuklah negara Federasi Uni Soviet sebagai solusi permasalahan perpecahan yang terjadi

<sup>4</sup> *CCCP (Союз Советских Социалистических Республик)* dalam bahasa inggris lebih dikenal sebagai *USSR (Union of Soviet Socialist Republics)* atau *Negara Federasi Uni Soviet*

<sup>5</sup> Fadli Zon. *Gerakan Etnonasionalis: Bubarnya Imperium Uni Soviet*, hal. 98., merujuk pada V.I. Lenin, *Collected Works*, Vol. 26: September 1917-Februari 1918 (Moscow: Progress Publisher, 1964), hal. 243-262.

<sup>6</sup> *Op. Cit.* Zon, hal. 98, merujuk pada *Dekrety Sovetskoi Vlasti* Vol. 1 (Moscow: Politizdat, 1957), hal. 40, mengutip Gregory Gleason, "The Evolution of the Soviet Federal System," *The Soviet National Reader: The Disintegration in Context* (Boulder, Colorado: Westview Press, Inc., 1992), hal. 107-120.



pada masa itu. Akan tetapi meskipun telah dibentuk Uni Soviet permasalahan antar etnis tetap saja terjadi. Konflik antar etnis yang menuntut pengakuan serta pemberian status *de facto* sebagai tindak lanjut Deklarasi Hak-Hak Rakyat Rusia tahun 1917 mulai dipertanyakan realisasinya. Puncak kemarahan etnis tersebut dapat dilihat terutama dalam kurun waktu periode 1980-1991. Permasalahan primordialisme mewarnai serangkaian aksi konflik antar etnis pada masa tersebut yang sempat terbendung di bawah superioritas Kremlin pada masa Stalin. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991.

Ketika pada masa pemerintahan Iosif Vissarionovich Stalin (*Иосиф Виссарионович Сталин*), Stalin jauh lebih tegas dalam menangani permasalahan etnonasionalisme di Uni Soviet. Kultus individu figur Stalin terutama di negara-negara satelit Uni Soviet ternyata mampu membendung permasalahan antar etnis yang ada. Pada masa pemerintahannya, Stalin melihat bahwa etnonasionalisme merupakan kunci dari segala macam perpecahan negara. Untuk itu perlu ditekankan pentingnya superioritas suatu etnis untuk meredam konflik antar etnis. Dalam pidatonya ketika merayakan kemenangan atas Nazisme pada 24 Mei 1945, Stalin menyatakan bahwa:

*“tidak ada solusi lain dalam menyelesaikan antagonisme bangsa-bangsa kecuali dominasi suatu bangsa atas bangsa lainnya... Rusia adalah bangsa yang memimpin Uni Soviet, di dalam perang ini Rusia telah memenangkan hak untuk dikenal sebagai pemimpin seluruh Uni.”<sup>7</sup>*

Sejak diberikan pengakuan secara *de facto* pada tahun 1920-an terhadap etnis-etnis tersebut, berbagai permasalahan di dalam wilayah muncul sebagai akibat efek domino yang ditimbulkan dari pengakuan tersebut. Seperti pada contoh kasus pemberian status *de facto* terhadap kelompok etnis Ossetia pada masa Lenin yang mengakibatkan adanya perlawanan untuk menuntut kemerdekaan terutama pada masa berakhirnya pemerintahan Uni Soviet tahun 1991. Keterbatasan hak dan intervensi militer mewarnai perkembangan keberadaan republik-republik baru tersebut. Hal ini mempersulit jalannya

<sup>7</sup> *Op. Cit.* Zon, Hal. 110. Mengutip dari J. V. Stalin, “On the Draft Constitution of The USSR.”, *Problems of Leninism*, edisi ke-11, (Moskow: Foreign Languages Publishing House, 1953), hal. 687., dan Pidato Stalin dalam Pravda (25 Mei 1945).

pemerintahan yang baru terbentuk dalam menjalin hubungan luar negeri untuk mencari pengakuan yang lebih luas.

Di masa pemerintahan Mikhail Sergeyevich Gorbachev (*Михаил Сергеевич Горбачёв*)<sup>8</sup>, konflik antar etnis semakin memanas. Kebijakan Glasnost (*гласность*)<sup>9</sup> dan Perestroika (*Перестройка*)<sup>10</sup> telah menyebabkan munculnya semangat ethnonasionalisme dari dalam diri masing-masing kelompok etnis. Dampak yang ditimbulkan lebih lanjut adalah munculnya kelompok-kelompok *insurgent* yang bertransformasi menjadi kelompok separatis. Hal ini menyebabkan timbulnya sentimen dari pemerintah yang berdaulat terhadap kelompok-kelompok ethnonasionalis tersebut. Di dalam Pasal 72 Konstitusi Uni Soviet tahun 1977 disebutkan bahwa,

*“Статья 72. За каждой союзной республикой сохраняется право свободного выхода из СССР.*

*Pasal 72. Setiap Republik Uni memiliki hak untuk keluar dari wilayah Uni Soviet”*<sup>11</sup>

Dengan adanya kebijakan glasnost dan perestroika serta konstitusi tersebut, maka secara tidak langsung Georgia memandang bahwa Uni Soviet mendukung keberadaan kelompok-kelompok separatis yang berada di kawasan Ossetia Selatan. Namun pemerintah Uni Soviet juga tidak mau jika pemerintahnya disebut sebagai dalang yang menyebabkan meningkatnya eskalasi konflik internal di dalam wilayah Georgia yang melibatkan pemerintah Georgia dan kelompok-kelompok etnis yang ada di dalamnya, dimana salah satunya adalah etnis Ossetia yang tinggal di Ossetia Selatan. Hal ini membuat hubungan Uni Soviet dan Georgia semakin merenggang. Hubungan tersebut akan dikaji lebih dalam pada subbab berikutnya

<sup>8</sup> Pada masa itu Gorbachev menjabat sebagai Sekjen Uni Soviet

<sup>9</sup> Glasnost adalah salah satu kebijakan politik yang diterapkan di era Gorbachev yang berarti keterbukaan politik yang menjadi salah satu faktor banyaknya kelompok etnis yang ingin menyatakan kemerdekaannya.

<sup>10</sup> Perestroika adalah kebijakan politik yang diterapkan oleh Gorbachev yang berarti restrukturisasi ekonomi.

<sup>11</sup> *Конституция Союза Советских Социалистических Республик 1977 г.* Diakses dari <http://www.hist.msu.ru/ER/Text/cnst1977.htm> pada 6 Mei 2011 pukul 10.30 WIB.

## 2.2 Hubungan Uni Soviet dan Georgia dalam Kaitannya dengan Ossetia Selatan

Jika dilihat secara *de jure*, wilayah Ossetia Selatan merupakan bagian dalam wilayah yurisdiksi Georgia. Georgia merupakan sebuah negara multinasional<sup>12</sup> dengan keberagaman multi etnis yang sama seperti Uni Soviet. Menurut Fadli Zon dalam bukunya yang berjudul *Gerakan Etnonasionalis: Bubarnya Imperium Uni Soviet* menyatakan bahwa etnonasional Georgia memiliki sentimen yang kuat karena faktor sejarah terutama dalam proses penyatuan dalam formasi Uni Soviet.<sup>13</sup> Sejak masa kekaisaran Rusia pada abad kedelapan belas dan kesembilan belas, selain dihuni oleh etnis Georgia, wilayah Georgia telah dihuni oleh beberapa etnis lain seperti Yahudi, Yunani, Armenia, Azerbaijan, Kurdi, Rusia, Ukraina, Chechnya, Ossetia, dan Abkhazia.<sup>14</sup> Bahkan etnis Ossetia telah mulai bermigrasi ke kawasan Kaukasus sejak masa abad pertengahan.<sup>15</sup>

Beberapa sumber sejarah menyebutkan bahwa sejak awal pemberian status *autonomous oblast* kepada Ossetia Selatan pada masa Uni Soviet, terdapat serangkaian konflik yang mewarnai perkembangan hubungan Ossetia Selatan dengan Georgia. Etnis Ossetia telah bermigrasi ke wilayah Rusia sejak masa pemerintahan dinasti Romanov di Rusia. Sejarahwan setempat mengklaim bahwa nenek moyang bangsa Ossetia menetap di wilayah tersebut sejak abad kelima masehi dan membentuk negara Ossetia. Baik pihak Ossetia Selatan dan Ossetia

<sup>12</sup> Mirzoev, Agit. *Ethnic Minorities in Georgia: Current Situation*. Diakses dari: <http://www.osce.org/odihr/33813> pada 17 Maret 2011 pukul 11.35 WIB.

<sup>13</sup> *Op. Cit.* Zon. Hal. 159.

<sup>14</sup> “...perubahan struktur etnis di wilayah Georgia terjadi secara signifikan dari waktu ke waktu. Hal ini terjadi diakibatkan karena banyaknya etnis yang meminta suaka perlindungan kepada pemerintahan Georgia saat itu diakibatkan karena penganiayaan yang mereka terima di negara mereka sebelumnya dan dikarenakan adanya perang di negara mereka.” Lihat *National Integration and Tolerance in Georgia*, diakses dari [http://www.una.ge/pdfs/publications/survey\\_report\\_eng.pdf](http://www.una.ge/pdfs/publications/survey_report_eng.pdf) pada 17 Maret pukul 18.25 WIB

<sup>15</sup> “...pada umumnya etnis Ossetia terdiri dari etnis Alanian dan Schytian, dimana selain mereka berbicara dalam bahasa Iran dan Ossetia, mereka juga mempelajari agama Kristen Ortodox” Lihat Human Rights Watch, *Bloodshed in the Caucasus: Violation of Humanitarian Law and Human Rights in the Georgia-South Ossetia Conflict*. hal. 2. Diakses dari: <http://www.hrw.org/legacy/reports/pdfs/g/georgia/georgia.923/georgia923full.pdf> pada 17 Maret 2011 pukul 19.05 WIB

Utara memilih bergabung dengan wilayah kerajaan Rusia pada tahun 1774.<sup>16</sup> Namun sayangnya, keberadaan etnis Ossetia di wilayah tersebut selalu dianggap sebagai ‘tamu’ oleh Georgia yang dapat tidak memiliki hak tetap untuk tinggal di wilayah tersebut. Etnis Ossetia mendiami wilayah Georgia sebelah utara. Etnis ini dibagi ke dalam dua kelompok yaitu etnis Ossetia Selatan yang tinggal di sebelah utara wilayah Georgia dan etnis Ossetia Utara yang tinggal di wilayah Rusia. Namun sayangnya, baik Ossetia maupun Georgia memiliki argumen sendiri yang menyatakan bahwa mereka memiliki hak atas wilayah yang ditempati oleh kelompok etnis di Ossetia Selatan tersebut. Etnis Ossetia memandang bahwa mereka telah menempati wilayah tersebut sejak lama jauh sebelum masa seperti yang diprediksikan oleh orang-orang Georgia pada abad ke sembilan belas masehi.<sup>17</sup> Georgia menganggap bahwa orang-orang Ossetia ini seperti telah dikatakan sebelumnya yaitu adalah ‘tamu’ di wilayah mereka, sedangkan etnis Ossetia yang tinggal di wilayah selatan tersebut merasa bahwa mereka memiliki ikatan historis yang kuat dengan saudara mereka di Ossetia Utara sejak lama.<sup>18</sup>

Baik Ossetia maupun Georgia tidak ada yang ingin kalah dalam berargumen. Hal ini membawa dampak buruk bagi keberlangsungan kehidupan mereka ke depannya. Paska runtuhnya masa kekaisaran dinasti Romanov, eskalasi konflik di wilayah Ossetia Selatan meningkat. Georgia yang muncul sebagai sebuah negara baru sejak tahun 1918, mencoba melakukan penetrasi ke wilayah yang dihuni oleh para ‘tamu’ tersebut antara tahun 1918-1921. Georgia menuduh bahwa Ossetia Selatan bekerjasama dengan kelompok Bolshevick Rusia.<sup>19</sup> Pernyataan tersebut diutarakan setelah rakyat Ossetia Selatan menyampaikan keinginannya untuk bergabung dengan saudara-saudaranya di Ossetia Utara.

Konflik antara Georgia dan Ossetia dimulai pada tahun 1918. Pada saat itu, wilayah Georgia dikuasai oleh kaum *Menshevick*, sedangkan wilayah Rusia

<sup>16</sup> *Op. Cit.* Paladin Ansharullah, hal 43, mengutip Svante E. Cornel, *Autonomy and Conflict...* hal 188.

<sup>17</sup> International Crisis Group, *Georgia: Avoiding War in South Ossetia*, (Europe Report No. 159.), Tbilisi/Brussels: ICG: 26 November 2004, Hal. 2.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Op. Cit.* International Crisis Group, *Georgia: Avoiding...* hal 3, merujuk pada Zhorzholiani, et. al. *Op. Cit. The Historical, Political and Legal Aspects of The Georgian-Ossetian Conflict*, hal. 6.

dikuasai oleh kaum *Bolshevick*. Gerakan revolusioner kaum *Bolshevick* dalam menggulingkan rezim tsarisme di Rusia tahun 1917 telah mengilhami rakyat Ossetia untuk membentuk Dewan Nasional Ossetia (*South Ossetian National Council*)<sup>20</sup> sebagai langkah awal menyusun kemerdekaan Ossetia. Konflik awal ini diakibatkan karena adanya dukungan dari tentara Rusia terhadap tentara Ossetia untuk melakukan perlawanan terhadap tentara Georgia. Pemerintah Georgia melihat bahwa pergerakan tersebut dilakukan oleh kelompok *insurgent* Ossetia sehingga pemerintah Georgia mengerahkan kekuatan militernya untuk melawan kelompok tersebut. Akibatnya, terjadi gelombang eksodus besar-besaran ke Rusia. Sedikitnya 20.000 warga Ossetia berpindah ke wilayah Rusia dan desa-desa di wilayah Ossetia dibakar oleh tentara Georgia.<sup>21</sup> Melihat hal tersebut, Rusia yang pada saat itu berada di bawah payung Uni Soviet, segera mengambil tindakan tergesa. Delapan bulan kemudian terjadi invasi yang dilakukan oleh tentara Rusia terhadap Georgia yang mengakibatkan kekalahan Georgia.<sup>22</sup> Pada tahun 1922, wilayah Georgia ‘dianeksasi’ kembali sehingga berada di bawah pemerintahan Uni Soviet. Langkah yang diambil oleh Uni Soviet tersebut dinilai mampu membawa angin perdamaian sementara di wilayah Ossetia Selatan.

Namun isu etnis tersebut kembali memanas terutama pada dekade 1980-an. Memanasnya isu etnis terjadi terutama setelah Gorbachev menjabat sebagai presiden Rusia. Sebelumnya pada masa Leonid Ilyich *Brezhnev* (Леонид Ильич

<sup>20</sup> “After the fall of the Russian Empire the South Ossetians faced the question of national and state self-determination. Four congresses of the Ossetian people, between April and November 1917, took corner-stone decisions which were never violated and were respected by all parties even during the Civil war: Ossetia had integrated territory and policy and Ossetia was part of the Russian state. Moreover, at those congresses a decision was adopted to form executive agencies of Ossetia. The United Ossetian National Council, elected by the Congress of the Ossetian people became the authority in the north, while in the south, it was the South-Ossetian National Council elected by delegates from the Congress of South-Ossetia.” Diakses dari <http://ossetians.com/eng/news.php?newsid=510> pada 3 Mei 2011 pukul 22.01 WIB.

<sup>21</sup> “In the spring of the following year, the Caucasian Bureau of the All-Russian Communist Party formed a special South Ossetian Revolutionary Committee to lead an armed revolt against the Georgian government. A Russian-sponsored Ossete force crossed the border from Vladikavkaz in June 1920 and attacked the Georgian Army and People’s Guard. The Georgians reacted with vigour and defeated the insurgents and their supporters in a series of hard-fought battles. Five thousand people perished in the fighting and 20,000 Ossetes fled into Soviet Russia. The Georgian People’s Guard displayed a frenzy of chauvinistic zeal during the mopping-up operations, many villages being burnt to the ground and large areas of fertile land ravaged and depopulated.” Lihat David Marsha Lang, *A Modern History of Georgia*, (London: Weidenfeld and Nicolson, 1962), Hal. 228–229.

<sup>22</sup> *Ibid.* Lang. 232-236.

*Бре́жнев*),<sup>23</sup> pada tahun 1978 terjadi sebuah peristiwa penting dimana terjadi sebuah demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa, akibat rencana perubahan Konstitusi Uni Soviet yang berlaku di Georgia. Brezhnev merubah Konstitusi 1936 dengan Konstitusi 1977 yang menyatakan bahwa bahasa Georgia tidak lagi menjadi bahasa nasional. Hal ini dilakukan Brezhnev sebagai salah satu usaha meredam konflik antar etnis yang terjadi di Georgia. Dalam salah satu isi konstitusi tersebut, tercantum pasal yang menyatakan bahwa bahasa Georgia tidak lagi menjadi bahasa nasional, melainkan digantikan dengan bahasa Rusia dan juga bahasa-bahasa etnis yang mendiami suatu wilayah negara. Hal ini tercantum pada Pasal No. 36 Konstitusi Uni Soviet tahun 1977 yang menyatakan bahwa:

*“Статья 36. Граждане СССР различных рас и национальностей имеют равные права.*

*Осуществление этих прав обеспечивается политикой всестороннего развития и сближения всех наций и народностей СССР, воспитанием граждан в духе советского патриотизма и социалистического интернационализма, возможностью пользоваться родным языком и языками других народов СССР.*

*Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав, установление прямых или косвенных преимуществ граждан по расовым и национальным признакам, равно как и всякая проповедь расовой или национальной исключительности, вражды или пренебрежения — наказываются по закону*

*Pasal 36. Penduduk Uni Soviet dari berbagai ras dan kebangsaan memiliki hak yang sama*

*Pelaksanaan atas hak ini dijamin oleh suatu kebijakan yang mengatur seluruh pembangunan dan menggambarkan keberagaman ras dan bangsa di Uni Soviet bersama-sama, dengan cara mengajarkan kepada masyarakat nilai-nilai semangat patriotisme Uni Soviet dan Sosialis internasional, dan dengan kemungkinan menggunakan bahasa ibu dan bahasa masyarakat Uni Soviet yang lain.*

*Pembatasan hak atas masyarakat baik secara langsung ataupun tidak langsung, atau pembentukan hak baik itu secara langsung atau pun tidak langsung kepada suatu kelompok ras atau bangsa, dan pemberian hak eksklusif kepada ras atau bangsa tertentu di dalam perihal advokasi, permusuhan atau penghinaan akan mendapatkan sanksi hukum sesuai hukum yang berlaku.”<sup>24</sup>*

<sup>23</sup> Brezhnev menjabat sebagai pemimpin Uni Soviet sejak tahun 1964-1982.

<sup>24</sup> *Конституция Союза Советских Социалистических Республик 1977 г.* Diakses dari <http://www.hist.msu.ru/ER/Text/cnst1977.htm> pada 3 Mei 2011 pukul 23.25 WIB.

Kebijakan pemerintahan Brezhnev tersebut tidak disambut positif terutama oleh rakyat Georgia. Protes yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa tersebut memaksa pemerintah Georgia di bawah Shevardnadze untuk membatalkan rencana perubahan konstitusi yang berlaku di Georgia tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh Shevardnadze tersebut merupakan tindakan pertama dalam sejarah Uni Soviet dimana sebuah pemerintahan komunis menetapkan kebijakannya berdasarkan opini publik tanpa mengundang reaksi negatif dari Moskow.<sup>25</sup> Shevardnadze tidak hanya dibiarkan oleh Moskow dalam melakukan hal tersebut, melainkan juga dirinya ditunjuk oleh Moskow sebagai kandidat anggota Politburo pada bulan Oktober 1978 dan sebagai Menteri Luar Negeri Uni Soviet oleh Gorbachev pada tahun 1985. Penunjukkan Shevardnadze tersebut mengisyaratkan bahwa dirinya masih memiliki reputasi yang baik di mata Moskow dan menyiratkan bahwa Georgia masih mempertahankan status istimewa daripada republik-republik lain.<sup>26</sup>

### **2.3 Keterlibatan Uni Soviet dalam Eskalasi Konflik dan Perang Sipil di Wilayah Georgia Tahun 1989 - 1991**

Di akhir masa kejayaan Uni Soviet, eskalasi politik di wilayah Georgia meningkat. Akibatnya adalah terjadinya konflik antara Ossetia Selatan dengan Georgia. Kebijakan *glasnost* dan *perestroika* yang dilaksanakan oleh Gorbachev disinyalir menjadi indikasi utama penyebab meningkatnya konflik etnis di kawasan Kaukasus tersebut. Kebebasan beraspirasi yang merupakan inti dari kebijakan *glasnost* dimanfaatkan oleh kelompok etnis Ossetia yang tinggal di Ossetia Selatan untuk menyampaikan tuntutan yang selama ini membelenggu kebebasan aspirasi mereka. Kebebasan semu yang selama ini dijanjikan mulai dipertanyakan realisasinya. Akibatnya adalah pecahnya perang sipil di wilayah tersebut selama kurun waktu 1991-1992. James Fearon, seorang professor di bidang ilmu politik di *Stanford University* mendefinisikan *civil war* sebagai sebuah konflik kekerasan di dalam suatu negara yang diatur oleh suatu kelompok

<sup>25</sup> Cornell, Svante E. *Small Nation and Great Power: A Study of Ethnopolitical Conflict in the Caucasus*. (London: Routledge Curzon. 2001), hal. 142.

<sup>26</sup> *Ibid.* Palladin Ansharullah, hal. 41.

terorganisir dimana bertujuan untuk mengambil alih kekuasaan baik di tingkat pusat maupun daerah, atau untuk sekedar mengubah suatu kebijakan yang diambil pemerintah.<sup>27</sup>

Perang sipil tersebut diakibatkan karena meningkatnya *euphoria* nasionalisme di wilayah Georgia. Pemimpin gerakan nasionalis Georgia, Zviad Gamsakhurdia, melakukan serangkaian aksi protes yang ditujukan kepada pemerintahan Uni Soviet dan juga kepada etnis Ossetia Selatan dan Abkhazia, selain itu dia juga mengatakan bahwa Ossetia merupakan “tamunya yang tidak tahu berterima kasih kepada Georgia”.<sup>28</sup> Pemerintah Georgia melalui semangat nasionalismenya mulai bersikap arogan. Melihat hal ini, pemerintah Ossetia Selatan merasa bahwa integritasnya mulai terancam dan mulai mengorganisir diri membentuk sebuah wadah yang menyatukan seluruh rakyat Ossetia Selatan di bawah payung *Ademon Nykhas (Popular Shrine)* dan mulai mengintegrasikan pergerakan mereka dengan etnis Abkhazia dibawah gerakan *Aidgilara (Unity)*. Pada tanggal 23 November 1989, aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Gamsakhurdia, mendapat perlawanan dari pihak Ossetia Selatan. Bentrokan berdarah pun terjadi dan pada akhirnya memaksa etnis Ossetia untuk mempersenjatai diri mereka pada bulan-bulan berikutnya.<sup>29</sup> Akibat dari insiden berdarah tersebut memaksa *Ademon Nykhas* mengirimkan petisi ke Moskow untuk menggabungkan kembali Ossetia Selatan dan Ossetia Utara. Isi petisi tersebut antara lain menyatakan:

*“it seems to us politically and economically absurd that within the framework of a democratic state the small Ossetian people should be divided into two administrative units; and we demand that the question of the unification of North and South Ossetia be examined at the (Communist Party of the Soviet Union) Central Committee Plenum on nationality questions”*<sup>30</sup>

Pada saat terjadi pemilihan presiden Georgia pada tahun 1990, setiap partai politik di Georgia mengkampanyekan politik pluralisme dan perdagangan bebas. Isu pluralisme di Georgia merupakan isu yang sangat krusial karena sangat

<sup>27</sup> *Civil War*, diakses dari [http://en.wikipedia.org/wiki/Civil\\_war\\_pada\\_25\\_Maret\\_2011](http://en.wikipedia.org/wiki/Civil_war_pada_25_Maret_2011), pukul 20.32 WIB.

<sup>28</sup> *Ibid.* Jones, hal. 294-295.

<sup>29</sup> Cvetkovski, Nikola. “*The Georgian-South Ossetian Conflict*” diakses dari <http://www.caucasus.dk/chapter4.htm> pada 29 Maret 2011 pukul 07.23 WIB.

<sup>30</sup> *Op. Cit.* Paladin Ansharullah, hal. 45, mengutip Svante E. Cornell *Small Nation...* hal. 154.



riskan memicu konflik antar etnis. Sedangkan permasalahan pasar bebas merupakan efek dari penerapan kebijakan *glasnost*, yang pada akhirnya membawa kehancuran di dalam tubuh Uni Soviet. Zviad Gamsakhurdia yang merupakan salah seorang calon presiden pada saat itu, bersama dengan koalisinya yaitu pihak *Round Table-Free Georgia*, mengkampanyekan program kerja yang sangat berbeda dari lawan-lawan politiknya. Dia menyuarakan kebebasan, sistem multipartai, sanksi hukum, kebijakan ekonomi pasar, dan garansi terhadap hak masyarakat seperti kebebasan beragama dan kebebasan media.<sup>31</sup> Kampanye politik Gamsakhurdia akhirnya mampu membawanya memenangkan kursi pemerintahan Georgia. Dia mengantongi sebanyak 155 dari 250 kursi parlemen Georgia. Sedangkan lawan politiknya, Partai Komunis Georgia (CPG) hanya mampu mengantongi sebanyak 29,6 persen suara.

Namun akhirnya hasil pemilihan presiden tersebut membawa dampak buruk bagi hubungan antar etnis di Georgia. Kondisi politik Georgia yang belum stabil semakin memperkeruh suasana. Hal ini semakin diperparah dengan tindakan Gamsakhurdia yang mendesovietisasi konstitusi Georgia. Gamsakhurdia melalui otoritasnya merubah sistem sosialisme yang dianut di dalam konstitusi Georgia. Selain itu dia juga mengakhiri supremasi hukum persatuan, merubah nama Republik Georgia, mengganti himne serta bendera negara, mengamandemen undang-undang, membatalkan draf kerjasama dengan tentara Uni Soviet dan mengganti struktur provinsial partai.<sup>32</sup> Kemenangan Gamsakhurdia juga menjadi jalan dalam memperkuat keinginannya untuk menghapuskan wilayah etnis Ossetia Selatan dan Abkhazia sebagai republik otonom dan mengintegrasikannya ke dalam wilayah Georgia. Gamsakhurdia sejak awal rencana proklamasi kemerdekaan diri Abkhazia dan Ossetia Selatan telah menunjukkan sikap resistensi terhadap hal tersebut. Dalam salah satu pernyataannya dia menyatakan bahwa:

*“We should deport Ossetians to Russia; we should divide the Abkhaz territory, we should abolish Adzhariya's autonomy as there should be*

---

<sup>31</sup> *Ibid.* Jones, hal. 297.

<sup>32</sup> *Ibid.*

*no autonomies in the territory of Georgia where only the title nation should rule”<sup>33</sup>*

Pernyataan Gamsakhurdia tersebut dipandang Rusia sebagai faktor awal pemicu ketegangan antara Rusia dan Georgia. Hal ini mengingat wilayah Ossetia Selatan mayoritas dihuni oleh etnis Rusia. Sesuai dengan isi Pasal No. 33 Konstitusi Uni Soviet tahun 1977 yang menyatakan bahwa:

*“Статья 33. В СССР установлено единое союзное гражданство. Каждый гражданин союзной республики является гражданином СССР.*

*Основания и порядок приобретения и утраты советского гражданства определяются Законом о гражданстве СССР.*

*Граждане СССР за границей пользуются защитой и покровительством Советского государства.*

*Пасал 33. Uni Soviet menerapkan sistem kewarganegaraan tunggal. Setiap warga negara Republik Uni merupakan warga negara Uni Soviet.*

*Dasar-dasar dan prosedur untuk memperoleh status kewarganegaraan atau menghilangkan status kewarganegaraan diatur oleh Undang-Undang tentang kewarganegaraan Uni Soviet.*

*Warga negara Uni Soviet yang berada di luar negeri juga memperoleh perlindungan dan bantuan dari Pemerintah Uni Soviet.”<sup>34</sup>*

Tidak sedikit etnis Rusia yang tinggal di wilayah Georgia.<sup>35</sup> Maka berdasarkan isi artikel tersebut di atas, Rusia memiliki dalih untuk melindungi rakyatnya yang berada di Ossetia Selatan ketika eskalasi konflik di wilayah tersebut terjadi. Serangan pertama yang dilakukan oleh tentara Georgia terhadap warga sipil di Tskinali terjadi pada bulan Januari 1991. Setelah masa kejayaan Uni Soviet berakhir akibat Perang Dingin, Rusia mencoba mengembalikan stabilitas keamanan wilayahnya. Rusia khawatir bahwa perang sipil yang terjadi di Georgia akan mempengaruhi stabilitas keamanan Rusia. Untuk itu Rusia perlu ikut andil dalam mendamaikan kedua belah pihak. Perang tersebut pada akhirnya berakhir pada tahun 1992. Perang yang terjadi selama kurun waktu dua tahun

<sup>33</sup> “Situation Around Abkhazia and Ossetia” diakses dari <http://www.un.int/russia/new/MainRoot/docs/warfare/statement051208en.htm> pada 13 Januari 2011 pukul 19.02 WIB. Terjemahan oleh penulis.

<sup>34</sup> *Ibid.* Конституция Союза Советских Социалистических Республик 1977 г.

<sup>35</sup> lihat lampiran 6.

tersebut diakhiri dengan gencatan senjata serta pembentukan *Joint Peacekeeping Force* (JPKF) antara tiga pemerintahan yaitu Rusia, Georgia dan Ossetia Selatan. Rusia merasa perlu mengambil bagian di dalam JPKF karena mayoritas penduduk Ossetia Selatan merupakan orang-orang Rusia yang tinggal di sana. Dalam kaitannya antara pembentukan JPKF dan perlindungan orang-orang Rusia yang tinggal di kawasan Ossetia Selatan ada agenda khusus yang dibawa oleh Rusia di dalam keterlibatannya membentuk JPKF, yaitu adalah menjaga pengaruh Rusia di wilayah Georgia. Rusia perlu menjaga pengaruhnya di Georgia karena kedekatan Georgia dengan NATO dimana dapat mengancam pada penurunan pengaruh Rusia di wilayah Georgia.



### BAB 3

## HUBUNGAN UNI SOVIET DENGAN PAKTA WARSAWA DAN PERLUASAN NATO KE KAWASAN KAUKASUS DALAM KAITANNYA DENGAN IMPLEMETASI GEOPOLITIK

Sejak Uni Soviet dipimpin oleh Stalin hingga pada masa pemerintahan Federasi Rusia yang dipimpin oleh Dmitry Medvedev (*Дмитрий Медведев*)<sup>1</sup> telah terjalin suatu hubungan antara Rusia dan NATO. Selama kurun waktu tersebut hubungan diplomatik diantara keduanya selalu mengalami pasang surut. Kehancuran Pakta Warsawa yang ditandai dengan kehancuran Uni Soviet pada tahun 1991, memberikan angin segar bagi NATO untuk menyebarluaskan pengaruhnya (*sphere of influence*) ke wilayah Eropa Timur terutama pada negara-negara tetangga (*ближнее зарубежье*) Rusia.

Secara konseptual, dapat dikatakan bahwa *ближнее зарубежье* Rusia merupakan negara-negara bekas Uni Soviet, yang meliputi negara-negara di kawasan Eropa Timur, Baltik, Kaukasus dan Asia Tengah. Wilayah kekuasaan dan pengaruh Uni Soviet yang sangat luas menyebabkan Rusia menjadi sebuah kawasan tertutup (*land lock*). Hal itulah yang mempersulit NATO untuk menjangkau masuk ke dalam wilayah Rusia jika seandainya Perang Dingin mencair. Akan tetapi sejak keruntuhan Uni Soviet, konsep geopolitik yang sejak awal sudah direncanakan Uni Soviet harus berubah. Wilayah kekuasaan Rusia semakin menyempit yang mengakibatkan Rusia harus kehilangan tembok-tembok perlindungannya. Untuk itu, demi tetap menjaga wilayah serta pengaruhnya di kawasan tersebut, Rusia membentuk *Commonwealth of Independent States (CIS)*<sup>2</sup> yang berisi negara-negara eks-Uni Soviet.

---

<sup>1</sup> Dmitry Medvedev adalah Presiden Rusia saat ini.

<sup>2</sup> “*Commonwealth of Independent States (CIS) / Содружество Независимых Государств (SNG)* merupakan sebuah persemaikmuran yang terbentuk seiring dengan proses kehancuran Uni Soviet pada tahun 1991. Pembentukan CIS didasari pada upaya menyatukan negara-negara baru yang sebelumnya tergabung dalam Uni Soviet, namun dalam kondisi yang lebih longgar.” Lihat buku A. Fahrurudji, *Rusia Baru Menuju Demokrasi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hal. 227.

Pembentukan CIS pada dasarnya tidak hanya bertujuan untuk menguatkan posisi tawar Rusia di kawasan tersebut, melainkan juga dimanfaatkan oleh negara-negara eks-Uni Soviet. Namun di samping itu, NATO juga tidak dapat tinggal diam ketika melihat Rusia menyebarkan pengaruhnya di kawasan negara-negara eks-Uni Soviet tersebut. NATO mulai melakukan pendekatan diplomatik ke wilayah eks-Uni Soviet, terutama di wilayah Kaukasus. Kondisi ini dimanfaatkan oleh negara-negara di kawasan tersebut untuk memilih ingin bergabung dengan CIS atau NATO. Baik NATO maupun Rusia melihat setiap usaha tersebut sebagai sebuah ancaman yang mampu mencairkan kembali Perang Dingin. Georgia yang sejak awal kehancuran Uni Soviet menyatakan ingin mengadopsi kebijakan barat melihat usaha yang dilakukan NATO merupakan sebuah pintu masuk harapan untuk keluar dari cengkraman Rusia. Keinginan Georgia tersebut dinilai sebagai sebuah ancaman bagi Rusia, sehingga membuat Rusia harus melakukan diplomasi untuk menghambat keinginan Georgia bergabung dengan NATO. Hal ini menyebabkan kondisi di kawasan regional Kaukasus tidak pernah stabil.

Untuk melihat kondisi politik di kawasan Kaukasus tersebut, ada baiknya jika kita melihat akar permasalahan hubungan NATO dan Pakta Warsawa di masa lalu, karena hubungan keduanya selama masa Perang Dingin mempengaruhi hubungan diplomatik antara Rusia dan NATO pada saat ini.

### **3.1 NATO**

#### **3.1.1 Sejarah NATO**

Perang Dunia Kedua<sup>3</sup> berakhir pada tahun 1945 ditandai dengan kekalahan negara fasis Jerman beserta sekutunya dan ditandatanganinya Perjanjian Postdam serta diledakkannya kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang setelah terjadinya serangan *Kamikaze*<sup>4</sup> tentara Jepang. Setelah Perang Dunia tersebut berakhir,

---

<sup>3</sup> Perang Dunia Kedua terjadi pada 1 September 1939 sampai 2 September 1945. Perang ini diawali dengan invasi Jerman atas Polandia dan berakhir ketika Jepang menyerah tanpa syarat kepada Amerika.

<sup>4</sup> *Kamikaze* dalam bahasa Jepang secara harafiah diartikan sebagai angin dewa/angin topan. Namun, dalam bahasa Inggris kata tersebut diidentikkan dengan serangan yang dilakukan oleh

wilayah Jerman dibagi menjadi dua yaitu wilayah Barat dikuasai oleh negara-negara Barat (Amerika Serikat, Inggris dan Prancis) sedangkan wilayah Timur dikuasai oleh Uni Soviet. Kedua wilayah tersebut dipisahkan oleh sebuah tembok besar di kota Berlin, atau yang sering kita sebut sebagai Tembok Berlin. Pembagian wilayah tersebut tidak hanya mengacu kepada pembagian wilayah hasil rampasan perang, melainkan juga merupakan sebuah tanda sebagai pembagian wilayah kekuasaan. Seolah ingin melegitimasi kekuatannya di wilayah tersebut, Amerika Serikat ingin menunjukkan bahwa dirinya telah menguasai wilayah Eropa Barat.

Untuk semakin melegalkan kekuasaannya di wilayah Eropa Barat, Amerika Serikat mulai merangkul negara-negara sekutunya yang ikut andil dalam Perang Duniakedua di kawasan tersebut pada tahun 1949. Namun sebelumnya pada tanggal 17 Maret 1948, negara-negara Eropa Barat seperti Belgia, Belanda, Luxemburg, Prancis dan Inggris menandatangani Perjanjian Brussel yang merupakan awal terbentuknya Organisasi Pertahanan Eropa Barat (*Western European Union's Defence Organization/WEUDO*) pada bulan September 1948 setelah terjadinya pembagian wilayah Berlin dengan pihak Uni Soviet.<sup>5</sup> Sementara itu keinginan Amerika Serikat untuk merangkul Eropa Barat adalah untuk melawan kekuatan Uni Soviet yang dinilai semakin besar. Untuk itu Amerika Serikat menawarkan suatu bentuk aliansi pertahanan yang mampu merealisasikan keinginannya tersebut. Aliansi pertahanan tersebut akhirnya dapat direalisasikan pada tahun 1949. Bersama dengan kelima negara yang telah tergabung ke dalam Perjanjian Brussel, Amerika Serikat, Italia, Kanada, Portugal, Norwegia, Denmark dan Islandia membentuk pakta Aliansi Pertahanan Atlantik Utara (*North Atlantic Treaty Organization/NATO*) pada tanggal 4 April 1949. Sementara itu, Turki dan Yunani bergabung ke dalamnya pada tahun 1952 dan Jerman Barat pada 1955. Permasalahan muncul ketika eksistensi WEUDO mulai dipertanyakan. Sebagai organisasi pertahanan pertama yang terbentuk di kawasan Eropa, seharusnya WEUDO menjadi tolak ukur pertahanan yang diterapkan di kawasan Eropa, akan

---

awak pesawat Jepang terhadap kapal induk Amerika Serikat di Pearl Harbour dalam Perang Pasifik selama masa Perang Duniakedua.

<sup>5</sup> Isby, David C. dan Kamps Jr, Charles, *Armies of NATO's Central Front*. (New York: Jane's Publishing Company Ltd, 1985), hal. 13.

tetapi kenyataan yang ada berbeda, hal ini dikarenakan kapasitas militer yang dimiliki NATO jauh lebih unggul daripada yang dimiliki oleh WEUDO. Keunggulan kapasitas militer tersebut diakibatkan karenan Amerika berada di belakang NATO, sehingga WEUDO dianggap tidak dapat mewadahi NATO.

Dalam pembentukan aliansi pertahanan tersebut, NATO tidak dapat keluar dari ketentuan yang telah dicanangkan di dalam Artikel No. 51 Piagam PBB yang menyatakan bahwa

*“Article 51. Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defence shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security.”<sup>6</sup>*

Berdasarkan isi di dalam ketentuan PBB di atas, NATO menawarkan sistem pertahanan kolektif yang mewajibkan kepada seluruh anggota NATO membantu anggota yang lain, apabila terdapat negara anggota yang mendapat serangan dari negara lain. Sistem pertahanan kolektif tersebut diatur di dalam Artikel No. 5 Perjanjian NATO yang menyatakan bahwa

*“Article 5. The Parties agree that an armed attack against one or more of them in Europe or North America shall be considered an attack against them all and consequently they agree that, if such an armed attack occurs, each of them, in exercise of the right of individual or collective self-defence recognised by Article 51 of the Charter of the United Nations, will assist the Party or Parties so attacked by taking forthwith, individually and in concert with the other Parties, such action as it deems necessary, including the use of armed force, to restore and maintain the security of the North Atlantic area.*

*Any such armed attack and all measures taken as a result thereof shall immediately be reported to the Security Council. Such measures shall be*

---

<sup>6</sup> *Charter of The United Nations. Chapter VII: Action With Respect To Threats To The Peace, Breaches of The Peace, And Acts of Aggression.* Diakses dari <http://www.un.org/en/documents/charter/chapter7.shtml> pada 10 Mei 2011 pukul 23.15 WIB.

*terminated when the Security Council has taken the measures necessary to restore and maintain international peace and security.”<sup>7</sup>*

Selama masa Perang Dingin, NATO selalu bersitegang dengan Pakta Warsawa. Untuk menghadapi Rusia yang semakin menancapkan kekuasaannya di kawasan Eropa Timur, NATO memiliki slogan “*keep America in, Germany down and Russia out*”<sup>8</sup> yang digunakan untuk semakin mengobarkan semangat perlawanan terhadap Rusia. Meskipun keduanya tidak pernah bertempur secara langsung, akan tetapi akibat peningkatan eskalasi konflik diantara keduanya telah menyebabkan perseteruan di pihak lain. Konflik di wilayah Korea pada tahun 1950 merupakan salah satu bukti bahwa konflik diantara keduanya memberikan efek domino bagi hubungan Korea Utara dan Korea Selatan. Selain itu, kemelut di dunia ketiga juga merupakan salah satu akibat yang ditimbulkan oleh adanya Perang Dingin tersebut. Perang Afghanistan merupakan contoh akibat perang tersebut. Perang Afghanistan pada tahun 1979 terjadi akibat adanya dukungan pasukan Uni Soviet yang diturunkan di Afghanistan terhadap mantan Perdana Menteri Afghanistan, Nur Muhammad Taraki, yang pro kebijakan pemerintah Marxis di wilayah Afghanistan. Setidaknya pemerintah Uni Soviet sedikitnya menurunkan 75.000 personilnya dalam membantu usaha mantan Perdana Menteri tersebut.<sup>9</sup> Akibat intervensi yang dilakukan oleh pasukan Uni Soviet di wilayah Afghanistan, pemerintah Amerika Serikat di bawah mandat Presiden Carter akhirnya mencabut Perjanjian SALT II (*Strategic Arms Limitation Talks II*) dari Senat AS, dan memaksakan embargo terhadap teknologi dan biji-bijian yang dikirimkan ke Uni Soviet dan mengancam akan memboikot Olimpiade 1980 yang akan dilaksanakan di Moskow.<sup>10</sup>

Konflik Perang Dingin tersebut akhirnya dimenangkan oleh pihak NATO. Kekalahan Uni Soviet dan Pakta Warsawa akibat adanya kemelut di dalam kawasan intra Uni Soviet dan hubungan dengan negara-negara Eropa Timur, membawa NATO menjadi satu-satunya aliansi *super power*. Pakta Warsawa tidak mampu melindungi dinding komunisme di dalam kawasan Eropa Timur. Banyak

<sup>7</sup> *The North Atlantic Treaty*, diakses sari <http://www.nato.int/docu/basic/txt/treaty.htm> pada 13 Mei 2011 pukul 09.37 WIB.

<sup>8</sup> Ulman, Harlan, *NATO Needs A Slogan*, diakses dari [http://www.acus.org/new\\_atlanticist/nato-needs-slogan](http://www.acus.org/new_atlanticist/nato-needs-slogan) pada 13 Mei 2011 pukul 19.30 WIB.

<sup>9</sup> Gaddis, John Lewis., *The Cold War: A New History*, (USA: Penguin Press, 2005), Hal. 210.

<sup>10</sup> *Ibid.* Gaddis, Hal. 211.



negara Eropa Timur yang menginginkan kebebasan paska kematian Stalin. setelah tahun 1991, sebagian besar negara-negara Eropa Timur yang dahulu bergabung ke dalam aliansi Pakta Warsawa bergabung ke dalam NATO.

### 3.1.2 Perluasan NATO Ke Timur

Kekalahan Uni Soviet dalam Perang Dingin telah memberikan dampak kepada NATO kesempatan untuk menyebarluaskan pengaruhnya ke wilayah Eropa Timur. Sejak awal pembentukan Pakta Warsawa, wilayah Eropa Timur merupakan bagian dari penerapan kebijakan Luar Negeri Uni Soviet berkaitan dengan strategi keamanan Uni Soviet. Namun sayangnya, ketakutan akan kebangkitan ideologi komunisme dan ancaman munculnya rezim Stalin baru membuat negara-negara yang tergabung di dalam Pakta Warsawa harus mengundurkan diri. Di samping itu, krisis yang terjadi di kawasan Kaukasus terutama di era dekade 1980-1991 sebagai akibat kebijakan glasnost dan perestroika mewarnai serangkaian kejadian yang menjadi faktor penentu kehancuran Uni Soviet. Hal inilah yang dipandang oleh NATO sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan NATO dalam menghancurkan Uni Soviet disamping krisis ekonomi yang melanda Uni Soviet pada masa itu.

Sebagai aliansi yang keluar sebagai pemenang, NATO menjadi sebuah aliansi *super power* yang tidak memiliki tandingan. Pakta Warsawa yang dulu menjadi saingan kini telah lenyap dan digantikan oleh CIS yang diharapkan akan membawa angin kerjasama baru yang lebih baik bagi hubungan diplomatik Rusia dengan negara-negara eks-Uni Soviet. Akan tetapi kenyataan yang terjadi tidak sesuai yang diharapkan. Hal ini dimanfaatkan oleh NATO untuk ‘menginvasi’ wilayah Eropa Timur. Ketidakstabilan kondisi politik dan keamanan di kawasan Eropa Timur dimanfaatkan oleh NATO untuk menawarkan sistem pertahanan kolektif di kawasan tersebut. Namun, tidak hanya kawasan Eropa Timur, melainkan juga kawasan Eropa Tengah menjadi target sasaran pelebaran sayap pengaruh NATO. Ronald D. Asmus dkk. menyatakan bahwa pihak pemerintah demokrat negara-negara Eropa Timur dan Eropa Tengah sangat memahami

dengan baik paham demokrasi akan sukses jika negara mereka menjadi bagian dari politik keamanan Eropa dan Barat, serta menjadi bagian dari komunitas ekonomi dan militer. Hal ini seperti terlihat di dalam kasus Jerman Barat. Jerman Barat mungkin tidak akan pernah menjadi negara dengan sistem demokrasi ala Barat yang stabil apabila tidak dirangkul oleh NATO. Selain itu, negara-negara yang tergabung ke dalam NATO juga saling membantu menstabilkan demokrasi dan menggulingkan sistem otoriter di negara Portugal, Spanyol, Yunani dan Turki.<sup>11</sup>

Pada bulan Februari 1994, NATO memerintahkan kepada pasukan militer yang melakukan aksi dalam radius 20 kilometer dari Sarajevo untuk menyerahkan seluruh kekuatan persenjataan berat mereka kepada NATO dan menahan diri untuk tidak melakukan serangan di kawasan tersebut. Selain itu, NATO juga menetapkan wilayah tersebut sebagai zona eksklusif sebagai bagian dari subyek serangan udara NATO tanpa adanya otoritas yang diberikan secara langsung oleh DK-PBB. Hal inilah memicu krisis penting pertama dalam hubungan Rusia dan Barat paska Perang Dingin yang ditujukan Rusia kepada NATO. Krisis berakhir dengan tidak adanya serangan ke wilayah Sarajevo tersebut dan pengembalian figur NATO di wilayah tersebut.<sup>12</sup>

Masa awal pemerintahan Federasi Rusia merupakan masa yang sulit bagi Rusia untuk mengembalikan kekuatannya kembali seperti pada masa Uni Soviet. Sebagai negara yang kalah dalam perang, Rusia dinilai tidak cukup mampu untuk mengimbangi hegemoni NATO tersebut. Rusia baru terlalu lemah sehingga hal ini mendorong Boris Yeltsin (*Борис Ельцин*)<sup>13</sup> untuk berpikir pragmatis pada masa awal pemerintahannya, dengan menyatakan bahwa terdapat kemungkinan Rusia bergabung dengan NATO.<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Asmus, Ronald D., Kugler, Richard L., Larrabee, F. Stephen, *Building A New NATO*, diakses dari <http://www.jstor.org/stable/20045713.pdf> pada 4 November 2010 pukul 09.32 WIB.

<sup>12</sup> Headley, Jim, *Sarajevo, February 1994: The First Russia-NATO Crisis of the Post-Cold War Era*, diakses dari <http://www.jstor.org/stable/pdfplus/20097846.pdf> pada 13 Mei 2011 pukul 17.30 WIB.

<sup>13</sup> Boris Yeltsin merupakan Presiden pertama Federasi Rusia.

<sup>14</sup> Smith, Julian, *The NATO – Russia Relationship Defining Moment or Déjà vu?* CSIS and IFRI November 2008, diakses dari [csis.org/files/media/csis/pubs/081110\\_smith\\_natorussia\\_web.pdf](http://www.csis.org/files/media/csis/pubs/081110_smith_natorussia_web.pdf) pada 17 Mei 2011 pukul 17.18 WIB.

Sehubungan dengan pernyataan Yeltsin tersebut, pihak Kementerian Luar Negeri Rusia (*Министерство Иностранных Дел*) di bawah kepemimpinan Andrei Kozyrev menetapkan bahwa Rusia perlu melakukan pendekatan ‘liberalis internasional’ sebagai bagian dari kebijakan luar negeri resmi Rusia.<sup>15</sup> Kebijakan tersebut terdiri dari dua prinsip utama yaitu bahwa keyakinan akan paham liberal sebagai penghubung dalam kerjasama menciptakan sebuah negara demokratis dan secara institusional memperlihatkan bahwa lembaga-lembaga internasional memiliki peran dalam mengatur hubungan internasional di atas kepentingan masing-masing negara. Kebijakan tersebut diterapkan sebagai bagian usaha Rusia untuk menjalin kerjasama dengan Barat sebagai mitra alami dengan tujuan utama agar Barat merubah paradigmanya terhadap Rusia. Rusia ingin menunjukkan bahwa saat ini telah menerapkan atmosfir demokrasi dalam setiap kebijakannya, selain itu Rusia juga ingin menunjukkan bahwa dirinya mampu menjadi mitra yang dapat bertanggungjawab, peduli akan hak asasi manusia dan dapat menegakkan hukum-hukum internasional sesuai dengan prinsip liberal ala Barat.

Hal ini mendorong Barat untuk semakin meningkatkan kerjasama dengan Rusia. Pada bulan Mei 1997, NATO dan Rusia menandatangani *NATO-Russia Founding Act* yang menjadi dasar pendirian *Permanent Joint Council (PJC)*.<sup>16</sup> Selain itu pada tahun yang sama pula, NATO berhasil merangkul Polandia, Hungaria dan Ceko<sup>17</sup> masuk ke dalam aliansi mereka, setelah mendapat persetujuan dari Yeltsin paska kunjungan tahun 1993 ke Ceko dan Polandia.

Sementara itu, ketika pada masa awal pemerintahan Yeltsin, kondisi perekonomian Rusia sangat lemah. Pada bulan oktober 1991, Yeltsin mencanangkan program reformasi ekonomi menuju mekanisme pasar radikal, hal inilah yang memicu krisis ekonomi yang mengakibatkan Rusia berada di dalam kondisi terpuruknya. Krisis ekonomi ini berlanjut hingga masa akhir jabatan Yeltsin pada tahun 1999. Krisis ekonomi tersebut tidak dapat terlepas dari peran IMF (*International Monetary Fund*) dalam menentukan kebijakan ekonomi yang

<sup>15</sup> *Ibid.* Headley.

<sup>16</sup> PJC merupakan sebuah forum yang memberikan kepada anggotanya hak untuk mendiskusikan mengenai permasalahan keamanan yang terjadi di wilayahnya masing-masing.

<sup>17</sup> Berdasarkan hasil penandatanganan Protokol NATO di Brussel pada 16 Desember 1997, Polandia, Hungaria dan Ceko telah resmi menjadi bagian dalam aliansi NATO.

harus diterapkan oleh Rusia. IMF memberikan saran agar Rusia menerapkan sistem perekonomian pasar. Selain itu, IMF juga menyarankan agar Rusia melakukan kebijakan privatisasi terhadap aset-aset negara. Akibatnya, dalam krisis ekonomi yang sudah dimulai sejak tahun 1987 hingga tahun 1999 tersebut, setidaknya terjadi pelarian modal dari Rusia sekitar 150-300 Miliar dollar Amerika. Di sisi lain, jumlah utang luar negeri Rusia sudah mencapai 150 miliar dollar Amerika dan susah membayarnya jika *status quo* berlanjut. Dari jumlah itu, sekitar 19 miliar dollar Amerika adalah utang kepada IMF. Rusia pada masa itu telah masuk ke dalam masa yang lebih buruk daripada Depresi Besar (*Great Depression*) yang pernah terjadi di Amerika Serikat pada masa 1929-1938. Kemerosotan ekonomi Rusia hingga 40 persen, jauh lebih besar daripada kemerosotan yang terjadi selama depresi besar (*malaise*) pada tahun 1929 di Amerika, dengan kemerosotan ekonomi sekitar 25 persen selama lima tahun.<sup>18</sup>

Ketika Yeltsin menunjuk Putin untuk menggantikan posisinya sebagai Presiden Rusia, Putin menggunakan kebijakan awal pemerintahan Yeltsin sebagai bagian dari strategi geopolitiknya. Putin melihat bahwa kondisi Rusia pasca sepuluh tahun kejatuhan rezim komunisme Uni Soviet, belum ada perkembangan yang signifikan. Putin mewarisi permasalahan krisis ekonomi pada masa Yeltsin. Putin memerintah Rusia selama dua periode. Dalam periode pertama kekuasaan Putin, Rusia di bawah Putin menggunakan kebijakan politik pragmatis dengan tujuan meningkatkan kestabilan baik ekonomi maupun militer. Putin tidak segan mengatakan bahwa mungkin saja pada suatu hari nanti Rusia dapat bergabung di dalam keanggotaan NATO.<sup>19</sup> Putin sadar bahwa pernyataannya tersebut sangat di dasari oleh kondisi dalam negeri Rusia sendiri. Namun, Pernyataan Presiden Rusia tersebut ditanggapi secara hati-hati oleh NATO, permasalahannya adalah Putin yang merupakan salah satu mantan petinggi KGB (*Комитет Государство Безопасности*) tidak akan mungkin dengan gegabah menyatakan bahwa dirinya akan membawa Rusia untuk bergabung ke dalam aliansi NATO. Selain kondisi

---

<sup>18</sup> Saragih, Simon, *Bangkitnya Rusia: Peran Putin dan Eks KGB*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2008), hal. 2-14.

<sup>19</sup> Wawancara yang dilakukan oleh wartawan BBC, David Frost, dengan Vladimir Putin's pada 13 Maret 2000. Diakses dari [http://www.gazeta.ru/2001/02/28/putin\\_i\\_bbc.shtml](http://www.gazeta.ru/2001/02/28/putin_i_bbc.shtml) pada 17 Mei 2011 pukul 19.30 WIB.

perekonomian dalam negeri Rusia yang belum stabil, pernyataan Putin tersebut juga didasari atas dasar menurunnya kualitas militer Rusia. Rusia memerlukan partner yang tepat untuk melakukan kerjasama di dalam bidang militer dan Putin menilai bahwa Barat merupakan aliansi yang tepat untuk di ajak bekerjasama.

Pada periode awal ini, Putin juga menunjukkan sikap pro-Barat. Paska serangan teroris 11 September yang menghancurkan gedung WTC (*World Trade Center*) di Amerika, pemerintah Amerika Serikat menyatakan dengan tegas menyatakan perang terhadap terorisme internasional. Selain itu Amerika juga menjadikan kebijakan perang terhadap terorisme internasional merupakan bagian dari kebijakan luar negerinya. Untuk mendukung hal tersebut, Putin menyatakan siap mendukung Amerika dan sekutunya dalam melakukan serangan ke wilayah pusat kelompok teroris Al-Qaeda di Afghanistan. Langkah yang dilakukan Putin tersebut merupakan langkah positif agar pihak Barat beranggapan bahwa serangan yang dilakukan Putin terhadap kelompok separatis Chechnya juga merupakan bagian dari *war on terror*. Namun hal ini menjadi permasalahan besar terutama pada kebijakan Putin luar negeri Putin di Georgia.

Pada masa pemerintahan kedua Putin, Rusia telah mampu keluar dari permasalahan ekonomi dan militer. Hal ini menjadi sinyal negatif bagi Gedung Putih, karena Rusia kini menjadi sebuah ancaman baru di kawasan Eropa Timur. Untuk itu NATO perlu melakukan perluasan wilayah terutama di kawasan Eropa Timur dan Kaukasus. Ukraina dan Georgia menjadi target sasaran baru NATO dalam memperluas wilayah pengaruhnya. Perluasan pengaruh aliansi di wilayah Kaukasus tersebut membuat geram Rusia, karena NATO secara langsung mempersempit ruang gerak Rusia. Untuk itu Rusia mengeluarkan sinyalemen negatif atas dasar perluasan tersebut baik kepada NATO maupun kepada negara-negara yang berkeinginan untuk bergabung dengan NATO.

Namun sinyal negatif tersebut tidak ditanggapi dengan serius oleh NATO. Akhirnya pada bulan April 2008, NATO membahas mengenai kemungkinan masuknya Ukraina dan Georgia ke dalam bagian aliansi NATO.<sup>20</sup> NATO melihat bahwa telah terjadi peningkatan kemampuan militer dari segi Georgia.

---

<sup>20</sup> *Ibid.* Smith.

Peningkatan kualitas militer Georgia merupakan sebuah tuntutan yang diberikan kepada Georgia oleh NATO. Georgia meningkatkan anggaran militer sebanyak lebih dari 200 persen dalam kurun waktu 2006-2007.<sup>21</sup> Tuntutan yang diberikan oleh NATO kepada Georgia tersebut ditujukan agar Georgia memiliki kekuatan minimal yang memenuhi standar kriteria yang ditetapkan oleh NATO. Sikap NATO terhadap Georgia tersebut berdampak pada hubungannya dengan Rusia, sehingga membuat terjadinya eskalasi politik secara tidak langsung antara Rusia dan NATO melalui Georgia.

## 3.2 Pakta Warsawa

### 3.2.1 Sejarah Pembentukan Pakta Warsawa

Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, Uni Soviet dan Amerika Serikat muncul sebagai pemenang dalam perang tersebut. Meskipun selama Perang Duniatersebut hubungan bilateral mereka cukup baik, akan tetapi hubungan tersebut tidak dapat berjalan lancar. Masing-masing negara memiliki alasan berbeda untuk saling tidak menghargai satu sama lain. Permasalahan utama yang dihadapi adalah perbedaan ideologi yang mereka yakini, yaitu Amerika menganut paham liberalisme sedangkan Uni Soviet menganut paham sosialis-komunisme yang secara nyata saling bertolak belakang.

Uni Soviet dan Amerika Serikat yang merupakan dua kekuatan dunia terbesar, memiliki pemikiran yang sama yaitu bahwa mereka harus menjadi negara *super power*. Untuk itu diperlukan kerjasama yang kuat dengan negara lain agar dapat mewujudkan hal tersebut. Amerika dan Uni Soviet menerapkan strategi diplomasinya agar dapat menarik negara-negara Eropa untuk membentuk aliansi pertahanan. Pada akhirnya Amerika Serikat berhasil membentuk NATO pada tahun 1949, sedangkan Uni Soviet membentuk Pakta Warsawa pada tahun 1995.

Pakta Warsawa atau dalam bahasa Rusia disebut *Варшавский Договор/ Warsavski' Dogovor/* adalah sebuah perjanjian persahabatan, kerjasama politik

---

<sup>21</sup> *Ibid.* Palladin Ansharullah, hal. 3.

dan militer yang ditandatangani negara-negara: Albania, Bulgaria, Cekoslovakia, Rumania, Jerman Timur, Hungaria, Polandia dan Uni Soviet pada tahun 1955. Sejak awal pembentukannya, Pakta Warsawa merupakan sebuah aliansi yang dibentuk Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur untuk mengimbangi kekuatan NATO yang telah dibentuk sebelumnya pada tahun 1949. Setiap negara-negara yang tergabung di dalam Pakta Warsawa berkewajiban memberikan bantuan militer sebagai bentuk keamanan kolektif kepada sekutu mereka jika terjadi serangan dari pihak lain sesuai dengan Artikel No. 51 Piagam PBB, yang termanifestasikan ke dalam Artikel No. 4 Pakta Warsawa yang menyatakan bahwa

*“Статья 4. В случае вооруженного нападения в Европе на одно или несколько государств - участников Договора со стороны какого-либо государства или группы государств, каждое государство - участник Договора в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, окажет государству или государствам, подвергшимся такому нападению, немедленную помощь, индивидуально и по соглашению с другими государствами - участниками Договора, всеми средствами, какие представляются ему необходимыми, включая применение вооруженной силы. Государства - участники Договора будут немедленно консультироваться относительно совместных мер, которые необходимо предпринять в целях восстановления и поддержания международного мира и безопасности.*

*О мерах, предпринятых на основании настоящей статьи, будет сообщено Совету Безопасности в соответствии с положениями Устава Организации Объединенных Наций. Эти меры будут прекращены, как только Совет Безопасности примет меры, необходимые для восстановления и поддержания международного мира и безопасности.*

*Dalam permasalahan serangan bersenjata yang terjadi di Eropa terhadap satu atau beberapa negara yang telah menandatangani perjanjian yang dilakukan oleh negara atau sekelompok negara, setiap negara yang merupakan bagian dalam perjanjian ini, dalam melaksanakan hak pertahanan baik itu secara individu maupun kolektif harus sesuai dengan Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dimana membuat suatu negara atau sekelompok negara yang mendapat serangan harus segera memperoleh bantuan, baik secara individu dan atau dengan negara-negara yang tergabung di dalam bagian perjanjian ini, dengan segala cara yang dianggap perlu dilakukan, termasuk di dalamnya menggunakan*

*kekuatan pasukan bersenjata. Negara yang terkait di dalam perjanjian ini harus segera berkonsultasi untuk mengambil langkah-langkah bersama yang akan diambil untuk memulihkan dan menjaga perdamaian dan keamanan internasional.*

*Sehubungan dengan langkah-langkah yang diambil berdasarkan keputusan pada pasal ini akan dilaporkan kepada Dewan Keamanan sesuai dengan ketentuanyang tercantum di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Langkah-langkah ini akan segera berakhir setelah Dewan Keamanan mengambil tindakan nyata yang diperlukan untuk memulihkan dan memelihara perdamaian dan keamanan internasional.”<sup>22</sup>*

Berdasarkan isi perjanjian tersebut, maka jika ada salah satu negara sedang mengalami krisis, maka negara lain yang tergabung ke dalam Pakta Warsawa memiliki kewajiban untuk membantu negara yang sedang dilanda krisis tersebut. Kondisi keamanan Eropa yang sedang tidak stabil membuat permasalahan timur dan barat semakin muncul ke permukaan. Dua kekuatan besar yang telah ikut ambil bagian dalam Perang Dunia Kedua sebelumnya telah memunculkan ‘perang baru’. Meskipun hanya sebatas pada perang urat syaraf, akan tetapi Perang Dingin<sup>23</sup> yang terjadi diantara dua kekuatan besar tersebut mengakibatkan banyak konflik bagi negara lain. Misalnya perang antara Korea Utara dan Korea Selatan yang hingga saat ini diantara kedua wilayah tersebut selalu terjadi eskalasi konflik meskipun Perang Dingin telah lama berakhir. Di samping terjadinya ancaman dari luar, ancaman dari dalam pun mewarnai keberadaan pakta ini. Banyaknya penolakan dari masyarakat yang menolak sistem komunisme membuat masing-masing negara anggota harus serius dalam menanggapi setiap ancaman terhadap “Bangunan Sosialis” di negara masing-masing.<sup>24</sup>

Menurut Glen E. Curtis, pembentukan Pakta Warsawa penuh dengan propaganda. Pembentukan Pakta Warsawa merupakan salah satu bentuk bagian dari penerapan kebijakan keamanan Uni Soviet, yang dimanfaatkan sebaik-

<sup>22</sup> *Варшавского Договора пакт*, diakses dari <http://history-of-wars.ru/varsh.html> pada 13 Mei 2011 pukul 12.43 WIB.

<sup>23</sup> Perang Dingin atau dalam bahasa Rusia disebut *Холодная Война/Kholadnaya Waina* merupakan sebuah perang antara dua kekuatan besar, Uni Soviet dan Amerika Serikat yang melibatkan NATO dan Pakta Warsawa. Dalam perang ini, konflik yang terjadi lebih ke arah konflik politik, peningkatan tensi militer dan perang ekonomi. Perang ini terjadi sejak tahun 1947 hingga 1991.

<sup>24</sup> *Ibid.* A. Fahrudodji, hal. 168.



baiknya oleh Uni Soviet dengan tujuan membendung kekuatan asing yang akan masuk ke dalam wilayahnya. Uni Soviet memanfaatkan isu masuknya Jerman Barat ke dalam keanggotaan NATO sebagai bahan propaganda pembentukan pakta tersebut. Dengan masuknya Jerman Barat ke dalam keanggotaan NATO, maka dikhawatirkan akan muncul sebuah ancaman ‘*revanchist*’<sup>25</sup>, yaitu kembalinya tentara Jerman Barat setelah kekalahannya dalam Perang Dunia Kedua dan membalaskan dendamnya kepada negara-negara Eropa Timur.<sup>26</sup> Uni Soviet memanfaatkan ketakutan negara-negara Eropa Timur akan hal tersebut dengan mengajak bergabung ke dalam Pakta Warsawa.

Selain itu, Uni Soviet juga memiliki alasan yang kuat dalam membentuk Pakta Warsawa. Sebagai sebuah organisasi resmi, Pakta Warsawa dibentuk oleh Uni Soviet sebagai sebuah organisasi resmi yang bertujuan untuk mengimbangi NATO dalam menerapkan diplomasi Timur-Barat. Pakta Warsawa memberikan status Uni Soviet sama seperti Amerika sebagai pemimpin aliansi bangsa-bangsa merdeka yang mendukung setiap inisiatif kebijakan luar negerinya.<sup>27</sup> Oleh karena itu, dengan pembentukan Pakta Warsawa maka semakin mempertegas posisi Uni Soviet sebagai salah satu negara *super power*.

Jika dilihat dari segi hubungan multilateral, pembentukan Pakta Warsawa merupakan suatu peningkatan hubungan bilateral dalam usaha meningkatkan mekanisme pertahanan Uni Soviet dan sebagai bagian dari usaha menerapkan strategi kebijakan luar negeri kepada sekutu terdekatnya di kawasan Eropa Timur. Di samping itu, Pakta Warsawa juga membantu dalam dalam melegitimasi kehadiran tentara Uni Soviet dan memberikan pengaruh yang luar biasa di wilayah Eropa Timur.<sup>28</sup> Hal ini semakin dipertegas dengan pembentukan aliansi militer gabungan yang dipimpin oleh Wakil Menteri Pertahanan dari masing-masing negara sebagai Wakil Komandan dalam aliansi militer gabungan tersebut. Bahkan beberapa negara telah melegalkan masuknya pasukan Uni Soviet ke

---

<sup>25</sup> *Revanchist* merupakan kata dari bahasa Jerman yang berarti perebutan kembali wilayah yang telah diambil oleh pihak lawan sebelumnya.

<sup>26</sup> Curtis, Glen E., *Cekoslovakia: A Country Study*, (Washington, DC: Federal Research Division dari Library of Congress, 1992) diakses dari [http://www.shsu.edu/~his\\_ncp/WarPact.html](http://www.shsu.edu/~his_ncp/WarPact.html) pada 11 Mei 2011 pukul 01.15 WIB.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

wilayah mereka sebelum dirumuskannya perjanjian ini, yaitu Rumania, Jerman Timur, Hungaria, dan Polandia. Hal ini dikarenakan adanya Perjanjian Postdam<sup>29</sup> yang ditandatangani oleh sekutu pada tahun 1945.<sup>30</sup> Selain itu, pembentukan Pakta Warsawa juga didasari pada kesamaan, saling *noninterference* dalam urusan internal, serta saling menghormati kedaulatan dan kemerdekaan masing-masing negara.

### 3.2.2 Keruntuhan Pakta Warsawa

Meskipun tujuan awal pembentukan Pakta Warsawa oleh Uni Soviet adalah sebagai alat untuk mengimbangi kekuatan NATO di kawasan Eropa Barat, namun kenyataannya pembentukan pakta tersebut hanya bertujuan sebagai salah satu cara untuk melegalkan eksistensi Uni Soviet di kawasan Eropa Timur. Proses degradasi hubungan Pakta Warsawa di kawasan Eropa Timur terjadi sejak masa tahun 1956 ketika Krushev mencanangkan program de-Stalinisasi. Pada saat Presiden Uni Soviet, Nikita Krushev (*Hukuma Xpyyëe*)<sup>31</sup> menjabat, eksistensi Pakta Warsawa mulai dipertanyakan. Program de-Stalinisasi memiliki tujuan yaitu memberantas sistem komando administrasi-birokrasi yang menjadi tumpuan pada masa Stalin, yakni dengan melancarkan kebijakan penghentian praktek pengkultusan figur Stalin dan melakukan reorganisasi dan perombakan besar-besaran di tubuh Departemen Dalam Negeri dan organ-organ keamanan, serta berbagai rehabilitasi terhadap korban-korban represi Stalin.<sup>32</sup> Namun sayangnya, proyek tersebut membawa perubahan terhadap sistem keamanan Uni Soviet. Curtis menyatakan bahwa de-Stalinisasi ala Krushev membawa perubahan

<sup>29</sup> “Perjanjian Postdam 1945 merupakan hasil dari Konferensi Postdam (17 Juli - 2 Agustus 1945) yang menjadi salah satu upaya untuk merekonstruksi kekuatan Nazi Jerman selama masa Perang Duniakedua setelah kekalahan Jerman. Dalam perjanjian tersebut disetujui untuk mengadopsi hasil Konferensi Berlin. Perjanjian Postdam ini ditandatangani oleh pimpinan negara-negara sekutu.” Lihat *Agreements of the Berlin (Potsdam) Conference, July 17-August 2, 1945*. Diakses dari [http://www.pbs.org/wgbh/amex/truman/psources/ps\\_potsdam.html](http://www.pbs.org/wgbh/amex/truman/psources/ps_potsdam.html) pada 11 Mei 2011 pukul 08.35 WIB.

<sup>30</sup> Rottman, Gordon L. dan Volstad, Ronald., *Warsaw Pact Ground Forces*, (Inggris: Osprey Publishing, 1987), Hal. 3.

<sup>31</sup> Nikita Krushev merupakan Presiden Uni Soviet ketiga.

<sup>32</sup> *Ibid.* Fahrurudji. Hal. 151.

signifikan dalam peran Pakta Warsawa sebagai unsur keamanan Uni Soviet.<sup>33</sup> Salah satu peran Pakta Warsawa adalah sebagai penjaga Bangunan Sosialisme di negara-negara yang tergabung di dalamnya. Akibat dari program tersebut adalah terjadinya Revolusi Hungaria dan Kerusuhan Oktober di Polandia.

Kerusuhan Oktober Polandia terjadi pada tahun 1956. Kerusuhan ini terjadi akibat adanya intervensi yang dilakukan oleh Uni Soviet ke dalam urusan dalam negeri Polandia. Pihak Partai Serikat Pekerja Polandia menyatakan bahwa kerusuhan seharusnya tidak terjadi apabila tidak ada monopoli kekuasaan politik dan pihak Uni Soviet tidak memaksakan diri untuk memaksa Polandia agar mematuhi kebijakan keamanan serta kebijakan luar negeri Uni Soviet.<sup>34</sup> Kekuasaan Uni Soviet di wilayah Polandia memang sangat cukup besar. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Wlodzimierz Bruz yang menyatakan bahwa

*“the heart of the Polish October, and the image it deservedly acquired within and outside Poland, was that of a movement for socialist renewal: its overriding ideas were the elimination of political totalitarianism based upon mass terror and corrupting privileges; dissociation from foreign domination; the end of compulsory collectivisation; and the rejection of bureaucratic centralism.”*<sup>35</sup>

Pada saat itu Pimpinan Partai Komunis Polandia, Wladyslaw Gomulka bersama dengan pimpinan Komandan Angkatan Darat menolak untuk menghentikan aksi demonstrasi yang berlangsung sebagai bentuk perlawanan terhadap pengaruh Uni Soviet di wilayahnya.

Berbeda dengan Polandia, Revolusi Hungaria terjadi sebagai akibat adanya demonstrasi yang dilakukan oleh kaum buruh dan juga mahasiswa yang turun ke jalan pada akhir Oktober 1956. Dalam orasinya, mereka menuntut agar pemerintah Hungaria segera membebaskan diri dari belenggu komunisme. Sejak kematian Stalin, para kaum buruh berharap bahwa hal tersebut akan menjadi akhir

<sup>33</sup> *Ibid.* Curtis.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Bruz, Wlodzimierz., *The Polish October: Twenty Years After*, diakses dari <http://socialistregister.com/index.php/srv/article/view/5413/2312> pada 11 Mei 2011 pukul 07.43 WIB.

dari era kediktatoran terhadap kaum proletar.<sup>36</sup> Akan tetapi sepertinya keinginan mereka sirna karena Hungaria masuk ke dalam aliansi Pakta Warsawa. Dengan adanya dukungan dari masyarakat, Perdana Menteri Hungaria, Imre Nagy, akhirnya melaksanakan pemilihan umum dengan sistem multi partai. Hal ini membuat pihak Uni Soviet marah. Setidaknya sebanyak 200.000 pasukan Uni Soviet datang menyerbu Hungaria dan menewaskan sedikitnya 25.000 rakyat Hungaria tewas dalam pertempuran selama lima hari.<sup>37</sup> Akibat dari demonstrasi tersebut, pada bulan Mei 1957 terjadi peningkatan pasukan Uni Soviet di Hungaria, setelah pasukan Hungaria dinilai tidak dapat mengendalikan situasi di wilayahnya. Selain itu pihak militer Hungaria juga dipaksa untuk menandatangani sebuah perjanjian dimana pihak Hungaria menyetujui untuk menerima kehadiran pasukan Uni Soviet di wilayahnya. Pasukan Uni Soviet yang berada di wilayah Hungaria tersebut secara resmi menjadi Pasukan Wilayah Selatan (*Southern Group of Forces*)

Selain dua kerusuhan di atas, berbagai macam kerusuhan terjadi yang mewarnai serangkaian perjalanan kehancuran Pakta Warsawa. Diantaranya adalah Revolusi Cekoslovakia (*Velvet Revolution/Sametová Revoluce*) pada tahun 1989 dan kerusuhan di Rumania. Kedua wilayah tersebut belajar bahwasannya melepaskan diri dari kontrol Uni Soviet merupakan cara realistis satu-satunya untuk keluar dari belenggu komunisme. Uni Soviet dengan mengatasnamakan Pakta Warsawa selalu berusaha untuk menekan setiap kebijakan pemerintah dan militer negara-negara di kawasan Eropa Timur dengan tujuan untuk melancarkan setiap kebijakan luar negeri Uni Soviet di atas wilayah tersebut. Uni Soviet sendiri sangat membutuhkan wilayah Eropa Timur untuk menghadang masuknya pasukan NATO yang hendak menyerang Uni Soviet. Sementara itu, selain di wilayah Eropa Timur, juga terdapat krisis di wilayah *intern* Uni Soviet sendiri yang diakibatkan oleh konflik antar etnis. Diantaranya di wilayah *buffer zone* Uni Soviet yaitu wilayah Kaukasus. Konflik antar etnis yang semakin meningkat pada akhir masa kejayaan Uni Soviet merupakan akibat kebijakan politik Glasnost dan

---

<sup>36</sup>Ray, Rob. dan John S., 1956: *The Hungarian Revolution*, diakses dari <http://libcom.org/history/1956-the-hungarian-revolution> pada 12 Mei 2011 pukul 23.30 WIB.

<sup>37</sup>*Ibid.* Curtis.

Perestroika yang dicanangkan oleh Gorbachev. Keruntuhan Uni Soviet pada tahun 1991 juga merupakan tanda kehancuran hegemoni Pakta Warsawa di kawasan Eropa Timur dan Kaukasus. Meskipun begitu, pengaruh Rusia pada masa selanjutnya tidak berhenti sampai disitu. Pakta Warsawa yang ada dihadapan kita saat ini telah bertransformasi ke dalam tubuh CIS.



## **BAB 4**

### **IMPLEMENTASI GEOLPOLITIK RUSIA DALAM PERANG RUSIA-GEORGIA TAHUN 2008**

Pada bab sebelumnya telah dipaparkan mengenai sejarah hubungan Pakta Warsawa yang dimotori oleh Uni Soviet dan NATO yang dimotori oleh Amerika. Seperti telah dijelaskan bahwa hubungan diantara keduanya terjadi secara fluktuatif selama masa Perang Dingin. Paska kemenangan NATO dalam Perang Dingin tahun 1991 yang menyebabkan Uni Soviet runtuh, NATO keluar sebagai satu-satunya aliansi super power. Kemenangan yang diperoleh NATO menyebabkan aliansi ini dapat melakukan perluasan pengaruh terutama ke negara-negara eks-Uni Soviet secara leluasa tanpa perlu takut akan adanya ancaman yang datang dari Rusia. Salah satu wilayah yang menjadi target perluasan pengaruh NATO adalah wilayah Kaukasus. Perluasan NATO di kawasan Kaukasus merupakan ancaman serius yang harus diperhatikan oleh Rusia. Untuk itu dalam bab ini penulis akan membagi ke dalam tiga sub bab utama, yaitu diawali dengan konsep geopolitik yang diadopsi oleh pemerintah Rusia pada sub bab satu.

Sub bab kedua akan menjelaskan mengenai konsep keamanan Rusia yang dijalankan sejak masa pemerintahan Yeltsin sampai Putin. Konsep keamanan Medvedev tidak dibahas, karena ketika perang antara Rusia dan Georgia pada tahun 2008 terjadi, Rusia masih mengadopsi konsep keamanan Putin. Konsep keamanan tersebut nantinya akan dihubungkan dengan strategi geopolitik Rusia. Pada sub bab ketiga akan dibahas mengenai perang Rusia dan Georgia dilihat dari kondisi hubungan Rusia dan Georgia selama kurun waktu lima tahun terakhir sejak terjadinya pemilihan presiden Georgia tahun 2003 dan disertai dengan analisa kebijakan geopolitik Rusia dan implementasinya dalam perang tersebut.

#### 4.1 Konsep Geopolitik Rusia

Geopolitik berasal dari kata “Geo” dan “Politik”.<sup>1</sup> Geo berarti bumi sedangkan politik berhubungan dengan segala sesuatu yang menyangkut mengenai pemerintahan atau kekuasaan. Geopolitik digunakan oleh setiap negara untuk menentukan kebijakan keamanan wilayahnya. Hal ini tidak dapat terlepas dari permasalahan menjaga kepentingan suatu negara terhadap negara lain, tidak terkecuali Rusia.

Negara Federasi Rusia merupakan sebuah negara besar yang terletak di wilayah paling utara dunia sekaligus berbatasan langsung dengan Kutub Utara. Rusia memiliki luas wilayah 1.8 kali lipat lebih luas dari pada luas wilayah Amerika Serikat yaitu sekitar 17.075.200 km<sup>2</sup>.<sup>2</sup> Hal ini menyebabkan Rusia perlu menerapkan strategi geopolitik yang tepat agar mampu menjaga keutuhan wilayahnya dari segala macam ancaman yang datang dari luar. Kerjasama antar negara yang menjadi fokus geopolitik Collin seperti telah disebutkan pada bab pertama, merupakan implementasi geopolitik Rusia dalam rangka menjaga kepentingan negara dan keamanan wilayahnya. Implementasi tersebut dapat dilihat dari peningkatan kerjasama antara Rusia dengan negara-negara di kawasan Kaukasus dan Eropa Timur (Eks-Uni Soviet dan Eks-Pakta Warsawa) sebagai usaha untuk memperkuat posisi Rusia di dalam kawasan tersebut pasca kekalahannya dalam Perang Dingin.

Selain menggunakan konsep geopolitik Collin, Rusia juga mengembangkan beberapa konsep geopolitik lain yang menjadi dasar penentuan pengambilan kebijakan keamanannya. Rusia menggunakan konsep geopolitik Sir. Halford McKinder (1861-1974) yang mengungkapkan mengenai konsep geostrategi kontinental yang menyatakan bahwa bola dunia merupakan suatu kesatuan yang bulat, kesatuan ruang yang sembilanperduabelas bagian adalah pulau-pulau.<sup>3</sup> Konsep geopolitik McKinder merupakan penyempurnaan dari konsep geopolitik yang dikemukakan sebelumnya oleh Ratzel dan Rudolf Kjellen

<sup>1</sup> Ermaya Suradinata, *Hukum Dasar Geopolitik dan Geostrategi dalam Kerangka Keutuhan NKRI..* (Jakarta: Suara Bebas, 2005). Hal 12-14.

<sup>2</sup> *Background Note: Russia*. Diakses dari <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3183.htm> pada 21 Mei 2011 pukul 19.09 WIB.

<sup>3</sup> *Ibid.* Ermaya Suradinata, *Geopolitik dan Konsepsi Ketahanan Nasional,...* hal. 63.

tentang konsep “Eropa Tengah” (*Mitteleuropa*)<sup>4</sup> sebagai basis untuk menguasai Eropa yang dalam hal ini diperankan oleh Jerman. Dalam konsep geopolitik McKinder, McKinder membagi dunia ke dalam dua konsep besar yaitu ‘Wilayah Jantung (*Heart Land*)’ dan ‘Pulau Dunia (*World Island*)’. Di samping itu McKinder juga membagi konsep kekuatan daratan dan lautan ke dalam tiga wilayah utama yaitu wilayah jantung, bulan sabit dalam dan bulan sabit luar.<sup>5</sup> Wilayah kekuatan pertama, wilayah jantung (*Heart Land*) meliputi Uni Soviet, Cina sebelah barat, sebagian Mongolia dan Negara-negara Timur Tengah. Wilayah ini menyimpan potensi sumber daya alam berupa keanekaragaman mineral yang tidak dapat ditandingi jumlahnya oleh negara-negara dari sisi belahan dunia lain. Dilihat dari segi kualitas dan kuantitas sumber daya mineral yang terkandung di wilayah ini, dapat dikatakan bahwa di wilayah ini terkandung jumlah mineral yang sangat besar dengan kualitas yang terbaik. Di samping itu kawasan *Heart Land* ini merupakan sentral kekuatan terbaik dalam penerapan fungsi pertahanan suatu negara karena memiliki wilayah yang luas.

Wilayah yang luas dengan karakteristik kontur wilayah yang unik merupakan sebuah benteng pertahanan alami terbaik. Jika ditinjau lebih lanjut, maka posisi strategis wilayah ini dapat dijabarkan sebagai berikut, pertama, bagian Utara kawasan ini merupakan wilayah yang selalu tertutup oleh lapisan es tebal. Kondisi ini sangat menguntungkan karena menghambat laju pergerakan kapal-kapal musuh yang akan mendekati wilayah ini. Kedua, wilayah pantai tidak dapat menaklukkan wilayah jantung ini, karena dalam penyerbuan ke pusat wilayah ini tidak dapat menggunakan meriam-meriam besar yang berasal dari kapal induk yang tehadap oleh lapisan es. Ketiga, kekuasaan yang dapat

---

<sup>4</sup> Konsepsi Eropa Tengah (*Mitteleuropa*) dicetuskan oleh Kjellen, seorang berkebangsaan Swedia yang sangat percaya akan kekuatan Jerman. Kjellen merupakan orang pertama yang menggunakan istilah geopolitik. Ide Kjellen kemudian dikembangkan oleh Friederich Naumann yang dalam bukunya “*Mitteleuropa*” (1915), Naumann mengkonstatir bahwa untuk menghadapi kekuatan-kekuatan geopolitis yang terus meningkat dari negara-negara seperti Inggris, AS dan Rusia, masyarakat Eropa Tengah harus membentuk kesatuan geopolitis baru yang mengintegrasikan faktor-faktor politik dan ekonomi dengan Jerman sebagai porosnya. *Op Cit*, Fahrurodji, *Konflik Ossetia Selatan dan Strategi Keamanan Rusia di Kawasan Kaukasus*, dalam Jurnal *Glasnost* Volume 4 No. 2 Oktober 2008-Maret 2009 (Depok:Program Studi Rusia FIB UI, 2008), hal. 14. Mengacu pada A. Dugin, *Osnovy Geopolitiki: Geopoliticheskoe budushyee Rosii*. (Moskwa: Arktogea, 1997), hal. 39-41.

<sup>5</sup> *Ibid.* Ermaya



menjatuhkan wilayah jantung dengan wilayah pantai akan dapat membahayakan dunia. Dan keempat, wilayah selatan merupakan wilayah pegunungan sehingga sulit untuk ditembus oleh angkatan darat musuh. Wilayah ini juga sangat cocok diaplikasikan sebagai tempat untuk membangun sistem pertahanan anti-rudal.

Wilayah kekuatan kedua adalah wilayah Bulan Sabit Dalam (*Inner Marginal Crescent*). Wilayah ini membentang dari Eropa Utara, Eropa Barat dan Eropa Selatan, Asia Selatan dan Asia Tenggara, dan Cina (Kepulauan Inggris, Jepang dan Indonesia terletak di luar wilayah tersebut). Wilayah kekuatan ketiga adalah wilayah Bulan Sabit Luar (*Lands of Outer or Insular Crescent*). Wilayah ini meliputi Kanada, Amerika Serikat, Amerika Tengah dan Amerika Selatan, Afrika Selatan, Australia dan Oceania (wilayah Afrika Utara tidak termasuk karena merupakan wilayah padang pasir). McKinder mengatakan bahwa:

*“Barang siapa menguasai Eropa Timur akan dapat menguasai wilayah jantung; Barang siapa yang menguasai wilayah jantung akan dapat menguasai pulau dunia, dan selanjutnya akan dapat menguasai dunia seluruhnya”<sup>6</sup>*

Jika dilihat secara jelas seperti pada penjelasan sebelumnya, wilayah Rusia menurut kajian geopolitik McKinder terletak di bagian jantung dunia. Rusia memiliki posisi strategis untuk menguasai dunia. Tidak hanya karena wilayah yang luas, akan tetapi juga karena sumber daya alam yang melimpah. Ketika terjadi Revolusi 1917 di Rusia, muncul sebuah ancaman baru yang mampu mengganggu keseimbangan kekuatan dunia. Pesatnya penyebaran pengaruh ideologi komunis di negara-negara lain menjadikan ideologi ini sebagai sebuah ancaman yang patut untuk diperhitungkan.

Selain konsep wilayah yang dikemukakan oleh McKinder, Rusia juga mengembangkan konsep geopolitik yang dikemukakan oleh Aleksander Gelyevich Dugin. Menurut Dugin, geopolitik membagi dunia ke dalam dua kekuatan dikotomis yaitu kekuatan “Tellurokatiya” (Kekuatan Daratan) dan “Talasokratiya” (Kekuatan Air). Kedua kekuatan tersebut saling bertolak belakang. Kekuatan Daratan berasal dari peradaban Romawi dan Sparta yang bersifat militeris dan otoriter, sedangkan Kekuatan Air berasal dari peradaban

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

perdagangan (*torgoovaya tsivilizatsiya*) Carthage dan Athena. Kekuatan Daratan bersifat konservatif yang tunduk pada norma-norma dan aturan hukum yang berlaku. Di dalam Kekuatan Daratan lebih berlaku nilai-nilai kebersamaan (kolektivitas) daripada nilai-nilai individualisme. Sedangkan Kekuatan Air memiliki sifat “cair” dan dinamis. Hal ini bertolak belakang dengan sifat Kekuatan Daratan yang cenderung kaku. Kekuatan Air menjadikan hal-hal yang berbaur normatif atau hukum menjadi relatif.<sup>7</sup>

Paska kejatuhan Uni Soviet, NATO mulai melancarkan ‘serangan’ yang semakin mempersempit ruang lingkup Rusia. NATO melakukan pergerakan dengan memanfaatkan kondisi yang terjadi di wilayah negara-negara eks-Uni Soviet yang tergabung ke dalam aliansi CIS, terutama di kawasan Kaukasus. Krisis keamanan berkepanjangan yang ditandai dengan semakin banyaknya konflik antara pemerintah dengan warganya akibat permasalahan etnis dan etnopolitik membayangi perkembangan negara di kawasan tersebut. Salah satu konflik antar etnis yang mampu mengancam stabilitas keamanan Rusia adalah konflik antara Ossetia Selatan dengan Georgia. Untuk itu Rusia perlu mengambil sebuah langkah tegas untuk menjaga kestabilan keamanan Rusia di kawasan internalnya. Kebijakan awal pemerintahan Yeltsin yang menekankan pada pengembalian stabilitas keamanan internal Rusia merupakan hal yang tepat untuk dilakukan. Rusia sadar bahwa paska keruntuhan Uni Soviet, Rusia belum memiliki kekuatan yang cukup untuk memulai sebuah perang baru dengan Amerika, hal ini didasari karena pengaruh Rusia di dalam lingkup negara-negara eks-Uni Soviet melemah. Untuk itu Yeltsin memfokuskan konsep keamanan nasional (*National Security Concept /NSC*)<sup>8</sup> Rusia pada permasalahan dalam negeri yang berhubungan dengan masalah separatisme dan terorisme. Rusia perlu menyelesaikan permasalahan tersebut agar stabilitas keamanannya tetap terjaga. Selain itu di dalam Konsep Kebijakan Luar Negeri Rusia (*Foreign Policy*

<sup>7</sup> *Op Cit*, Fahrurroddi, *Konflik Ossetia Selatan dan Strategi Keamanan Rusia di Kawasan Kaukasus*, dalam Jurnal Glasnost Volume 4 No. 2 Oktober 2008-Maret 2009 (Depok:Program Studi Rusia FIB UI, 2008), hal. 14-15. Mengacu pada A. Dugin, *Osnovy Geopolitiki: Geopoliticheskoe budushyee Rosii*. (Moskwa: Arktogea, 1997), hal. 15-18.

<sup>8</sup> “NSC merupakan sebuah dokumen dasar yang dipakai oleh pemerintah Federasi Rusia dalam memformulasikan kebijakan keamanan dalam menjaga kepentingan nasional Rusia.” Lihat V.L. Manilov, *Voyennaya Bezopasnost Rossii*, (Moscow: Probel, 2000), hal. 232-233; hal. 39; hal. 310 dan hal. 165.

*Concept*) penguatan hubungan bilateral dengan negara-negara di sekitar wilayah Rusia juga menjadi fokus utama kebijakan pada masa itu selain menyelesaikan permasalahan yang menyangkut keamanan internal Rusia seperti dalam kasus Ossetia Selatan. Pembentukan CIS merupakan sebuah langkah penting dalam usaha untuk mengintegrasikan kembali Rusia dengan negara-negara di kawasan eks-Uni Soviet, meskipun dalam kenyataannya CIS tidak berjalan dengan baik.

Di dalam perkembangan keamanan Rusia, terutama di masa Putin berbagai macam ancaman siap menghantui keamanan Rusia. Konflik di sekitar perbatasan Rusia mencuat dan menjadi ancaman bagi stabilitas keamanan dalam negeri Rusia. Konflik Chechnya pada tahun 1994-1996 dan pada tahun 2000, serangan unilateral di wilayah Kosovo oleh NATO tahun 1999, serta isu-isu dalam negeri di negara-negara Kaukasus merupakan bentuk ancaman nyata bagi kedaulatan Rusia. Untuk itu Rusia perlu merevisi konsep kebijakan keamanannya dalam menanggapi ancaman yang datang. Ancaman terhadap keamanan Rusia pada masa kini sebagaimana tertuang dalam doktrin keamanan nasional diantaranya adalah sebagai berikut:

*“...возможность попыток военно-силового давления в условиях тех или иных международных кризисов; любые действия, как извне, так и изнутри, направленные на подрыв государственности и территориальной целостности федерации, а также на ослабление и подрыв её международных позиций...региональный сепаратизм, межнациональные трения и конфликты внутри страны и на ближнезарубежной периферии; возможность неконтролируемых дезинтеграционных процессов на всем постсоветском пространстве; неурегулированность статуса русскоязычного населения, проживающего на территории ряда новых независимых государств;...вооруженные конфликты разных калибров и интенсивности в непосредственной близости от российских границ; распространение оружия массового поражения и средств ее доставки; геополитическая и военно-политическая неопределенность как в масштабах мирового сообщества, так и по периферии ближнего зарубежья; нарушение целостности обороны и неопределенность режима государственной границы;...активизация деятельности на территории Российской Федерации иностранных спецслужб и используемых ими организаций*

*...Kemungkinan upaya tekanan kekuatan militer dalam situasi krisis internasional; semua kegiatan, baik dari dalam ataupun dari luar yang ditujukan untuk penggerogotan negara dan keutuhan wilayah Federasi serta usaha melemahkan dan merongrong posisi internasionalnya;...separatisme regional, perselisihan antarsuku bangsa*

*dan konflik dalam negeri dan di negara-negara dekat periferi; kemungkinan proses-proses disintegrasi tak terkendali di semua ruang wilayah bekas Uni Soviet; tidak teraturnya status penduduk berbahasa Rusia yang tinggal di beberapa negara-negara baru;... konflik bersenjata dalam berbagai kaliber dan intensitasnya yang terjadi di dekat perbatasan Rusia; persebaran senjata pemusnah masal termasuk sarana pensuplaiannya; ketidakjelasan geopolitik dan militer-politik baik dalam skala internasional maupun regional di negara-negara dekat sekitar; terganggunya keutuhan pertahanan dan ketidakteraturan penanganan perbatasan negara;... aktivasi kegiatan intelejen asing termasuk organisasi-organisasi yang dimanfaatkannya di wilayah teritorial Federasi Rusia.<sup>9</sup>*

Peningkatan kerjasama antara Rusia dan negara-negara CIS sangat diperlukan karena hal tersebut sebagai instrumen dalam mengintegrasikan ruang teritorial Eurasia sebagaimana dipahami dalam konsep geopolitik Rusia. Hal ini merupakan faktor penting tak hanya sebagai penjamin keamanan nasional Rusia, namun juga digunakan sebagai instrumen yang ingin ditunjukkan Rusia kepada khalayak internasional bahwa Rusia berperan aktif di forum regional dan internasional. Itulah salah satu bentuk strategi Rusia yang termaktub di dalam NSC dan Konsep Kebijakan Luar Negeri Rusia. Penjelasan mengenai NSC dan FPC akan dijelaskan pada sub bab selanjutnya pada bab analisa ini.

## **4.2 Kebijakan Keamanan Nasional Rusia**

Dalam membicarakan mengenai permasalahan keamanan Rusia, ada dua aspek penting yang perlu diperhatikan Rusia terutama dalam hal menjaga stabilitas keamanan wilayahnya. Pertama, hubungan pemerintah pusat dengan warganya. Warga negara Rusia tidak hanya terdiri dari orang-orang Rusia yang tinggal di dalam wilayah Rusia, melainkan juga orang-orang Rusia yang tinggal di luar wilayah Rusia. Besarnya jumlah penduduk Rusia yang tinggal di luar wilayah Rusia terutama di kawasan eks-Uni Soviet mengakibatkan Rusia harus meningkatkan hubungan kerjasama dengan pemerintah yang berwenang dimana orang-orang Rusia tersebut tinggal. Kedua, hubungan pemerintah Rusia dengan

---

<sup>9</sup> Ahmad Fahrurodji, *Konflik Ossetia Selatan dan Strategi Keamanan Rusia di Kawasan Kaukasus*, dalam Jurnal Glasnost Volume 4 No. 2 Oktober 2008-Maret 2009 (Depok:Program Studi Rusia FIB UI, 2008), hal. 18. Mengacu pada Gadijev, *Geopoliticheskie Gorizonty Rosii: Kontury Novogo Miroporyadka*. (Moskwa: Ekonomika, 2007), hal. 564-565.

pemerintah negara lain dalam kaitannya fokus terhadap kawasan regional CIS. Peningkatan hubungan bilateral Rusia dengan negara-negara di kawasan CIS merupakan faktor penting yang mampu menjaga kestabilan wilayah Rusia, karena secara tidak langsung setiap terjadi konflik internal di dalam negara-negara CIS akan mengganggu kestabilan Rusia. Untuk itu, peningkatan hubungan kerjasama perlu dilakukan.

Dalam menentukan setiap kebijakannya terutama yang berkaitan dengan implemetasi geopolitik Rusia terhadap negara-negara di kawasan CIS, Rusia selalu melihat konsep kebijakan keamanannya yang menyangkut kedua aspek di atas. Konsep kebijakan keamanan tersebut terbagi ke dalam dua konsep besar yaitu kebijakan luar negeri Rusia dan doktrin militer. Perbedaan yang mendasar antara konsep keamanan Rusia, kebijakan luar negeri dan doktrin militer yaitu adalah konsep keamanan nasional Rusia mengacu ke dalam hal menjaga kepentingan nasional Rusia dalam melawan berbagai macam ancaman baik yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Sedangkan kebijakan luar negeri Rusia berorientasi kepada menjaga hubungan baik dengan aktor internasional baik di tingkat negara maupun orang-orang yang aktif di dalam organisasi internasional.<sup>10</sup> Sementara itu, doktrin militer Rusia terdiri dari pandangan dan tindakan terhadap perang, konflik, krisis, dan tindakan pencegahan, pencegahan dan pemberantasan agresi militer, mempersiapkan kaderisasi kekuatan militer baru, populasi dan ekonomi dalam mengamankan keamanan negara yang vital.<sup>11</sup>

Paska keruntuhan Uni Soviet, Yeltsin keluar sebagai presiden pertama Federasi Rusia. Berbagai macam kendala dihadapi oleh Yeltsin dan salah satu yang terbesar adalah permasalahan di dalam kawasan regional CIS yang menyangkut permasalahan perang sipil di Georgia. Yeltsin perlu memfokuskan pada permasalahan tersebut, karena perang sipil tersebut memberikan dampak pengaruh yang besar terhadap stabilitas keamanan Rusia. Di bawah kekuasaan Yeltsin, Rusia sangat berperan aktif dalam menjaga sekaligus meningkatkan stabilitas keamanan di kawasan Ossetia Selatan. Rusia memprakarsai

<sup>10</sup> *Ibid.* Manilov, hal. 165 dan hal. 231-232.

<sup>11</sup> Zabolotin, V. D., *Slovar Voyennykh Terminov* (Moscow: OOO NITs Kosmo, 2000), hal. 161.

pembentukan JPKF yang merupakan bagian dari implementasi geopolitik Rusia untuk tetap menjaga kontrol Rusia atas wilayah Georgia setelah melihat bahwa ada indikasi yang mengarah kepada integrasi Georgia dengan NATO. Peran Rusia di dalam JPKF tersebut memberikan pengaruh yang besar nantinya dalam menentukan setiap kebijakan keamanan yang menyangkut permasalahan Georgia.

Dalam menentukan arah kebijakan keamanannya pada masa awal pemerintahan Yeltsin, Rusia dihadapkan dengan permasalahan yang pelik yang menyangkut arah penentuan kebijakan. Sebagai negara yang baru saja keluar dari 'perang', Rusia merasa bahwa belum memiliki kekuatan yang cukup untuk mengembalikan pamornya. Untuk itu diperlukan berbagai macam strategi yang dapat mengembalikan posisi tawar Rusia. Namun sayangnya para elit Rusia pada masa awal pemerintahan Yeltsin masih sibuk memperdebatkan mengenai permasalahan kebijakan apakah yang harus diadopsi oleh Rusia terlebih dahulu, apakah kebijakan keamanan yang mengarah kepada doktrin militer ataukah kebijakan luar negeri. Ketika dirumuskan doktrin militer pada bulan Mei 1992, belum ada kejelasan mengenai arah kebijakan keamanan Rusia, yaitu apakah arah kebijakan keamanan tersebut ditujukan kepada negara-negara anggota CIS atau secara khusus menjadi kebijakan keamanan nasional Rusia. Hal ini dapat dijelaskan karena sebelumnya pada bulan Februari 1992, konsep keamanan wilayah tersebut telah masuk ke dalam draft doktrin militer untuk CIS.<sup>12</sup> Sementara itu, di bulan Maret Yeltsin mengeluarkan dekrit untuk membentuk Dewan Keamanan Rusia<sup>13</sup> yang bertujuan untuk mengembangkan strategi keamanan Rusia sehubungan dengan adanya indikasi peningkatan ancaman konflik dengan Ukraina. Pada bulan Mei 1992, sebuah kebijakan keamanan independen dibuat oleh Rusia. Secara eksplisit Yeltsin meratifikasi surat

---

<sup>12</sup> *Op. Cit.* De Haas, Marcel. *The Development...*, merujuk pada A.F. Klimenko, 'O Role I Meste Voyennoy Doktriny v Sisteme Bezopasnosti Sodruzhestva Nezavisimyykh Gosudarstv', *Voyennaya Mysl*, 2, February 1992, Hal. 16.

<sup>13</sup> Dewan Keamanan Rusia dibentuk untuk menangani permasalahan internal dan eksternal Rusia dalam bidang masalah keamanan negara.

keputusan yang menyatakan bahwa Rusia akan memiliki Departemen Pertahanan dan angkatan bersenjata sendiri.<sup>14</sup>

Pada tahun 1992, Sekretaris Dewan Keamanan, Yuri Skokov, memulai tahap penyusunan NSC. Pada sidang pertama pada musim panas tahun 1992, Dewan Keamanan diberikan prioritas tinggi terhadap pencapaian NSC.<sup>15</sup> Namun, tidak sampai Juli 1994 Dewan Keamanan telah berhasil menyusun NSC tersebut.<sup>16</sup> Tujuan disusunnya NSC adalah untuk mengisi kekosongan politik yang merupakan hasil dari runtuhnya ideologi komunis. Suatu konsensus politik seharusnya dibentuk berdasarkan kepentingan nasional.<sup>17</sup> Dalam konstitusi tahun 1993, kebijakan keamanan nasional merupakan tanggung jawab Presiden. Parlemen tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyetujui dokumen kebijakan keamanan, seperti disebutkan di dalam konstitusi sebelumnya. Hal ini menyebabkan konsensus tidak diperlukan lagi. Hal ini berlangsung sampai pada bulan Desember 1997 sebelum presiden Rusia menandatangani draft NSC. Ada beberapa hal menjadi kendala dalam mengesahkan draft NSC pertama (1992-1997), selain permasalahan penentuan kebijakan apakah yang harus diambil, yaitu perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh organ-organ keamanan, diantaranya Dewan Keamanan dan Departemen Luar Negeri Rusia dalam menentukan konsep kebijakan luar negeri pertama pada tahun 1993. Periode 1992-1997 ditandai dengan ketidakstabilan, baik internal (contohnya dalam pertarungan antara presiden dan kekuasaan legislatif tahun 1993, konflik Chechnya pertama 1994-1996), maupun eksternal (contohnya dalam perang sipil di negara-negara tetangga CIS seperti Moldova, Georgia dan Tajikistan). Kekuasaan eksekutif Rusia (presiden dan pemerintah) terpaksa memberikan banyak perhatian terhadap insiden yang terjadi baik internal maupun eksternal, sehingga menjadi kendala bagi Yeltsin untuk menandatangani draft NSC pertama.

---

<sup>14</sup> *Op. Cit*, De Haas, Marcel, merujuk pada C. J. Dick, 'The Military Doctrine of the Russian Federation', *The Journal of Slavic Military Studies*, 7/3, September 1994, hal. 504.

<sup>15</sup> *Op. Cit*, De Haas, Marcel, merujuk pada A. Kassianova, 'Russia: Still Open to the West? Evolution of the State Identity in the Foreign Policy and Security Discourse', *Europe-Asia Studies*, 53/6 (2001), hal. 828.

<sup>16</sup> N. Malcolm, A. Pravda, R. Allison and M. Light, *Internal Factors in Russian Foreign Policy*, Royal Institute for International Affairs, (Oxford: Oxford University Press, 1996), hal. 114.

<sup>17</sup> *Op. Cit*, De Haas, Marcel, merujuk pada J.M. Godzimirski, 'Russian National Security Concepts 1997 and 2000: a Comparative Analysis', *European Security*, 9/4, Winter 2000, hal. 76.

Setelah diterapkannya konsep keamanan Rusia tahun 1997, terjadi penurunan kondisi keamanan di Rusia. Permasalahan yang terjadi di dalam ruang lingkup internal Rusia seperti permasalahan terorisme Chechnya, bencana alam dan perang merupakan bagian dari kepentingan nasional Rusia yang perlu mendapat tanggapan serius. Hal tersebut merupakan refleksi kondisi keamanan Rusia yang tercantum di dalam NSC tahun 1997.<sup>18</sup> Namun kepedulian Rusia terhadap masalah internalnya tidak berjalan lurus dengan perhatiannya di mata internasional. Rusia yang terlalu fokus dalam menyelesaikan masalah internalnya, menyebabkan posisi Rusia semakin lemah di mata internasional. Hal ini juga tidak dapat terlepas sebagai akibat dikuasainya organisasi-organisasi penting internasional oleh negara-negara barat, terutama peran NATO dalam politik internasional.

Puncak perubahan konsep keamanan Rusia terjadi tahun 1999. Setelah pada paruh pertama tahun 1999, terjadi konflik di wilayah Kosovo. Konflik tersebut menjadi agenda internasional yang perlu mendapat tanggapan serius dari Rusia karena terjadi di wilayah eks-Uni Soviet. Konflik tersebut menyebabkan perubahan radikal yang terjadi di dalam pengambilan keputusan kebijakan keamanan Rusia. Jenderal Makhmut Gareyev, menyatakan dalam sebuah wawancara bertajuk geopolitik dan keamanan nasional, bahwa strategi yang digunakan oleh NATO, mengikuti kebijakan keamanan yang diterapkan oleh Amerika Serikat. Kebijakan keamanan tersebut tidak lagi difokuskan atas kebijakan defensif akan tetapi sudah mulai menggunakan kebijakan *pre-emptive*,<sup>19</sup> termasuk di dalamnya menekankan penggunaan kekuatan militer untuk melakukan perlawanan, daripada menggunakan kebijakan non-militer (diplomasi).<sup>20</sup> Menurut Gareyev, agresi yang dilakukan NATO terhadap negara

---

<sup>18</sup> *Op. Cit.*, De Haas, Marcel, merujuk pada De ontwikkeling van Ruslands Grand Strategy, 1992-2000', *Atlantisch Perspectief* Vol. 25, No. 6, November 2001, Hal. 19-24.

<sup>19</sup> Kebijakan *pre-emptive* merupakan kebijakan yang menekankan pada penggunaan kekuatan untuk menyerang musuh terlebih dahulu sebelum musuh melakukan serangan setelah ada indikasi akan adanya serang yang dilancarkan oleh lawan.

<sup>20</sup> *Opcit* de Haas, merujuk pada G. Miranovich, 'Geopolitika I Bezopasnost' Rossii', *Krasnaya Zvezda*, 30 and 31 July 1999.



bekas Yugoslavia tersebut adalah contoh kebijakan yang secara jelas mengabaikan wewenang PBB dan standar hukum internasional.<sup>21</sup>

Langkah yang diambil oleh NATO tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah bentuk ancaman yang harus dihadapi Rusia. Permasalahan internal yang tengah dihadapi oleh Rusia menuntut pemerintah Rusia agar menyesuaikan kebijakan keamanan yang diambil pada masa itu. Oleh karena itu pada tahun 1999 terjadi perubahan besar dalam konsep keamanan Rusia sehingga membuat konsep NSC tahun 1997 menjadi tidak berlaku. Rusia terkesan tidak konsisten dalam menerapkan kebijakan keamanan dalam negerinya. Perubahan konsep keamanan NATO tahun 1999 dan intervensi yang dilakukan NATO pada bulan Maret-Juli di tahun yang sama di Kosovo menjadi sebuah ancaman serius bagi keamanan Rusia, sehingga membuat Rusia perlu beralih dari menerapkan kebijakan keamanan yang fokus terhadap masalah internal menjadi fokus terhadap masalah eksternal yang secara nyata datang langsung sebagai akibat perluasan NATO di kawasan Eks-Uni Soviet. Untuk itulah Rusia memfokuskan diri terhadap negara-negara CIS sebagai bagian dari kebijakan keamanan sekaligus bagian dari kebijakan luar negeri Rusia. Hal ini semata-mata diterapkan sebagai usaha Rusia untuk meningkatkan pamornya di mata internasional dan mengembalikan statusnya sebagai negara super power. Perubahan konsep keamanan tersebut disetujui Presiden Rusia, Vladimir Putin pada tanggal 10 Januari 2000.

Pada kenyataannya pelaksanaan NSC dan FPC berjalan secara bersamaan di masa pemerintahan presiden Putin. Melalui wewenangnya, Putin membawa Rusia untuk semakin meningkatkan peran di dalam dunia internasional. Fokus kebijakan keamanan dan luar negeri Rusia pada masa awal pemerintahan Putin adalah menyelesaikan konflik yang terjadi di wilayah anggota-anggota CIS. Hal ini bertujuan agar memperkuat hubungan multilateral yang hendak dibangun pada masa pemerintahan Putin dengan negara-negara CIS. Pada awalnya draft FPC disusun oleh Departemen Luar Negeri Rusia pada tahun 1992. Sayangnya draft yang diajukan oleh Departemen Luar Negeri yang pada saat itu di bawah

---

<sup>21</sup> *Ibid.* Haas. Hal. 5.

kekuasaan Yuri Skokov tidak dapat diterima.<sup>22</sup> Namun pada 29 April 1993, presiden Yeltsin menyetujui rancangan FPC yang disusun oleh Kepala Deputy Departemen Strategi Keamanan Dewan Keamanan Rusia (*Deputy Head of the Department on Strategic Security of the Security Council*), Vladislav Chernov.<sup>23</sup> FPC itulah yang akhirnya diterapkan selama masa pemerintahan Yeltsin selama lebih dari tujuh tahun. Pada masa pemerintahan Putin, tepatnya pada tanggal 28 Juni 2000 Putin merevisi FPC edisi tahun 1993 yang digunakan pada masa Yeltsin.

Putin menerapkan konsep kebijakan luar negeri yang longgar<sup>24</sup> yang memungkinkan Rusia memiliki andil di dunia internasional. Selama masa pemerintahannya, Putin berperan aktif di dalam organisasi-organisasi baik dalam lingkup internasional maupun regional. Di dalam salah satu putusan yang tertulis di situs resmi presiden Rusia menyatakan bahwa,

*“Являясь постоянным членом Совета Безопасности ООН, участницей «Группы восьми» и целого ряда других влиятельных международных и региональных организаций,... Россия оказывает существенное влияние на формирование новой архитектуры международных отношений.*

*Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, anggota kelompok G8 dan sejumlah organisasi-organisasi internasional dan regional,...Rusia mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan arsitektur baru hubungan internasional”<sup>25</sup>*

<sup>22</sup> Godzimirski, Jakub M., *Russian National Security Concepts 1997 and 2000: A comparative analysis*, (Norske Atlanterhavskomiteé, 2000), hal. 75-76.

<sup>23</sup> De Haas, Marcel. *Op. Cit. The Development of Russian Security Policy 1992-2002*. Merujuk pada V. Chernov, ‘Natsional’nyye Interesy Rossii I Ugrozy Dlya Yego Bezopasnosti, Boris Yel’tsin Utverdil Kontsepsiyu Vneshney Politiki RF’, *Nezavisimaya Gazeta*, 29 April 1993, hal. 1 dan 3.

<sup>24</sup> Kebijakan politik longgar memungkinkan bagi Rusia untuk melakukan untuk ikut andil di dalam setiap kegiatan internasional. Hal ini merupakan bagian dari penerapan kebijakan pragmatis Putin dalam usaha untuk mengembalikan Rusia menjadi salah satu negara *super power*.

<sup>25</sup> “Являясь постоянным членом Совета Безопасности ООН, участницей «Группы восьми» и целого ряда других влиятельных международных и региональных организаций, механизмов межгосударственного диалога и сотрудничества, обладая значительным потенциалом и ресурсами во всех областях жизнедеятельности, интенсивно развивая отношения с ведущими государствами и объединениями всех регионов мира, последовательно интегрируясь в мировую экономику и политику, Россия оказывает существенное влияние на формирование новой архитектуры международных отношений.”, lihat *Концепция внешней политики Российской Федерации*, diakses dari <http://kremlin.ru/acts/785> pada 14 Juni 2011 pukul 18.51 WIB.

Putin memfokuskan pada intensifikasi kerjasama multilateral dan regional. Hal ini berdasarkan prinsip-prinsip dasar kebijakan luar negeri Rusia<sup>26</sup> yaitu:

- Rusia merupakan sebuah kekuatan yang memiliki pengaruh besar;
- Rusia harus memperkuat andil di dalam politik internasional;
- Hubungan Rusia dan negara-negara CIS merupakan prioritas yang tertinggi, terutama di dalam kerjasama politik, militer dan ekonomi;
- Pengambilan kebijakan keamanan Barat.

Rusia menerapkan dua pendekatan yang berbeda di dalam kebijakan luar negerinya. Di satu sisi Rusia ingin mempertahankan statusnya sebagai negara super power dan menanamkan pengaruhnya di dalam CIS dengan menekankan aspek militer dan geopolitik. Di sisi lain, kebijakan tersebut ditandai dengan tekanan terhadap Rusia di dunia internasional akibat dominasi Barat terhadap sistem internasional. Bahaya yang diakibatkan dari pendekatan pertama adalah konfrontasi dengan Barat yang hanya akan mengisolasi posisi Rusia di kanvas internasional. Sedangkan, bahaya pendekatan kedua adalah menimbulkan efek ketergantungan terhadap Barat.<sup>27</sup> Kebijakan tersebut pernah diterapkan pada masa awal pemerintahan Yeltsin. Pada pemerintahan Yeltsin, fokus kebijakan luar negeri Rusia berorientasi ke Barat, hal ini memberikan dampak negatif karena Rusia ketergantungan terhadap Barat dan membuat hubungan yang tidak seimbang antara Rusia dan Barat.<sup>28</sup> Namun akhirnya perubahan kebijakan luar negeri Rusia terjadi secara ekstrim ketika Yevgeny Primakov<sup>29</sup> menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Rusia. Putin menyadari bahwa menerapkan kebijakan FPC dan NSC dengan metode kekerasan hanya akan melemahkan posisi Rusia di mata internasional. Saat ini bukanlah era Perang Dingin dimana perang antar kekuatan terselubung merupakan bagian dari NPC dan FPC negara-negara super power. Untuk itu dengan mengintensifkan kerjasama dengan negara-negara CIS serta

<sup>26</sup> *Ibid.* De Haas.

<sup>27</sup> Lynch, A. C., 'The Realism of Russia's Foreign Policy', *Europe-Asia Studies*, 53/1, 2001, Hal. 24. Diakses dari <http://www.jstor.org/pss/826237> pada 16 Juni 2011 pukul 15.00 WIB.

<sup>28</sup> Vyunov Yu. A. Manko, A.M . et al, *Rossiya na Rubezhe XX-XXI Vekov*, (Moskwa: 2006), Hal. 315-316

<sup>29</sup> Yevgeny Primakov menjabat sebagai Menlu Rusia sejak Januari 1996-September 1998. Dia terkenal sebagai seorang yang sangat pro pada kebijakan pragmatis Rusia dan menolak kehadiran NATO di kawasan Eropa Timur dan di negara-negara CIS.

menjalin kerjasama dengan negara-negara lain seperti Korea Utara, Kuba, Cina, India dan Iran di bidang politik, ekonomi dan militer<sup>30</sup> Putin ingin menegaskan bahwa FPC yang ia terapkan bagi Rusia sama sekali tidak didikte oleh Barat. Hal ini juga tidak dapat terlepas dari peran Putin yang mampu membawa Rusia keluar dari permasalahan krisis ekonomi dan finansial yang dialami oleh Rusia yaitu pada masa sebelumnya ketika Yeltsin menjabat. Rusia di bawah kekuasaan tangan dingin Putin telah mampu menjadi salah satu negara super power tidak hanya maju di bidang ekonomi, namun juga di bidang militer.

Selain meningkatkan kerjasama di negara-negara CIS dan negara-negara kiri, Putin juga meningkatkan kerjasama ekonomi dengan negara-negara Uni Eropa (*Europe Union/EU*). Letak posisi geografis Rusia yang berdekatan dengan negara-negara EU menjadi salah satu faktor penentu bagi Rusia dalam menjadikan EU sebagai prioritas tertinggi (*high priority*) dalam menjalin kerjasama ekonomi dan sebagai salah satu pintu bagi Rusia untuk berintegrasi di dalam perekonomian global. Tidak heran jika Menteri Luar Negeri Rusia (pada saat itu), Igor Ivanov menyatakan bahwa kepentingan utama luar negeri Rusia terletak di Eropa. Oleh karena itu, Rusia bertujuan meningkatkan hubungan secara struktural dan seimbang dengan EU. Pada tahun 2000, terjadi peningkatan hubungan perdagangan antara Rusia dan EU sebesar 40 persen.<sup>31</sup> Bahkan salah satu ahli kebijakan luar negeri Rusia yang juga merupakan mantan deputy pada Kementerian Luar Negeri Rusia, Anatoly Adamishin, menegaskan hubungan kerjasama antara Rusia dan EU sangat penting dilakukan oleh Rusia. Jika kerjasama tersebut semakin berkembang ke arah positif, maka tidak menutup kemungkinan bahwa dalam kurun waktu sepuluh hingga dua puluh tahun Rusia akan dapat berintegrasi dengan EU.<sup>32</sup> Oleh karena itu di sini dapat terlihat bahwa Putin pada masa awal pemerintahannya sangat pragmatis. Pragmatisme Putin tidak hanya ditunjukkan dengan melakukan kerjasama dengan negara-negara kiri tetapi juga negara-negara

<sup>30</sup> Smith, M.A. *Russia and the Far Abroad 2000*, (Camberley: Conflict Studies Research Centre, 2000), hal. 27.

<sup>31</sup> International Institute for Strategic Studies, *Strategic Survey 2000-2001*, (New York: Oxford University Press, 2000), hal. 122.

<sup>32</sup> De Haas, Marcel. *Op. Cit. The Development of Russian Security Policy 1992-2002*. Merujuk pada A. L. Adamishin, 'Naskol'ko Bezopasna Nyneshnaya Yevropa?' *Nezavisimaya Gazeta*, 2 November 2000, p. 3.

Barat yang notabene telah menjadi rival sejati. Bahkan seperti telah dijelaskan pada bab ketiga, Putin menyatakan tidak menutup kemungkinan bagi Rusia untuk bergabung dengan keanggotaan NATO. Dalam pidato tahunan pada 8 Juli 2000, Putin secara tegas menyatakan bahwa orientasi politik luar negeri Rusia berdasarkan pragmatisme, efektivitas ekonomi, dan kepentingan nasional sebagai prioritas.<sup>33</sup>

Pragmatisme Putin juga semakin terlihat di dalam kebijakan luar negeri yang telah ia revisi. Di dalam kebijakan tersebut dikatakan bahwa salah satu ancaman bagi keamanan Rusia kedepan adalah terorisme internasional.<sup>34</sup> Untuk itu perang melawan terorisme merupakan hal mutlak yang harus dilakukan. Peristiwa 9/11<sup>35</sup> yang menimpa Amerika merupakan momentum yang tepat bagi Rusia untuk meningkatkan hubungan dengan Amerika sekaligus menghilangkan sentimen internasional atas Rusia dalam perang melawan Chechnya yang muncul pada saat itu. Sejak peristiwa 9/11, presiden Amerika pada saat itu mengungkapkan bahwa dirinya akan melakukan perang atas segala macam bentuk teror dan menjadikan *war on terror* sebagai salah satu kebijakan luar negerinya. Untuk membantu merealisasikan kebijakan luar negerinya, Amerika semakin meningkatkan hubungan bilateralnya dengan negara-negara CIS. Sebelumnya, hubungan kerjasama antara NATO dan CIS telah jauh terjalin sebelum peristiwa

<sup>33</sup> R. de Archellie, *Pragmatisme Politik Luar Negeri Vladimir Putin*, dalam dalam Jurnal Glasnost Volume 4 No. 2 Oktober 2008-Maret 2009 (Depok:Program Studi Rusia FIB UI, 2008), Hal. 49, merujuk pada *Annual Address to the federal Assembly of the Russian Federation*, Moscow, Kremlin, 8 Juli 2000. <http://www.kremlin.ru>

<sup>34</sup> “Новые вызовы и угрозы (прежде всего международный терроризм, наркотрафик, организованная преступность, опасность распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки, региональные конфликты, демографические проблемы, глобальная бедность, в том числе энергетическая, а также нелегальная миграция, изменение климата) носят глобальный характер и требуют адекватного ответа со стороны всего международного сообщества и солидарных усилий для их преодоления. Существенно возрастает роль экологического фактора, все более актуальной становится проблема профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями. Сложность стоящих перед международным сообществом задач требует выработки сбалансированной стратегии их решения, исходящей из взаимосвязанности проблем безопасности, социально-экономического развития и защиты прав человека.” Lihat *Концепция внешней политики Российской Федерации*, diakses dari <http://kremlin.ru/acts/785> pada 14 Juni 2011 pukul 18.51 WIB.

<sup>35</sup> Peristiwa 9/11 merupakan serangan yang dilakukan oleh kelompok teroris Al-Qaeda terhadap Amerika dengan membajak pesawat salah satu maskapai penerbangan milik Amerika dan menabrakkannya ke menara kembar *World Trade Centre* (WTC) sehingga menyebabkan kedua menara tersebut hancur. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 11 September 2001.

9/11 terjadi. Baik Amerika dan NATO mulai mengintensifkan kerjasama dengan negara-negara CIS terutama dengan negara-negara di wilayah Kaukasus paska Uni Soviet resmi dilikuidasi.<sup>36</sup> Dapat dilihat melalui Tabel 1, bahwa kerjasama di bidang militer dan keamanan meningkat dalam kurun waktu 7 tahun terakhir.

**Tabel 1**  
**Peningkatan Aktifitas AS dan NATO di Kawasan Kaukasus**

<b>Tahun</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Negara</b>	<b>Tujuan</b>
Sejak 1994	Dalam kerangka Program <i>Partnership for Peace</i> dan <i>Individual Partnership</i> , NATO telah menjadwalkan kemungkinan negara-negara bekas Uni Soviet untuk bergabung; beberapa negara Kaukasus seperti: Georgia, Azerbaijan dan Armenia diikut sertakan dalam program-program latihan militer.	Armenia, Georgia, Azerbaijan	Kesiapan menjadi anggota
1998	Pembentukan Dewan Keamanan Internasional untuk Georgia (dikepalai Jenderal G. Jhonson (Inggris).	Georgia	Memberikan bantuan konsultasi penyempurnaan infrastruktur pertahanan dan pengendalian Angkatan Bersenjata.
1998	Sejak bulan Oktober, AS menambahkan negara Georgia, Armenia dan Azerbaijan ke dalam zona tanggungjawab Komando AU AS di kawasan Eropa.	Georgia, Armenia, Azerbaijan	
1999	AS mengucurkan dana 12,3 juta USD bagi pembangunan infrastruktur Penjaga Pantai Georgia; Pentagon menyetujui pemasukan 14 heli tempur dan pembuatan beberapa jet tempur Su-39 modern di pabrik pesawat di Tbilisi; Mengirim 17 kapal bagi Departemen	Georgia	Memperkuat perbatasan darat dan pantai Georgia.

<sup>36</sup> Likuidasi (*Ликвидировать*) merupakan istilah resmi yang digunakan oleh Gorbachev. Lihat, Ahmad Sujai, *Membaca Jejak Putin Meraih Kremlin*, dalam Jurnal Glasnost Volume 4 No. 2 Oktober 2008-Maret 2009 (Depok:Program Studi Rusia FIB UI, 2008), Hal. 41.

	Penjaga Perbatasan Georgia dari Dinas Penjaga Pantai AS.		
--	---	--	--

Disusus dari sumber K.S. Gadijev<sup>37</sup>

Bagi negara-negara di kawasan CIS, peningkatan hubungan kerjasama dengan Amerika tersebut ditanggapi secara positif. Pasalnya ini merupakan momentum yang tepat untuk melepaskan diri dari gengaman kekuasaan Rusia. Selain itu, negara-negara di kawasan tersebut juga diuntungkan secara finansial. Kebijakan *war on terror* menuntut Amerika untuk melakukan serangan ke wilayah Afghanistan yang dicurigai sebagai basis pertahanan Al-Qaeda. Setiap serangan yang dilakukan oleh Amerika dan sekutunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Amerika menginvestasikan ratusan juta dolar ke dalam pangkalan udara di Uzbekistan, Kyrgistan dan Tajikistan<sup>38</sup> sebagai usaha untuk menempatkan pasukannya di wilayah tersebut. Menurut beberapa sumber Amerika harus membayar uang sebesar \$ 7000-7500 untuk setiap serang udara yang dilakukan dari dan ke pangkalan udara Manas di Kyrgistan.<sup>39</sup> Peristiwa 9/11 merupakan saat yang tepat bagi Amerika untuk semakin memperkuat pengaruhnya di wilayah Kaukasus sekaligus memasuki wilayah halaman belakang Rusia. Namun, Rusia pada masa awal pemerintahan Putin tidak terlalu memfokuskan diri pada usaha perluasan NATO di wilayah halaman belakangnya tersebut. Rusia di bawah Putin cenderung fokus pada permasalahan internasional dan membantu Amerika dalam usaha perang melawan terorisme merupakan salah satu bentuk penerapan kebijakan luar negerinya. Di samping itu Rusia memiliki tujuan dengan mendukung kebijakan Amerika, yaitu meminimalisir sentimen internasional atas serangan yang dilakukan di wilayah Chechnya dan menganggap serangan tersebut sebagai salah satu bentuk melawan terorisme.

Dalam kaitannya antara NSC dan FPC dengan kebijakan geopolitik Rusia, NSC dan FPC merupakan bagian dari kebijakan geopolitik Rusia. NSC dan FPC merupakan landasan dari setiap pergerakan Rusia tidak hanya di kawasan

<sup>37</sup> *Op. Cit.* Ahmad Fahrudodji, *Konflik Ossetia Selatan...*, hal. 23-24. Merujuk pada K. S. Gadijev, *Geopolitika Kavkaza*. (Moskwa: Mezhdunarodnie Otnoshenia, 2001) dan *Geopoliticheskie Gorizonty Rosii: Kontury Novogo Miroporyadka*. (Moskwa: Ekonomika, 2007).

<sup>38</sup> De Haas, Marcel. *Op. Cit. The Development of Russian Security Policy 1992-2002*. hal. 7, Merujuk pada M. Khodarenok, ‘‘Starshhego Brata’ Sdali za Milliard Dollarov’, *NVO*, 8 February 2002, Hal. 3.

<sup>39</sup> *Ibid.*

Kaukasus akan tetapi juga di negara-negara anggota CIS lain. Dalam kasus perang antara Rusia dan Georgia tahun 2008, hal itu merupakan salah satu bentuk kebijakan geopolitik Rusia. Rusia yang muncul sebagai salah satu ‘kekuatan baru’ pada masa pemerintahan Medvedev di kawasan tersebut ingin menunjukkan kepada internasional bahwa dirinya masih memiliki *sphere of influence* yang kuat di kawasan eks-Uni Soviet tersebut. Hal ini akan dijelaskan pada sub bab berikutnya dalam bab analisa ini.

### 4.3 Konflik Rusia-Georgia

Ekskalasi politik yang terjadi antara Rusia dan Georgia pada tahun 2008, akhirnya meletuskan perang lima hari di wilayah Georgia pada bulan agustus. Perang tersebut merupakan bagian dari kebijakan geopolitik Rusia dengan mempertimbangkan berbagai macam faktor yang ada. Seperti telah dijelaskan pada Bab I bahwa perang merupakan bagian dari penerapan kebijakan geopolitik suatu negara. Rusia mengambil tindakan perang setelah sebelumnya terjadi provokasi yang dilakukan pasukan Georgia terhadap pasukan penjaga perdamaian Rusia yang mengakibatkan beberapa pasukan penjaga perdamaian Rusia tewas.

Sebelum konflik ini terjadi terdapat serangkaian peristiwa yang semakin memperkeruh situasi di dalam diri Georgia sehingga meningkatkan kemelut antara Rusia dan Georgia. Setelah sepuluh tahun paska kejatuhan Uni Soviet dan etnis Ossetia menikmati status quo kemerdekaan mereka, kondisi di wilayah mereka memanas. Hal ini disebabkan karena hasil pemilihan presiden Georgia pada tahun 2003 yang pada akhirnya membawa kemenangan kepada Saakhasvili. Pada bulan Januari 2004 Saakhasvili membuat suatu perubahan dimana tujuannya adalah untuk mengintegrasikan seluruh wilayah Georgia di bawah pemerintah Georgia yang sah.<sup>40</sup> Hal ini dapat dikatakan bahwa tujuan dari perubahan tersebut ditujukan kepada Ossetia Selatan. Selain itu, Saakhasvili juga mendeklarasikan

---

<sup>40</sup> Internationa Crissis Group, *Georgia Avoiding War in South Ossetia*, 26 November 2004, diakses dari <http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/media-releases/2004/europe/Georgia%20Avoiding%20War%20in%20South%20Ossetia.aspx> pada 18 Juni 2011 pukul 08.55 WIB



komitmennya untuk menjalankan reformasi di bidang ekonomi dan politik, membangun Georgia menjadi sebuah negara yang kuat dan demokratis, dan menjalin hubungan yang lebih erat dengan Barat melalui keanggotaan dalam NATO dan UE tanpa mengganggu hubungan bertetangga yang baik dengan Rusia.<sup>41</sup>

Setelah sukses membawa Ajaria kembali di bawah kontrol Tbilisi pada awal tahun, Saakhasvili mulai melirik wilayah Ossetia Selatan. Pada bulan Mei 2004 Saakhasvili memulai kampanye reintegrasi Ossetia Selatan dengan memerintahkan satuan-satuan kepolisian dan pasukan khusus (OMON) untuk melakukan operasi pemberantasan penyelundupan di Ossetia Selatan<sup>42</sup> Pasukan Georgia disebar di zona konflik dan melakukan razia terhadap barang-barang ilegal serta menutup ‘pasar penyelundup’ di Ergneti. Kehadiran pasukan yang bukan termasuk dalam komandi JPKF ini menurut pemerintah dan penduduk Ossetia Selatan dipandang sebagai persiapan Georgia untuk ‘mencairkan’ konflik yang telah beku selama 12 tahun.<sup>43</sup> Penduduk Ossetia yang tidak memiliki kerjasama perdagangan yang jelas memanfaatkan penyelundupan barang sebagai salah satu penggerak roda perekonomian mereka. Sementara itu penyelundupan tersebut dinilai sebagai hal yang ilegal bagi Georgia karena pajak yang seharusnya dapat diperoleh dari setiap barang yang diselundupkan tidak masuk ke kas negara, sehingga Georgia mengalami kerugian perekonomian yang besar akibat penyelundupan tersebut. Di sisi lain, remilitarisasi pasukan Georgia di wilayah Ossetia Selatan oleh penduduk dinilai sebagai usaha ‘menjegal’ kepemimpinan yang sah Eduard Koikoty yang tengah naik pamornya.<sup>44</sup> Perbedaan pandangan antara Tbilisi dan Tskinali akhirnya menyulut kemelut di wilayah Ossetia Selatan. Menurut Sanine Frezier, *Project Director of Crisis Group for Caucasus*, menyatakan bahwa “Di satu sisi penggunaan kekuatan militer untuk mencapai tujuan politiknya (politik Saakhasvili) akan berdampak pada terjadinya pengungsian penduduk Ossetia Selatan secara besar-besaran...Perang yang terjadi

<sup>41</sup> *Loc. Cit*, International Crisis Group, *Georgia: Sliding...*, hal. 1.

<sup>42</sup> *Ibid.* Palladin Ansharullah, hal. 53.

<sup>43</sup> *Op. Cit.* Paladin Ansharullah, hal. 54 merujuk pada Bertyl Nygren, *The Rebuilding of Greater Russia: Putin's Foreign Policy towards The CIS Countries*, (London: Routledge, 2008), hal. 145.

<sup>44</sup> *Ibid.* Internasional Crisis Group. *Georgia Avoiding...*

di wilayah itu akan menghancurkan harapan presiden Saakashvili dan Georgia kedepannya untuk memperoleh masa depan yang cerah dalam integritas Georgia, dan hanya akan menarik Rusia ke dalam konflik lain di wilayah Kaukasus".<sup>45</sup> Rusia tidak akan tinggal diam ketika melihat Ossetia Selatan dihancurkan oleh pasukan Georgia, karena mayoritas rakyat Ossetia Selatan adalah orang Rusia.

Sementara itu hubungan Rusia dan Georgia semakin memanas. Hal ini disebabkan karena pemerintah Georgia terlalu banyak mengkritik kebijakan orang lain (Eduard Koikoty), terutama Rusia, akan tetapi lambat dalam menentukan strategi jangka panjang untuk menyelesaikan permasalahan dalam negerinya.<sup>46</sup> Hal ini dapat dilihat terutama dari kurangnya peran Georgia di dalam JPKF di wilayah Ossetia Selatan. Sejak awal pembentukan JPKF tahun 1992, Rusia menyatakan bahwa akan menjamin stabilitas di zona konflik dan membantu dalam usaha mediasi antara pemerintah Georgia dan Ossetia Selatan. Selain itu Rusia juga membantu menanggung biaya perawatan para pengungsi Ossetia. Rusia juga meningkatkan hubungan kerjasama dengan Ossetia Selatan terutama di bidang ekonomi dan kemanusiaan. Rusia memberikan bantuan keuangan untuk merehabilitasi perekonomian Ossetia dan mengembalikan para pengungsi ke wilayah mereka. Hal ini sesuai dengan perjanjian bilateral yang ditandatangani tahun 2000. Sementara itu Rusia menuduh bahwa pemerintah Georgia tidak pernah ikut campur tangan dalam memberikan kontribusi dana untuk pembangunan perekonomian Ossetia Selatan<sup>47</sup>

Selama musim panas tahun 2004, Rusia meminta pemerintah Georgia secara tegas untuk bertindak secara hati-hati dan berkomitmen untuk membangun kepercayaan di wilayah Ossetia Selatan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara terlibat dalam kegiatan kemanusiaan dan kebudayaan, pembangunan perekonomian dan penarikan senjata ilegal dari kelompok bersenjata dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Ossetia Selatan. Berdasarkan hasil jajak pendapat mengenai peran Rusia di Ossetia Selatan sehubungan dengan hubungan Rusia dan Georgia, menyatakan bahwa sekitar 50 persen menyatakan bahwa Rusia harus tetap

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.* Internationa Crissis Group, *Georgia Avoiding...*, hal. 18.

<sup>47</sup> *Ibid.* Hal. 17.

netral di dalam konflik tersebut, 14 persen menyatakan bahwa Rusia harus membela kepentingan Ossetia Selatan dan 5 persen yang menyatakan bahwa Rusia harus membantu Georgia dalam mendapatkan integritasnya kembali.<sup>48</sup> Pada pertengahan tahun 2004, Rusia mulai menekankan alasan baru atas perkembangan konflik di wilayah Ossetia Selatan. Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan bahwa “*Russia is concerned over the fate of the Russian citizens who comprise the overwhelming majority of the South Ossetian population*”, hal ini sesuai dengan kebijakan FPC Rusia yang menyatakan bahwa,

*“всесторонняя защита прав и законных интересов российских граждан и соотечественников, проживающих за рубежом*

*Setiap hak dan kepentingan warga Rusia baik yang berada di dalam ataupun di luar negeri mendapat perlindungan yang komprehensif*”<sup>49</sup>

Pernyataan yang dilontarkan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia juga di dukung oleh Duma Rusia. Pada tanggal 8 Agustus 2004, sebanyak 425 anggota Duma menyatakan bahwa “*there appear to be circumstances that infringe upon Russian sovereignty*.”<sup>50</sup> Hal ini membuktikan bahwa Rusia dan Ossetia Selatan memiliki hubungan yang dekat. Kedekatan hubungan ini dapat dilihat melalui kerjasama yang dilakukan antara Rusia dan Ossetia Selatan, diantaranya adalah Rusia memberikan bantuan keuangan dan pengembangan hubungan ekonomi. Disamping itu Rusia juga membayar uang pensiun orang yang memiliki status sebagai warga negara Rusia yang tinggal di Ossetia Selatan sebesar 660 rubel per bulan (sekitar \$23).<sup>51</sup> Rusia juga memberikan bantuan kemanusiaan kepada Ossetia Selatan selama masa ekspansi Georgia di wilayah tersebut. Pada awal Oktober setidaknya dilaporkan bahwa Moskow telah memberikan sebanyak 700 ton yang diangkut oleh 22 kreta pengangkut. Kedekatan Rusia dengan Ossetia Selatan juga dapat dilihat melalui nomor plat mobil warga Ossetia Selatan yang menyerupai plat mobil orang Rusia dan penggunaan mata uang rubel sebagai alat tukar sehari-hari.<sup>52</sup> Kedekatan hubungan Rusia dengan Ossetia Selatan tersebut

<sup>48</sup> *Op. Cit.* ICG: *Georgia Avoiding...* "Poll Says Russians Advocate Neutrality in Conflict Over South Ossetia", RFE/RL, 30 July 2004.

<sup>49</sup> *Ibid.* Концепция внешней политики Российской Федерации

<sup>50</sup> *Ibid.* ICG: *Georgia Avoiding...*, hal 17.

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Ibid.*

merupakan bagian dari penerapan geopolitik Rusia untuk tetap menjaga *sphere of influence*-nya di wilayah Kaukasus. Hal ini dilandasi bahwa terjadi peningkatan hubungan kerjasama antara Georgia dan NATO sehingga Rusia perlu mengambil langkah konkret untuk tetap menjaga pengaruhnya di kawasan tersebut. Bahkan untuk semakin mempererat hubungan dengan Ossetia Selatan, Rusia juga menempatkan perusahaan-perusahaannya di Ossetia Selatan, seperti Megaphone. Rusia memanfaatkan isu konflik regional sebagai media untuk tetap aktif di kawasan tersebut.

Meskipun hubungan antara Rusia dan Ossetia Selatan semakin harmonis, akan tetapi hubungan dengan Georgia semakin menurun. Selama musim panas tahun 2004, hubungan Georgia dan Rusia berada di bawah titik terendahnya. Untuk membalas besarnya pengaruh Rusia di wilayah negaranya, Georgia melakukan sejumlah hubungan kerjasama bilateral dengan AS dan NATO terutama dalam hal kerjasama latihan militer. Berbagai latihan militer dilakukan di wilayah Georgia antara Georgia dan Amerika. Menurut Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (*Russia's Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary*) Rusia untuk Georgia, Vyacheslav Kovalenko pada tahun 2008 menyatakan bahwa "*Georgia's NATO membership will be a heavy burden on its relations with Russia.*"<sup>53</sup> Hal ini disampaikan setelah sebelumnya pada tahun 2007 NATO memberikan *Membership Action Plant* (MAP)<sup>54</sup> dan memberikan bantuan sebesar 40 juta dolar kepada militer Georgia pada tahun 2006.

Sejak revolusi mawar bergulir di Georgia, hubungan AS dan Georgia semakin meningkat.<sup>55</sup> Hal ini dapat dilihat dari serangkaian kerjasama yang

<sup>53</sup> RIA Novosty, "*Georgia's NATO membership will be a heavy burden on its relations with Russia*" - *Russia's Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to Georgia Vyacheslav Kovalenko*. Diakses dari <http://en.rian.ru/analysis/20080401/102650825.html> pada 19 Juni 2011 pukul 12.19 WIB.

<sup>54</sup> Membership Action Plant (MAP) diluncurkan sejak tahun 1999. Tujuan pembentukannya adalah untuk memberikan dukungan berupa saran dan berbagai macam bantuan militer. Fokus pembuatan MAP adalah mempersiapkan negara-negara yang akan bergabung ke dalam aliansi NATO. Untuk dapat masuk di dalam keanggotaan NATO nantinya, negara-negara tersebut harus memenuhi beberapa kriteria yang telah ditetapkan NATO diantaranya politik, ekonomi, hukum, militer, dan keamanan.

<sup>55</sup> Revolusi mawar adalah serangkaian aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para pengunjuk rasa dengan cara membagikan bunga mawar kepada aparat keamanan yang menjaga gedung parlemen

dilakukan diantara keduanya. Bahkan Georgia ingin menjadikan NATO dan UE sebagai bagian dari politik luar negerinya. Di dalam situs resmi yang dilansir oleh Kementerian Luar Negeri Georgia menyatakan bahwa

*“Integration into the North Atlantic Treaty Organization is one of the priorities of foreign and security policy of Georgia. Georgia attaches a significant importance to the role of NATO in strengthening stability and security of Georgia. At the same time NATO membership will provide guarantees for securing democratic values and democratic governance in Georgia.”*<sup>56</sup>

Georgia beranggapan bahwa dengan meningkatkan hubungan kerjasama dengan NATO dan UE akan memberikan dampak positif dalam kemelut yang terjadi antara Rusia dan Georgia selama ini. Untuk itu Georgia selalu berperan aktif di dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh NATO. Pada tanggal 29 Oktober 2004, *North Atlantic Council* yang juga merupakan organisasi bagian dari NATO menyetujui *Individual Partnership Action Plan* Georgia. Georgia merupakan negara pertama diantara negara-negara lain yang menjadi mitra kerjasama NATO yang berhasil menyelesaikan tugas itu. Dukungan lain yang diberikan Georgia terhadap NATO adalah mendukung pelaksanaan tugas pasukan koalisi NATO di Irak. Pada tanggal 8 November 2004 sebanyak 300 orang pasukan Georgia dikirim ke Irak untuk mendukung tugas pasukan koalisi. Pemerintah Georgia berkomitmen akan menambah jumlah pasukannya menjadi sebanyak 850 orang yang akan membantu pasukan koalisi di Irak. Seiring dengan meningkatnya aktifitas pasukan Georgia dalam membantu koalisi, Amerika memberikan bantuan kepada pasukan Georgia dengan cara memberikan pelatihan kepada 4 ribu pasukan Georgia di dalam kerangka kerjasama *Georgia Train and Equip Program* (GTEP). Hal ini menyebabkan Rusia menjadi khawatir karena pasukan Amerika telah memasuki wilayah halaman belakangnya. Rusia tidak menginginkan ada pasukan lain selain pasukan Rusia yang memasuki wilayah Georgia. Rusia menganggap kedatangan pasukan Amerika di Georgia dipenuhi oleh serangkaian rencana yang akan membahayakan posisi Rusia di Georgia.

---

Georgia. Lihat Charles King, *Loc. Cit. The Ghost of Freedom: A History of the Caucasus*, (New York: Oxford University Press, 2008), hal 230.

<sup>56</sup> Ministry of Foreign Affairs of Georgia, *NATO-Georgia*, diakses dari [http://www.mfa.gov.ge/index.php?sec\\_id=453&lang\\_id=ENG](http://www.mfa.gov.ge/index.php?sec_id=453&lang_id=ENG) pada 19 Juni 2011 pukul 22.50 WIB.

Pada tahun 2005 setelah kematian PM Georgia Zurab Zhvania, presiden Amerika George W. Bush pada bulan Mei datang mengunjungi Georgia untuk bertemu dengan Saakashvili dan sejumlah anggota parlemen Georgia lainnya. Dalam pertemuan tersebut Bush sempat memberikan pidato di depan puluhan ribu orang yang berada di Lapangan Kebebasan Georgia, Tbilisi. Dalam pidato tersebut, Bush memuji pemerintahan Saakashvili yang dinilai telah berhasil menjalankan pemerintahan secara demokratis. Bush juga menyatakan bahwa permasalahan antara Georgia dan Ossetia Selatan diselesaikan sebaik-baiknya.<sup>57</sup> Kedatangan Bush ke Georgia merupakan sinyal positif bagi hubungan Georgia dan NATO ke depannya. Akan tetapi kedatangan tersebut memberikan dampak yang buruk bagi hubungan bilateral Rusia dan Georgia. Hal ini menuntut Rusia untuk mengambil langkah tegas dalam mengamankan pengaruhnya di wilayah Georgia. Pada tahun 2006, Rusia menghentikan perdagangan anggur dan juga air mineral dari Georgia. Hal ini dilakukan Rusia agar Georgia kembali dibawah pengaruh Rusia.

Hubungan bilateral Rusia dan Georgia semakin memburuk setelah Rusia dituduh melakukan sabotase terhadap jalur pipa gas yang menuju Armenia dan Georgia yang menyebabkan kondisi yang sangat menyulitkan bagi rakyat Georgia. Saakashvili dalam wawancaranya kepada BBC menyatakan bahwa *"We've received numerous threats by Russian politicians and officials at different levels to punish us for basically for not giving them pipelines"* pernyataan Saakashvili tersebut diperkuat oleh pernyataan PM Georgia Zurab Noghaideli yang menyatakan bahwa *"political motive was clear"*.<sup>58</sup> Pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah Georgia tersebut dianggap terlalu berlebihan oleh pemerintah Rusia. Hubungan diplomatik Rusia dan Georgia semakin memanas setelah terjadi penyanderaan terhadap 4 orang perwira pasukan Rusia oleh pihak Georgia karena dituduh sebagai mata-mata pada bulan September 2006.<sup>59</sup>

<sup>57</sup> Eurasianet. *Bush Visit to Georgia is a "Great Political Victory" – Saakashvili*. Diakses dari <http://www.eurasianet.org/departments/insight/articles/eav051105.shtml> pada 19 Juni 2011 pukul 23.30 WIB

<sup>58</sup> BBC News. *Russia Blamed for Gas Sabotage*, diakses dari <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4637034.stm> pada 20 Juni 2011 pukul 00.35 WIB.

<sup>59</sup> *The History of Georgia: Georgia after Rose Revolution (2003-....)*, diakses dari <http://www.aboutgeorgia.ge/history/index.html?page=13> pada 19 Juni 2011 pukul 19.30 WIB.

Perlakuan Georgia yang ditujukan oleh Rusia tersebut memicu kecaman dari presiden Rusia, Vladimir Putin. Dalam pidatonya Putin menyatakan bahwa

*“Совершенно ясно, что Россию стараются побольше уязвить и спровоцировать.... Действия руководства Грузии как акт государственного терроризма с захватом заложников....”*

*Sangat jelas bahwa Rusia saat ini sedang dicubit dan diprovokasi dengan cara yang paling menyakitkan... Aksi pemimpin Georgia tersebut seperti perilaku negara teroris yang melakukan tindakan penahanan dan penyanderaan.<sup>60</sup>*

Meskipun hubungan antara Rusia dan Georgia berada di titik nadir tetinggi, akan tetapi sepertinya pemerintah Georgia tidak ingin mencairkan suasana diantara keduanya. Bahkan pemerintah Georgia semakin mengintensifkan hubungan kerjasama dengan NATO. Pada tanggal 21 September 2006, NATO dan Georgia melakukan pembicaraan untuk memulai dialog intensif atas aspirasi (*Intensified Dialogue on Membership Aspirations/IDMA*) Georgia untuk menjadi bagian dari NATO.<sup>61</sup> Pada akhirnya dialog tersebut membawa hubungan Georgia-NATO ke arah yang jauh lebih tinggi dan meningkatkan status Georgia sebelumnya menjadi sebagai negara calon anggota NATO. Di dalam kerangka kerja IDMA, Georgia dapat melakukan konsultasi dengan negara-negara aliansi terutama pada permasalahan reformasi yang sedang terjadi dan juga perencanaan masa depan Georgia. Proses pelaksanaan IDMA dan kemampuan Georgia kedepannya lah yang akan membantu dalam mempersiapkan Georgia untuk memasuki tahap selanjutnya yaitu integrasi ke dalam MAP. Selain meningkatkan kerjasama dengan NATO Georgia juga terus aktif di dalam keanggotaan EU. Partisipasi Georgia di dalam keanggotaan *Euro-Atlantic Partnership Council* (EAPC) merupakan sesuatu yang penting tidak hanya dalam meningkatkan hubungan Georgia dan EU, akan tetapi juga dengan NATO. Partisipasi tersebut memberikan Georgia kesempatan untuk aktif di dalam konsultasi politik dan juga menerima bantuan dalam keamanan di bidang politik dan keamanan negara.

<sup>60</sup>“«Россию стараются побольше уязвить, спровоцировать» Выступление Владимира Путина в Совете Безопасности“ diakses dari <http://www.polit.ru/dossie/2006/10/01/georgia.html> pada 20 Juni 2011 pukul 00.50 WIB

<sup>61</sup> *Ibid.* Ministry of Foreign Affairs of Georgia.

Melihat kedekatan hubungan bilateral antara Georgia dan NATO, Rusia merasa bahwa posisi mereka semakin tersudut. Hal ini akhirnya memaksa Rusia untuk memprovokasi keadaan dengan cara mengirimkan pesawat tempur di wilayah udara Georgia pada bulan September 2007.<sup>62</sup> Sejak saat itu, hubungan Rusia dan Georgia semakin memanas. Puncak ketegangan tersebut terjadi pada tanggal 8 Agustus 2008. Pasukan Georgia memulai serangan terhadap wilayah Tskinali yang menyebabkan tewasnya tiga orang pasukan JPKF Rusia. Rusia yang melihat provokasi yang dilakukan oleh pasukan Georgia, akhirnya membalas serangan tersebut dengan mengirimkan pasukannya ke wilayah Tskinali. Dalam penyerangan tersebut, pasukan Rusia dibantu oleh milisi Ossetia Selatan dan Abkhazia. Dalam pernyataan yang dikemukakan presiden Dmitry Medvedev atas situasi dan kondisi yang terjadi di Ossetia Selatan mengatakan bahwa,

*“Вы знаете, что Россия присутствовала и присутствует на территории Грузии на абсолютно законных началах, исполняя свою миротворческую миссию в соответствии с теми международными договоренностями, которые были достигнуты. И главной своей задачей мы считали и считаем сохранение мира. Россия исторически была и останется гарантом безопасности народов Кавказа.*

*Сегодня ночью в Южной Осетии грузинские войска, по сути, совершили акт агрессии против российских миротворцев и мирных жителей. То, что произошло, – это грубейшее нарушение международного права и тех мандатов, которые были когда-то выданы России мировым сообществом как партнёру по мирному урегулированию.*

*Действия грузинской стороны привели к человеческим жертвам, в том числе и среди российских миротворцев. Ситуация дошла до того, что миротворцы с грузинской стороны стреляли по российским миротворцам, вместе с которыми были обязаны выполнять свою миссию по сохранению мира в регионе. Сейчас в Южной Осетии гибнут мирные люди, женщины, дети, старики, и большинство из них – это граждане Российской Федерации.*

*В соответствии с Конституцией и федеральным законодательством как Президент Российской Федерации я обязан защищать жизнь и достоинство российских граждан, где бы они ни находились.*

*Anda tahu bahwa Rusia hadir di wilayah Georgia atas dasar hukum yang sah, untuk memenuhi misi penjaga perdamaian sesuai dengan*

<sup>62</sup> *Ibid.* International Crisis Group, *Georgia: Sliding...*, hal. 9.



*perjanjian internasional yang telah disepakati. Tugas utama Rusia adalah menjaga perdamaian di wilayah tersebut. Secara historis, Rusia tetap menjadi negara yang menjamin keamanan bagi seluruh penduduk di wilayah Kaukasus.*

*Malam ini di Ossetia Selatan, pasukan Georgia melakukan tindakan agresi terhadap pasukan penjaga perdamaian Rusia dan penduduk sipil. Ini merupakan suatu bentuk pelanggaran internasional dan sesuai mandat yang telah diberikan oleh komunitas internasional, Rusia perlu menjadi mitra untuk menyelesaikan secara damai.*

*Tindakan yang dilakukan oleh pasukan Georgia tersebut telah menelan korban manusia termasuk diantaranya pasukan penjaga perdamaian Rusia. pasukan Georgia menembaki pasukan penjaga perdamaian Rusia yang tengah bertugas menjaga perdamaian disana. Banyak warga sipil Ossetia Selatan diantaranya perempuan, anak-anak dan para orang tua yang meninggal disana dan mereka merupakan warga negara Rusia.*

*Sesuai dengan isi konstitusi dan undang-undang federal, sebagai presiden Rusia, saya memiliki kewajiban untuk melindungi kehidupan dan hak warga negara Rusia dimanapun mereka berada.”<sup>63</sup>*

Pernyataan Medvedev tersebut akhirnya memicu Rusia untuk melakukan serangan balasan terhadap agresi militer yang dilakukan oleh pasukan Georgia. Pernyataan tersebut sesuai dengan isi konstitusi Rusia dan juga FPC dan NSC Rusia dalam hal melindungi hak warga negara Rusia dimanapun mereka berada. Perang yang dilakukan oleh Medvedev tersebut dapat dikatakan sebagai bagian dari penerapan geopolitik Rusia. Rusia menggunakan tindakan kekerasan setelah sebelumnya berbagai macam usaha untuk meningkatkan hubungan diplomatik dengan Georgia gagal dilaksanakan. Rusia menggunakan kebijakan *pre-emptive* dalam melaksanakan serangan tersebut. Selain itu ada alasan lain yang jauh lebih penting yang melandasi Rusia melakukan serang balasan tersebut, yaitu Rusia menganggap bahwa saat itu adalah saat yang tepat bagi Rusia untuk menunjukkan kepada NATO bahwa setiap kerjasama bilateral yang oleh NATO dengan negara-negara di kawasan eks-Uni Soviet akan mendapat hambatan dari Rusia. perang tersebut juga menjadi indikasi bahwa Rusia siap untuk menjadi salah satu negara *great power* yang keberadaannya layak untuk diperhitungkan kembali. Selain

<sup>63</sup> *Заявление в связи с ситуацией в Южной Осетии*, diakses dari <http://kremlin.ru/transcripts/1042> pada 20 Juni 2011 pukul 07.50 WIB.

alasan utama tersebut ada beberapa alasan lain yang dikemukakan Medvedev yang melatarbelakangi serangan Rusia ke wilayah Georgia<sup>64</sup>:

- Pemimpin-pemimpin Georgia bertanggungjawab atas aksi-aksi kekerasan ilegal yang menimpa penduduk Ossetia Selatan selama 15 tahun terakhir;
- Serangan terhadap warga dan personil pasukan militer Rusia yang ditempatkan di Ossetia Selatan sebagai penjaga perdamaian harus dibalas;
- Pemimpin-pemimpin Georgia melancarkan serangannya untuk menuntaskan masalah Ossetia Selatan secara tuntas, dan Rusia memiliki kewajiban untuk mencegah agresi serta 'genosida' terhadap penduduk Ossetia Selatan;
- Rusia bertindak untuk membela warganya yang diserang berdasarkan prinsip pasal 51 Piagam PBB tentang pembelaan diri.

Penulis setuju dengan pernyataan yang dikemukakan oleh beberapa pengamat Rusia yang menyatakan bahwa ada faktor lain yang melatarbelakangi serangan Rusia tersebut, diantaranya<sup>65</sup>:

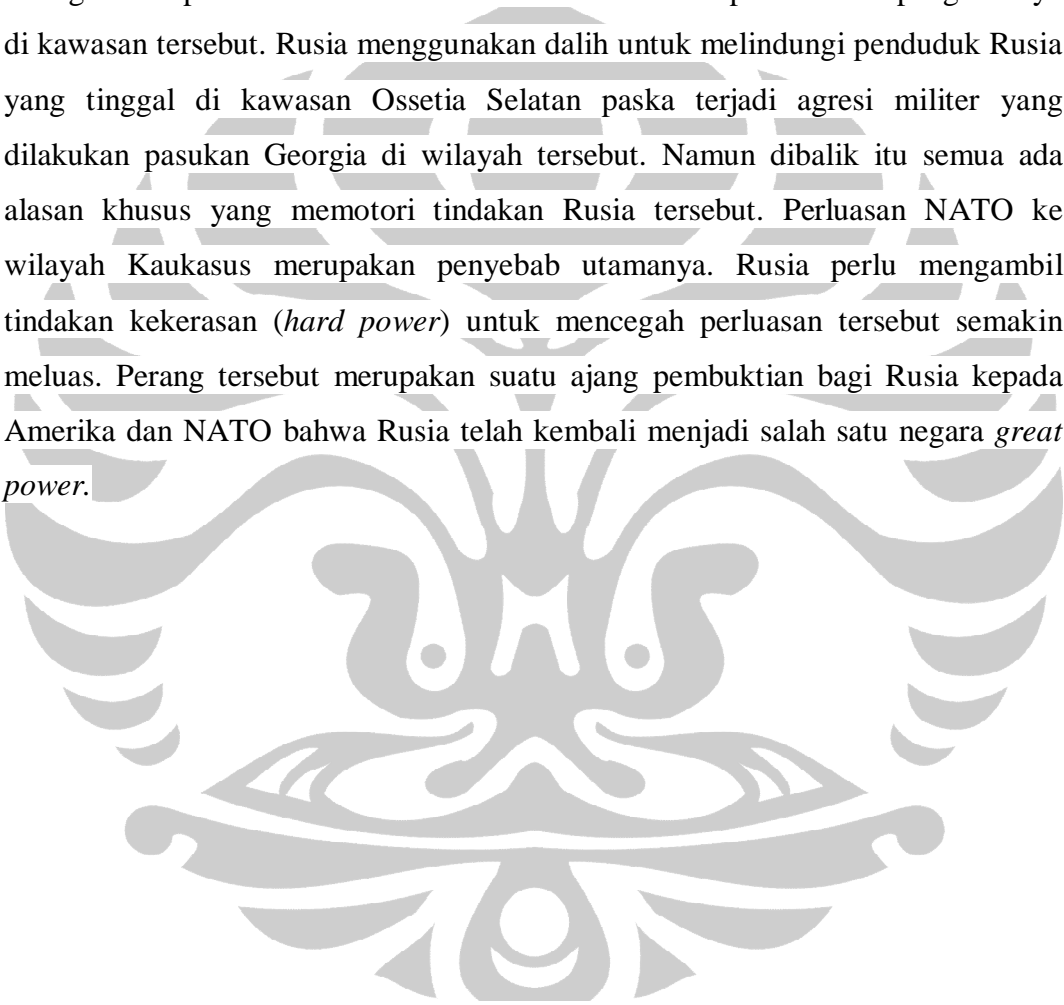
- Rusia ingin menegaskan statusnya sebagai sebuah kekuatan besar yang memiliki hegemoni atas lingkaran pengaruhnya yaitu di near abroad
- Penetrasi Amerika ke dalam lingkaran pengaruh tersebut (dalam revolusi mawar dan bantuan militer terhadap Georgia) sebagai sebuah ancaman geopolitik yang berhasil dicegah dengan penggunaan militer di Ossetia Selatan.
- Georgia telah mempromosikan dirinya sebagai jalur transit minyak dan gas bumi yang melewati wilayah Rusia sehingga penggunaan kekuatan tersebut diharapkan akan membuat para investor asing meragukan jaminan keamanan yang diberikan Georgia atau meninggalkan Georgia sama sekali

<sup>64</sup> *Op cit.* Paladin Ansharullah, hal. 55, merujuk pada Hans-Henning Schröder, "A Short, Victorious War?" *Russian Perspectives on the Caucasus Crisis*, dalam Hans-Henning Schröder (ed.), *The Caucasus Crisis: International Perception and Policy Implication for Germany and Europe*, SWP-Berlin Research Paper No. 9, November 2008, Hal. 7.

<sup>65</sup> *Op cit.* Hal. 56.

- Intervensi di Ossetia Selatan merupakan balasan Rusia atas tindakan serupa Amerika dan NATO di Kosovo tahun 1999 ketika negara-negara Barat tidak mengikutsertakan Rusia dalam proses-politik dan kemudian melakukan intervensi militer tanpa mempertimbangkan keberatan Rusia secara khusus maupun kepentingan Rusia secara umum.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa perang antara Rusia dan Georgia merupakan salah satu usaha Rusia dalam mempertahankan pengaruhnya di kawasan tersebut. Rusia menggunakan dalih untuk melindungi penduduk Rusia yang tinggal di kawasan Ossetia Selatan paska terjadi agresi militer yang dilakukan pasukan Georgia di wilayah tersebut. Namun dibalik itu semua ada alasan khusus yang memotori tindakan Rusia tersebut. Perluasan NATO ke wilayah Kaukasus merupakan penyebab utamanya. Rusia perlu mengambil tindakan kekerasan (*hard power*) untuk mencegah perluasan tersebut semakin meluas. Perang tersebut merupakan suatu ajang pembuktian bagi Rusia kepada Amerika dan NATO bahwa Rusia telah kembali menjadi salah satu negara *great power*.



## BAB 5

### KESIMPULAN

Sesuai dengan topik yang dipilih oleh penulis, skripsi ini menjelaskan mengenai permasalahan implementasi geopolitik Rusia dalam perang Rusia dan Georgia tahun 2008. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penulisan sejarah, sedangkan untuk membantu penulis dalam menganalisa skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif-analitik. Penulis berusaha memberikan deskripsi geopolitik Rusia dalam perang tersebut dilihat dari implementasinya terutama di kawasan Kaukasus. Untuk itu di dalam Bab I penulis berusaha memberikan gambaran umum mengenai hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya perang antara Rusia dan Georgia tahun 2008.

Untuk mendukung penulis dalam melakukan analisis, penulis memasukkan 2 bab pendukung yang menjadi pondasi dalam penulisan ini. Pertama pada Bab II penulis mencoba melihat sejarah konflik di kawasan Ossetia Selatan. Penulis melihat sejarah tersebut dengan menghubungkan keterkaitan antara Uni Soviet dengan Georgia di kawasan tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa terdapat hubungan yang sangat signifikan antara perang Rusia dan Georgia pada tahun 2008 dengan konflik etnis yang terjadi pada tahun 1991, yaitu keduanya mengangkat permasalahan etnis di dalamnya, meskipun ada permasalahan lain yang jauh lebih besar dan juga lebih penting yang melatarbelakangi terjadinya perang tersebut.

Sementara itu pada Bab III penulis mencoba melihat bahwa perang Rusia dan Georgia tahun 2008 disebabkan karena keruntuhan Pakta Warsawa dan perluasan NATO ke timur. Hal ini penting karena kehancuran Uni Soviet dan Pakta Warsawa serta perluasan NATO ke timur merupakan hal yang saling berkaitan yang melandasi penyusunan strategi geopolitik Rusia terutama pada masa Rusia Federasi untuk mengembalikan status Rusia sebagai salah satu *great power*.

Bab IV berisi mengenai analisis penulis dalam skripsi ini. Penulis mencoba mengkaitkan beberapa faktor yang mengakibatkan perang ini terjadi. Penulis berusaha melihat konsep geopolitik Rusia pada masa federasi terutama setelah Pakta Warsawa dan Uni Soviet runtuh. Kemudian penulis berusaha melihat kebijakan-kebijakan keamanan yang diterapkan yang merupakan bagian dari implementasi geopolitik tersebut, dan yang terakhir penulis melihat perang yang terjadi antara Rusia dan Georgia tahun 2008.

Perang antara Rusia dan Georgia dapat dikatakan merupakan puncak dari kekesalan Rusia terhadap Georgia atas keinginan Georgia untuk bergabung ke dalam NATO. Namun di sisi lain perang tersebut merupakan strategi geopolitik yang diterapkan oleh Rusia untuk mengantisipasi perluasan NATO yang semakin mempersempit wilayah kedaulatan Rusia. Rusia perlu mengambil kebijakan *pre-emptive* dan tetap waspada terhadap setiap pergerakan yang dilakukan oleh NATO. Hal ini dapat dikatakan wajar karena Rusia pada masa pemerintahan Medvedev telah menjadi sebagai salah satu negara *great power* di kawasan timur yang merupakan kawasan saingan Amerika. Kemajuan Rusia sendiri tidak dapat terlepas dari peran tangan dingin Putin. Melalui kebijakannya, Putin membawa Rusia untuk dapat keluar dari permasalahan yang tengah membelenggu Rusia. Krisis ekonomi dan juga krisis kepercayaan yang dialami Rusia pada masa pemerintahan Yeltsin telah berhasil dipatahkan di bawah kepemimpinan Putin.

Di bawah pemerintahan Putin, Rusia dibawa untuk menerapkan kebijakan pragmatis. Rusia mulai aktif di kancah organisasi internasional dan juga regional dengan cara membangun kepercayaan dan juga mitra kerjasama. Selain itu Rusia juga menerapkan kebijakan untuk mendukung kerjasama dengan NATO dalam menghancurkan ancaman terorisme global. Rusia menyadari bahwa posisi tawarnya lemah paska kehancuran Uni Soviet dan untuk membangun kembali kepercayaan internasional, satu-satunya jalan adalah dengan melakukan kerjasama serta aktif di dalam setiap kegiatan internasional. Inilah bentuk pragmatisme Putin yang menjadi bagian dari konsep geopolitik Rusia. Namun meskipun melakukan kerjasama dengan NATO, akan tetapi Rusia tetap memberikan batasan kepada NATO untuk tidak mendekat ke negara-negara yang menjadi bagian dari *sphere*

*of influence* Rusia. Rusia menegaskan bahwa setiap kehadiran NATO di negara-negara sekitarnya akan mendapat kecaman yang keras dari Rusia.

Perang Rusia-Georgia pada tahun 2008 di era Medvedev merupakan bukti bahwa Rusia telah bangkit dari keterpurukan yang menimpa selama ini. Dalam perang tersebut, Rusia ingin menegaskan kepada NATO bahwa ada batasan yang harus dijaga antara Rusia dan NATO. Perang tersebut merupakan bagian dari implementasi geopolitik Rusia dalam menegaskan *sphere of influence*-nya di kawasan negara-negara CIS terutama di kawasan Kaukasus. Jika dilihat dari segi wilayah, Ossetia Selatan bukanlah merupakan kawasan yang menjanjikan untuk kemajuan Rusia kedepannya. Akan tetapi, isu keamanan regional yang mewarnai perkembangan wilayah ini dijadikan Rusia sebagai alasan agar Rusia dapat masuk ke dalam wilayah tersebut. Seperti agenda tersembunyi, pergerakan Rusia di wilayah ini menyimpan berbagi misteri untuk diungkap. Keterlibatan Rusia di dalam setiap aktifitas di kawasan tersebut, dijadikan oleh Rusia untuk menghimpun amunisi jika suatu hari Perang Dingin tahap kedua akan meletus kembali. Aktifitas kerjasama yang dilakukan oleh Rusia adalah merupakan bagian dari geopolitik Rusia dalam menjaga pengaruhnya. Inilah tujuan sebenarnya dari agenda tersembunyi Rusia di dalam perang tersebut, yaitu menjaga pengaruhnya di kawasan Kaukasus dan mengembalikan posisi Rusia sebagai salah satu kekuatan dunia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku :

- Ahmad Fahrurudji, *Rusia Baru Menuju Demokrasi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005).
- Bremer, Ian. dan Taras, Ray., *Nations and Politics in the Soviet Successor States*, (USA: Cambridge University Press, 1993).
- Cornell, Svante E., *Autonomy and Conflict: Ethnoterritoriality and Separatism in the South Caucasus – Cases in Georgia*, (Swedia: Uppsala University, 2002).
- Cornell, Svante E., *Small Nation and Great Power: A Study of Ethnopolitical Conflict in the Caucasus*. (London: Routledge Curzon. 2001).
- Dekrety Sovietskoi Vlasti* Vol. 1 (Moscow: Politizdat, 1957).
- Dikshit, R D., *Geography The Spatiality of Politics 3<sup>rd</sup> Edition*, (India: Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, 2000).
- Dugin, A. *Osnovy Geopolitiki: Geopoliticheskoe budushyee Rosii*. (Moskwa: Arktogea, 1997)
- Ermaya Suradinata, *Geopolitik dan Konsep Ketahanan Nasional, Pemikiran Awal Pengembangan dan Prospek*, (Jakarta: PT. Paradigma Cipta Yatsigama, 2001).
- Ermaya Suradinata, *Hukum Dasar Geopolitik dan Geostrategi dalam Kerangka Keutuhan NKRI.* (Jakarta: Suara Bebas, 2005).
- Fadli Zon, *Gerakan Etnonasionalis: Bubarnya Imperium Uni Soviet*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2002).
- Gaddis, John Lewis., *The Cold War: A New History*, (USA: Penguin Press, 2005).
- Gadijev, K. S., *Geopoliticheskie Gorizonty Rosii: Kontury Novogo Miroporyadka*. (Moskwa: Ekonomika, 2007).
- Gadijev, K. S., *Geopolitika Kavkaza*. (Moskwa: Mezhdunarodnie Otnoshenia, 2001)
- Gebel, Oliver., *Separatism in Canada - a Nation at Stake? The Example of Québec and Newfoundland and Labrador*, (Jerman: GRIN Verlag, 2005).

- Gleason, Gregory., "The Evolution of the Soviet Federal System," *The Soviet National Reader: The Disintegration in Context* (Boulder, Colorado: Westview Press, Inc., 1992).
- Godzimirski, Jakub M., *Russian National Security Concepts 1997 and 2000: A comparative analysis*, Vol. 9 No. 4 (Norske Atlanterhavskomit , 2000).
- Gottschalk, Luis., *Mengerti Sejarah*. Terj. Nugroho Notosusanto, (Jakarta: UI-Pres, 1975).
- Gray, Colin S., *The Geopolitics of Super Power*, (Lexington: The University Press of Kentucky, 1988).
- International Institute for Strategic Studies, *Strategic Survey 2000-2001*, (New York: Oxford University Press, 2000).
- Isby, David C. dan Kamps Jr, Charles, *Armies of NATO's Central Front*. (New York: Jane's Publishing Company Ltd, 1985).
- Jones, Stephen F, dalam Ian Bremmen and Ray Taras (ed.) *Nations and Politics in the Soviet Successor States*, (USA: Cambridge University Press 1993).
- King, Charles., *The Ghost of Freedom: A History of the Caucasus*, (New York: Oxford University Press, 2008).
- K fner, Ruth., (ed.). *Gro es Fremdw rterbuch*, (Leipzig: Dudenredaktion, 1985).
- Lang, David Marsha., *A Modern History of Georgia*, (London: Weidenfeld and Nicolson, 1962).
- Lenin, V. I., *Collected Works*, Vol. 26: September 1917-Februari 1918 (Moscow: Progress Publisher, 1964).
- Manilov, V. L., *Voyennaya Bezopasnost Rossii*, (Moscow: Probel, 2000).
- N. Malcolm, A. Pravda, R. Allison and Light, M., *Internal Factors in Russian Foreign Policy*, Royal Institute for International Affairs, (Oxford: Oxford University Press, 1996).
- Nygren, Bertyl., *The Rebuilding of Greater Russia: Putin's Foreign Policy towards The CIS Countries*, (London: Routledge, 2008).
- Pegg, Scott., *International Society and De Facto State*, (Aldershot: Ashgate Pub Ltd, 1999).
- Rottman, [Gordon L.](#) dan [Volstad, Ronald.](#), *Warsaw Pact Ground Forces*, (Inggris: Osprey Publishing, 1987).



- Saragih, Simon., *Bangkitnya Rusia: Peran Putin dan Eks KGB*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2008).
- Smith, M.A., *Russia and the Far Abroad 2000*, (Camberley: Conflict Studies Research Centre, 2000).
- Stalin, J. V., “On the Draft Constitution of The USSR.”, *Problems of Leninism*, edisi ke-11, (Moskow: Foreign Languages Publishing House, 1953).
- Vyunov Yu. A. Manko, A.M . et al, *Rossiya na Rubezhe XX-XXI Vekov: Uchebnoe Posobie po Stranovedenie*, (Moskwa: 2006).
- Zabolotin, V. D., *Slovar Voyennykh Terminov* (Moscow: OOO NITs Kosmo, 2000).
- Zhorzholiani, et. al., *The Historical, Political and Legal Aspects of The Georgian-Ossetian Conflict*, (Tbilisi: 1992).
- Sumber Internet :**
- Agreements of the Berlin (Potsdam) Conference, July 17-August 2, 1945*, diakses dari [http://www.pbs.org/wgbh/amex/truman/psources/ps\\_potsdam.html](http://www.pbs.org/wgbh/amex/truman/psources/ps_potsdam.html)
- Annual Address to the federal Assembly of the Russian Federation*, Moscow, Kremlin, 8 Juli 2000, diakses dari <http://www.kremlin.ru>
- Asmus, Ronald D., Kugler, Richard L., Larrabee, F. Stephen., *Building A New NATO*, diakses dari <http://www.jstor.org/stable/20045713.pdf>
- Background Note: Russia*, diakses dari <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3183.htm>
- BBC News., *Russia Blamed for Gas Sabotage*, diakses dari <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4637034.stm>
- Bruz, Wlodzimierz., *The Polish October: Twenty Years After*, diakses dari <http://socialistregister.com/index.php/srv/article/view/5413/2312>
- Варшавского Договора пакт*, diakses dari <http://history-of-wars.ru/varsh.html>
- Charter of The United Nations. Chapter VII: Action With Respect To Threats To The Peace, Breaches of The Peace, And Acts of Aggression*, diakses dari <http://www.un.org/en/documents/charter/chapter7.shtml>
- Civil War*, diakses dari [http://en.wikipedia.org/wiki/Civil\\_war](http://en.wikipedia.org/wiki/Civil_war)
- Cvetkovski, Nikola., “*The Georgian-South Ossetian Conflict*” diakses dari <http://www.caucasus.dk/chapter4.htm>

- Curtis, Glen E., *Cekoslovakia: A Country Study*, (Washington, DC: Federal Research Division dari Library of Congress, 1992), diakses dari [http://www.shsu.edu/~his\\_ncp/WarPact.html](http://www.shsu.edu/~his_ncp/WarPact.html)
- De Haas, Marcel., *The Development of Russian Security Policy 1992-2002*, diakses dari <http://www.clingendael.nl/cscp/staff/mhaas/0303-BASEES-RF-security-policy-92-02.pdf>
- Demographics of Georgia*, diakses dari [http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics\\_of\\_Georgia\\_%28country%29](http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Georgia_%28country%29)
- General Assembly Adopts Resolution Recognizing Right of Return by Refugees, Internally Displaced Person To Abkhazia, Georgia*, diakses dari <http://www.un.org/News/Press/docs//2008/ga10708.doc.htm>
- Eurasianet, *Bush Visit to Georgia is a "Great Political Victory" – Saakashvili*, diakses dari <http://www.eurasianet.org/departments/insight/articles/eav051105.shtml>
- Headley, Jim., *Sarajevo, February 1994: The First Russia-NATO Crisis of the Post-Cold War Era*, diakses dari <http://www.jstor.org/stable/pdfplus/20097846.pdf>
- Human Rights Watch, *Bloodshed in the Caucasus: Violation of Humanitarian Law and Human Rights in the Georgia-South Ossetia Conflict*, diakses dari: <http://www.hrw.org/legacy/reports/pdfs/g/georgia/georgia.923/georgia923full.pdf>
- Конституция Союза Советских Социалистических Республик 1977 г.*, diakses dari <http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1977.htm>
- Концепция внешней политики Российской Федерации*, diakses dari <http://kremlin.ru/acts/785>
- Lynch, A. C., 'The Realism of Russia's Foreign Policy', *Europe-Asia Studies*, 53/1, 2001, diakses dari <http://www.jstor.org/pss/826237>
- Lynch, Dov., *Separatist States and Post-Soviet Conflicts*, diakses dari: <http://www.jstor.org/stable/3095759>
- Mapsof.net, diakses dari [http://mapsof.net/uploads/static-maps/russia\\_map\\_physical.jpg](http://mapsof.net/uploads/static-maps/russia_map_physical.jpg)
- Ministry of Foreign Affairs of Georgia, *NATO-Georgia*, diakses dari [http://www.mfa.gov.ge/index.php?sec\\_id=453&lang\\_id=ENG](http://www.mfa.gov.ge/index.php?sec_id=453&lang_id=ENG)

Mirzoev, Agit., *Ethnic Minorities in Georgia: Current Situation*, diakses dari:  
<http://www.osce.org/odihr/33813>

*National Integration and Tolerance in Georgia*, diakses dari  
[http://www.una.ge/pdfs/publications/survey\\_report\\_eng.pdf](http://www.una.ge/pdfs/publications/survey_report_eng.pdf)

NATO., *NATO Handbook*. (Brussels: NATO: 2001), diakses dari  
<http://www.nato.int/docu/handbook/2001/hb030101.htm>

Ray, Rob. dan John S., 1956: *The Hungarian Revolution*, diakses dari  
<http://libcom.org/history/1956-the-hungarian-revolution>

*Россию стараются побольнее ущипнуть, спровоцировать» Выступление Владимира Путина в Совете Безопасности*, diakses dari  
<http://www.polit.ru/dossie/2006/10/01/georgia.html>

*Situation Around Abkhazia and Ossetia*, diakses dari  
<http://www.un.int/russia/new/MainRoot/docs/warfare/statement051208en.htm>

Smith, Julian., *The NATO – Russia Relationship Defining Moment or Déjà vu?* CSIS and IFRI November 2008, diakses dari  
[http://www.csis.org/files/media/csis/pubs/081110\\_smith\\_natorussia\\_web.pdf](http://www.csis.org/files/media/csis/pubs/081110_smith_natorussia_web.pdf)

*South Ossetia and Georgia: historic roots of the conflict*, diakses dari  
<http://ossetians.com/eng/news.php?newsid=510>

*The History of Georgia: Georgia after Rose Revolution (2003-....)*, diakses dari  
<http://www.aboutgeorgia.ge/history/index.html?page=13>

*The North Atlantic Treaty*, diakses dari  
<http://www.nato.int/docu/basicxt/treaty.htm>

The Tonka Report, diakses dari  
[http://www.azer.com/aiweb/categories/caucasus\\_crisis/index/cc\\_maps/maps\\_large/georgia\\_war\\_map\\_big.jpg](http://www.azer.com/aiweb/categories/caucasus_crisis/index/cc_maps/maps_large/georgia_war_map_big.jpg)

Ullman, Harlan., *NATO Needs A Slogan*, diakses dari  
[http://www.acus.org/new\\_atlanticist/nato-needs-slogan](http://www.acus.org/new_atlanticist/nato-needs-slogan)

University of Texas Libraries, diakses dari  
[http://www.lib.utexas.edu/maps/commonwealth/georgia\\_pol99.jpg](http://www.lib.utexas.edu/maps/commonwealth/georgia_pol99.jpg)

Wawancara yang dilakukan oleh wartawan BBC, David Frost, dengan Vladimir Putin's pada 13 Maret 2000, diakses dari  
[http://www.gazeta.ru/2001/02/28/putin\\_i\\_bbc.shtml](http://www.gazeta.ru/2001/02/28/putin_i_bbc.shtml)

Wikipedia, diakses dari

[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/SouthOssetia\\_region\\_detailed\\_map.JPG](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/SouthOssetia_region_detailed_map.JPG)

*Заявление в связи с ситуацией в Южной Осетии*, diakses dari

<http://kremlin.ru/transcripts/1042>

### **Sumber Thesis :**

Paladin Ansharullah, *Faktor-Faktor Penyebab Intervensi Militer Rusia Terhadap Georgia Tahun 2008*, (Jakarta: FISIP UI, 2009).

### **Sumber Artikel dan Jurnal Ilmiah :**

Ahmad Fahrudodji, *Konflik Ossetia Selatan dan Strategi Keamanan Rusia di Kawasan Kaukasus*, dalam *Jurnal Glasnost* Volume 4 No. 2 Oktober 2008-Maret 2009 (Depok: Program Studi Rusia FIB UI, 2008).

Ahmad Sujai, *Membaca Jejak Putin Meraih Kremlin*, dalam *Jurnal Glasnost* Volume 4 No. 2 Oktober 2008-Maret 2009 (Depok: Program Studi Rusia FIB UI, 2008).

De ontwikkeling van Ruslands Grand Strategy, 1992-2000', *Atlantisch Perspectief* Vol. 25, No. 6, November 2001.

Dick, C. J., 'The Military Doctrine of the Russian Federation', *The Journal of Slavic Military Studies*, 7/3, September 1994.

Godzimirski, J. M., 'Russian National Security Concepts 1997 and 2000: a Comparative Analysis', *European Security*, 9/4, Winter 2000.

International Crisis Group, *Georgia: Avoiding War in South Ossetia (Europe Report No. 159)*. Tbilisi/Brussels: ICG, 26 November 2004.

International Crisis Group, *Georgia: Sliding towards Authoritarianism? (Europe Report No. 189)*. Tbilisi/Brussels: ICG, 19 Desember 2007.

Kassianova, A., 'Russia: Still Open to the West? Evolution of the State Identity in the Foreign Policy and Security Discourse', *Europe-Asia Studies*, 53/6 (2001).

Klimenko, A. F., 'O Role I Meste Voyennoy Doktriny v Sisteme Bezopasnosti Sodruzhestva Nezavisimykh Gosudarstv', *Voyennaya Mysl'*.

Khodarenok, M., ‘‘Starshego Brata’ Sdali za Milliard Dollarov’, *NVO*, 8 February 2002.

Miranovich, G., ‘Geopolitika I Bezopasnost’ Rossii’, *Krasnaya Zvezda*, 30 and 31 July 1999.

R. de Archellie, *Pragmatisme Politik Luar Negeri Vladimir Putin*, dalam Jurnal *Glasnost* Volume 4 No. 2 Oktober 2008-Maret 2009 (Depok: Program Studi Rusia FIB UI, 2008).

Schröder, Hans-Henning., (ed.), *The Caucasus Crisis: International Perception and Policy Implication for Germany and Europe*, SWP-Berlin Research Paper No. 9, November 2008.

#### **Sumber Koran dan Majalah :**

Adamishin, A. L., ‘Naskol’ko Bezopasna Nyneshnaya Yevropa?’ *Nezavisimaya Gazeta*, 2 November 2000.

Chernov, V., ‘Natsional’nyye Interesy Rossii I Ugrozy Dlya Yego Bezopasnosti, Boris Yel’tsin Utverdil Kontseptsiyu Vneshney Politiki RF’, *Nezavisimaya Gazeta*, 29 April 1993.

RIA Novosti, ["Georgia's NATO membership will be a heavy burden on its relations with Russia" - Russia's Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to Georgia Vyacheslav Kovalenko](http://en.rian.ru/analysis/20080401/102650825.html), diakses dari <http://en.rian.ru/analysis/20080401/102650825.html>

RIA Novosti, *Хронология событий в Южной Осетии 8-12 августа 2008 года. Справка*, diakses dari [http://rian.ru/osetia\\_spravki/20080811/150272529.html](http://rian.ru/osetia_spravki/20080811/150272529.html)

## KRONOLOGI PERANG ANTARA RUSIA DAN GEORGIA

<b>8 Agustus 2008</b>	
00:06	<i>Незадолго до полуночи по московскому времени из грузинских сел Никози и Эргнети начался обстрел из крупнокалиберных орудий столицы Южной Осетии Цхинвали, а также южноосетинских сел. Представители непризнанной республики заявили о том, что грузинские войска фактически начали войну и штурмуют Цхинвали.</i>
00:42	<i>Грузия пообещала навести конституционный порядок в Южной Осетии. Командующий грузинскими миротворцами Мамука Курашвили назвал военную операцию в зоне грузино-осетинского конфликта “наведением конституционного порядка в Южной Осетии”. Он также призвал российских миротворцев, дислоцированных в зоне конфликта, не вмешиваться в ситуацию.</i>
01:38	<i>Штурм Цхинвали ведется по всем направлениям. Власти Южной Осетии заявили, что грузинская сторона обстреливает Цхинвали из установок “Град”, гаубиц и крупнокалиберных минометов.</i>
02:08	<i>Грузия объявила о начале войны с Южной Осетией. Грузия уведомила миротворцев, размещенных в зоне конфликта, о начале войны в Южной Осетии.</i>
02:37	<i>Абхазия направляет в Южную Осетию тысячу добровольцев. Президент Абхазии Сергей Багати в ночь на пятницу созвал экстренное совещание Совета безопасности; по сообщениям СМИ, Абхазия отправит на помощь Южной Осетии около тысячи добровольцев.</i>
03:46	<i>Грузия начала танковую атаку на южные окраины Цхинвали. Грузинская армия приступила к танковой атаке на южные окраины Цхинвали, заявил президент Южной Осетии Эдуард Кокойты. Южноосетинские силы, подчеркнул он, оказывают сопротивление. Госминистр Грузии Темур Якобашвили, в свою очередь, объявил, что Цхинвали находится в кольце грузинских войск.</i>
04:20	<i>На штурм Цхинвали пошла пехота.</i>
04:33	<i>Россия потребовала созыва заседания СБ ООН по ситуации в Южной Осетии.</i>
04:48	<i>В Цхинвали прибыло подкрепление из Северной Осетии.</i>
06:49	<i>Абхазия перемещает войска к границе с Грузией.</i>
07:12	<i>Грузинские СМИ сообщили о призыве резервистов.</i>
07:23	<i>Грузинская авиация нанесла удар по Южной Осетии.</i>
08:56	<i>Грузинские войска начали обстрел российских миротворцев.</i>
09:23	<i>Грузинские СМИ заявили о взятии Цхинвали.</i>
11:10	<i>Президент Грузии в ходе обращения к нации рассказал о своем видении ситуации в зоне конфликта и объявил о всеобщей мобилизации резервистов.</i>

11:19	<i>“Рустави-2”: Грузия сбита прилетевший со стороны России самолет.</i>
12:37	<i>Парламент Северной Осетии призвал Россию помочь Южной.</i>
13:45	<i>В Цхинвали взорван газопровод. Ранее сообщалось о том, что в центре столицы Южной Осетии ведутся бои, разрушена больница, горит университет.</i>
16:14	<i>Колонна российской бронетехники вошла в Цхинвали. Ранее Грузия пригрозила России войной в случае, если информация о вводе российской бронетехники на территорию Южной Осетии подтвердится.</i>
18:23	<i>Подразделения 58-й армии занимают северную окраину Цхинвали.</i>
19:23	<i>Россия прерывает авиасообщение с Грузией с полуночи 9 августа.</i>
19:32	<i>При авианалете на грузинскую авиабазу уничтожено несколько военных самолетов.</i>
21:23	<i>Границу Южной Осетии пересекли 200 добровольцев из России. По словам одного из добровольцев, из Северной Осетии в Южную приехала колонна из 20 “Газелей”.</i>
23:16	<i>Из Батуми в сторону Цхинвали отправились 20 грузовиков с грузинскими военными. По словам очевидцев, из Батуми в Южную Осетию направлены не менее 200 военнослужащих.</i>
<b>9 Augustus 2008</b>	
02:14	<i>Обстрел Цхинвали из всех видов вооружений продолжается.</i>
09:17	<i>Одна из тактических групп 58-й армии Северо-Кавказского военного округа прорвалась в базовый лагерь российских миротворцев в Цхинвали.</i>
11:38	<i>Подразделения 76-й воздушно-десантной дивизии из Пскова входят в Цхинвали. В Южную Осетию перебрасываются подразделения 98-й воздушно-десантной дивизии из Иванова, а также спецназ из состава 45-го отдельного разведывательного полка.</i>
12:28	<i>Генштаб ВС РФ подтверждает информацию о двух сбитых российских военных самолетах Су-25 и Ту-22 в зоне грузино-осетинского конфликта. Один пилот погиб, трое – в плену.</i>
12:59	<i>Грузинские военные сдаются и покидают позиции в югоосетинской столице.</i>
14:59	<i>Абхазия начала вооруженную операцию в верхней части Кодорского ущелья.</i>
15:52	<i>Осетинские ополченцы уничтожили 4 грузинских танка.</i>
19:02	<i>Абхазская армия нанесла ракетный удар по некоторым военным объектам на западе Грузии.</i>
20:39	<i>Корабли российского ЧФ осуществляют перегруппировку в акватории Черного моря, прилегающей к морской границе Грузии.</i>
21:00	<i>Подразделения 58-й армии проводят операцию по вытеснению грузинских формирований с южных окраин Цхинвали.</i>
23:50	<i>После пятичасового боя прекратился артиллерийский обстрел Цхинвали. Танковый штурм предотвращен. На южных окраинах</i>

	<i>города подбито 12 грузинских танков.</i>
<b>10 Agustus 2008</b>	
08:45	<i>Абхазские войска возобновили массированный обстрел в верхней части Кодорского ущелья, контролируемого грузинскими военными, с использованием авиации и установок залпового огня «Град».</i>
10:20	<i>Россия усилила свою морскую группировку в зоне грузино-абхазского конфликта. Боевые корабли ЧФ вошли в акваторию в районе города Очамчира.</i>
10:25	<i>МВД Грузии объявило о выводе войск из Южной Осетии.</i>
14:02	<i>Минобороны РФ подтвердило информацию об отходе грузинских войск из Цхинвали.</i>
14:40	<i>Произведен воздушный налет на Зугдиди.</i>
17:13	<i>Абхазские войска продолжают наносить воздушные и артиллерийские удары по грузинским позициям в верхней части Кодорского ущелья.</i>
17:33	<i>Абхазская армия заняла позиции на реке Ингури вдоль границы с Грузией.</i>
18:39	<i>Из Цхинвали во Владикавказ вышла первая колонна с ранеными. Эвакуированы 50 человек.</i>
18:56	<i>Грузия объявила о прекращении огня. Российскому консулу вручена нота, в которой говорится о соответствующем приказе Михаила Саакашвили. Министерство иностранных дел Грузии утверждает, что грузинские войска выведены из Южной Осетии.</i>
20:20	<i>Грузинские СМИ сообщили о новой бомбежке территории завода «Тбиливиастрой». По данным журналистов, бомбы сбросил российский самолет. О пострадавших и разрушениях не сообщается.</i>
21:05	<i>Сергей Лавров заявил о необходимости безоговорочного вывода грузинских войск. В телефонном разговоре с министром иностранных дел Грузии Экой Ткешелашвили Лавров указал на то, что грузинские войска не покинули зону конфликта вопреки заявлению властей Грузии.</i>
21:40	<i>Цхинвали полностью перешел под контроль российских миротворцев. Об этом сообщил помощник командующего ССПМ Владимир Иванов. По его словам, грузинские войска отходят к административной границе с Южной Осетией.</i>
22:16	<i>Грузия согласилась пустить российских миротворцев в Зугдидский район Губернатор Зугдидского района Заза Морохия согласился на присутствие российских военных при условии, что бомбардировки Грузии прекратятся</i>
23:40	<i>Игорь Дыгало подтвердил уничтожение грузинского ракетного катера. По словам помощника главкома ВМФ, четыре корабля нарушили границы «объявленной зоны безопасности» в районе патрулирования российского флота. После уничтожения катера три других грузинских корабля ушли в направлении Поты.</i>



<b>11 Agustus 2008</b>	
00:17	<i>В Абхазию прибыли российские десантники. По словам помощника командующего КСПМ по информационному обеспечению Александра Новицкого, солдаты введены с целью “воспрепятствовать военной агрессии Грузии против Абхазии”.</i>
00:23	<i>Цхинвали вновь подвергся артиллерийскому обстрелу.</i>
1:10	<i>В Южной Осетии взяты в плен 19 грузинских диверсантов. Пленники были помещены под усиленную охрану из-за опасений, что жители непризнанной республики устроят самосуд.</i>
1:22	<i>МВД Грузии: Российская артиллерия начала интенсивный обстрел города Гори.</i>
1:57	<i>Россия и Грузия договорились не применять авиацию в зоне конфликта. Об этом сообщило ИА “Новости-Грузия”. Командующий российских миротворческих сил Сергей Чабан отметил, что договоренность не распространяется на Цхинвальский район.</i>
2:37	<i>Помощник командующего ССПМ: стрельба в Цхинвали прекратилась.</i>
3:28	<i>Северная Осетия направит в Южную 2500 добровольцев. По информации “Новой газеты”, в зону конфликта прибывает помощь из Кабардино-Балкарии, Чечни и других регионов Кавказа.</i>
4:16	<i>Абхазия возобновила обстрел Кодорского ущелья.</i>
4:24	<i>Франция представила план урегулирования грузино-южноосетинского конфликта. Основными положениями плана являются немедленное прекращение огня, оказание медицинской помощи раненым, а также вывод грузинских и российских войск из зоны конфликта.</i>
5:24	<i>По сообщению МВД Грузии, российские ВВС нанесли удар по пригороду Тбилиси.</i>
7:26	<i>Грузия продолжает обстрелы российских миротворцев в Южной Осетии</i>  <i>По словам командующего ССПМ Марата Кулахметова, в ночь на понедельник в южной части Цхинвальского района продолжались столкновения российских миротворцев с грузинскими военными. Один из постов миротворцев подвергся бомбардировке грузинских ВВС</i>
8:24	<i>Колонна МЧС с гуманитарной помощью вошла в Южную Осетию. В Цхинвали будет доставлено 52,5 тонны продовольствия, два госпиталя и палаточный лагерь на 500 человек.</i>
8:51	<i>По словам представителя правительства Южной Осетии Ирины Гагловой, Грузия открыла оросительный канал, чтобы лишить людей возможности прятаться от бомбардировок.</i>
10:10	<i>Министерство иностранных дел Грузии заявило, что в небе над Тбилиси появились 50 российских бомбардировщиков. По данным грузинской стороны, бомбы сброшены на деревню Коджори близ</i>

	<i>столицы.</i>
10:20	<i>Абхазские силы полностью блокировали верхнюю часть Кодори и готовы начать операцию по уничтожению грузинских войск.</i>
10:50	<i>Российские миротворцы потребовали от грузинских войск в Кодори сдать оружие. Сергей Чабан объявил о демилитаризации зоны грузино-абхазского конфликта.</i>
12:24	<i>Между Россией и Грузией прекращено морское сообщение. Грузинский порт Батуми закрыт.</i>
12:43	<i>Обстрел на дороге от Цхинвали к Рокскому тоннелю на границе с Россией прекратился, обстановка стабилизировалась. Из окрестных населенных пунктов продолжается эвакуация местных жителей, а в сторону Цхинвали следует военная техника, в том числе танки и самоходные артиллерийские установки.</i>
13:02	<i>“Грузия Онлайн” нашла у берегов Абхазии российские субмарины.</i>
13:05	<i>“Операция по принуждению к миру” в зоне грузино-осетинского конфликта в значительной степени завершена, заявил президент России Дмитрий Медведев. По его словам, город Цхинвали взят под контроль усиленным российским миротворческим контингентом.</i>
13:07	<i>Грузия отказалась сложить оружие в Кодори. Грузинские войска отвергли ультиматум российских миротворцев.</i>
13:07	<i>Генштаб РФ признал потерю еще двух самолетов Су-25, сообщил замглавы Генштаба Вооруженных сил РФ Анатолий Ноговицын. Также он заявил, что общие потери личного состава на территории Грузии составили 18 человек убитыми, в том числе один офицер и еще 17 сержантов и солдат.</i>
13:10	<i>Генштаб РФ: грузинских военных перебросили из Ирака американские самолеты.</i>
13:31	<i>Западные авиакомпании отменяют рейсы в Грузию.</i>
13:35	<i>Саакашвили подписал документ о прекращении огня, подготовленный министрами иностранных дел Франции и Финляндии, сообщает агентство “Новости-Грузия”.</i>
13:52	<i>Заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Анатолий Ноговицын назвал заявления президента Грузии Михаила Саакашвили о прекращении огня обманом.</i>  <i>За три дня войны в Грузии погибли 92 человека. Потери среди населения Южной Осетии, по данным Минобороны РФ, превышают две тысячи человек, более 30 тысяч стали беженцами.</i>
<b>12 Agustus 2008</b>	
00:31	<i>Грузинское телевидение сообщило о том, что российские войска вошли на территорию Поту.</i>
00:51	<i>Минобороны РФ опровергло это сообщение.</i>
04:34	<i>Два пропавших в Грузии российских журналиста нашлись. Выяснилось, что фотограф журнала “Эксперт” Вячеслав Кочетков и корреспондент журнала “Русский репортер” Игорь</i>

	<i>Найденов находятся в лагере российских миротворцев в Цхинвали.</i>
10:15	<i>Российские войска начали бои в 20 километрах к югу от Цхинвали. Агентства сообщали об этом со ссылкой на осетинских ополченцев.</i>
11:21	<i>Агентство Reuters сообщило, будто российские самолеты начали бомбардировку Гори. Сообщалось также, что в результате бомбардировки пострадали несколько челдовек</i>
11:35	<i>ФСБ задержала замначальника управления службы внешней разведки Грузии. Российские спецслужбы утверждали, что задержанный собирал данные о военных и президенте Южной Осетии. Сообщалось также, что ряд грузинских агентов подозреваются в попытках формирования бандитского подполья на юге России.</i>
13:00	<i>Президент России Дмитрий Медведев объявил о завершении операции по принуждению к миру в зоне грузино-осетинского конфликта. Цель операции, заявил Медведев, была достигнута, безопасность миротворцев и мирных жителей обеспечена, а возможные очаги агрессии будут уничтожены.</i>
13:01	<i>Грузия обвинила Россию в бомбежке нефтепровода. По сообщением грузинских СМИ, рссийские самолеты провели бомбардировку нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БДТ), который необходим для транспортировки нефти из Азербайджана в Турцию и частично проложен по территории Грузии. Об этом заявил секретарь Совета нацбеза Грузии Александр (Каха) Ломая. Ранее представители России не раз заявляли, что не намерены мешать работе нефтепровода.</i>
13:21	<i>На окраине Тбилиси произошли взрывы, сообщили СМИ. По предварительной информации, это произошло в районе, в котором расположены аэропорт и авиазавод.</i>
13:40	<i>Войска РФ контролируют аэропорт Сенаки и населенные пункты в зоне безопасности Абхазии.</i>
13:50	<i>Генштаб РФ опроверг сообщения о бомбежках нефтепровода.</i>
14:00	<i>Генштаб РФ потребовал присутствия международных наблюдателей в зоне грузино-осетинского конфликта.</i>

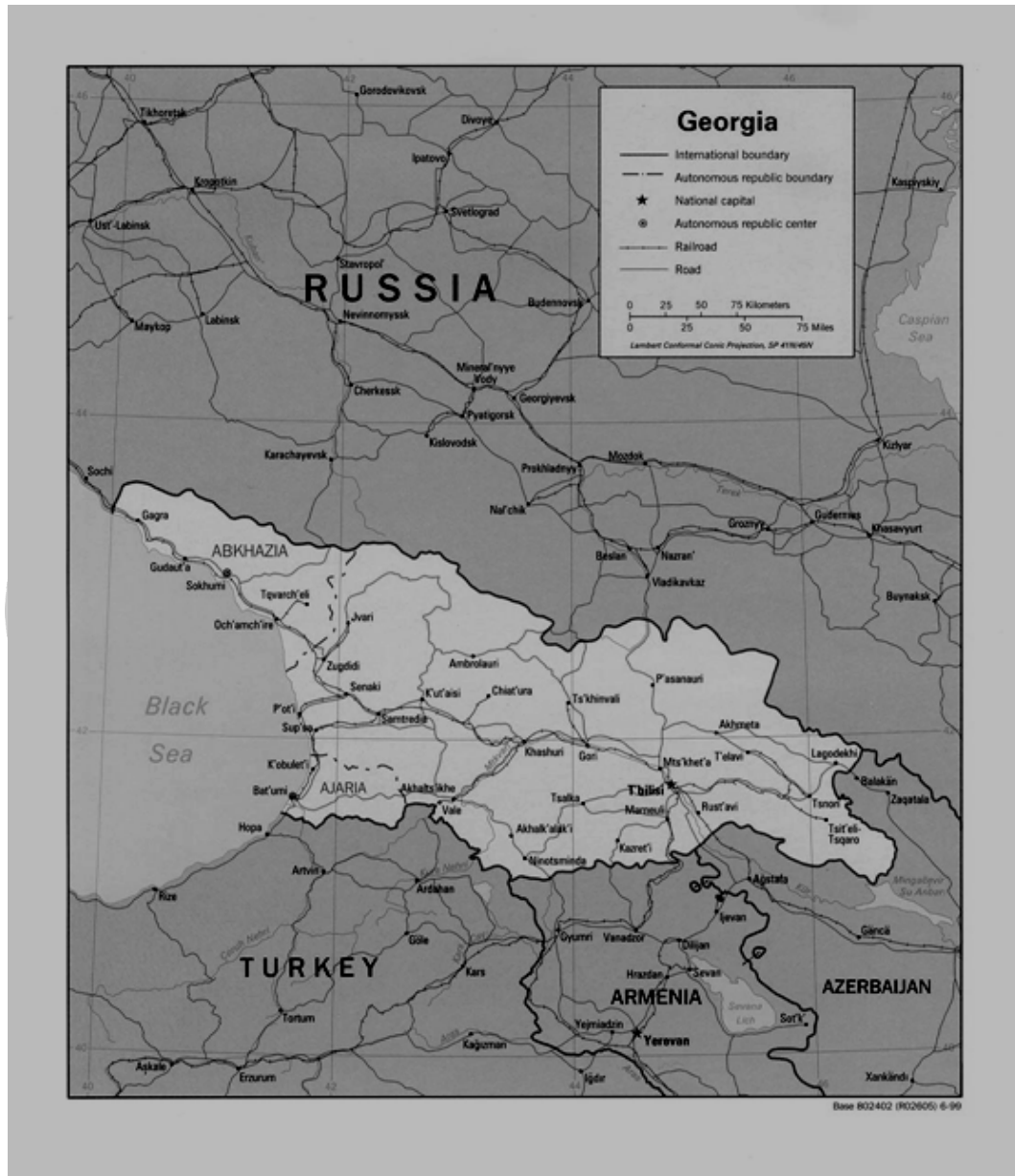
Sumber:Ria Novosty, *Хронология событий в Южной Осетии 8-12 августа 2008 года. Справка*, diakses dari [http://rian.ru/osetia\\_spravki/20080811/150272529.html](http://rian.ru/osetia_spravki/20080811/150272529.html) pada 16 Juni 2011 pukul 23.01 WIB.

PETA RUSIA



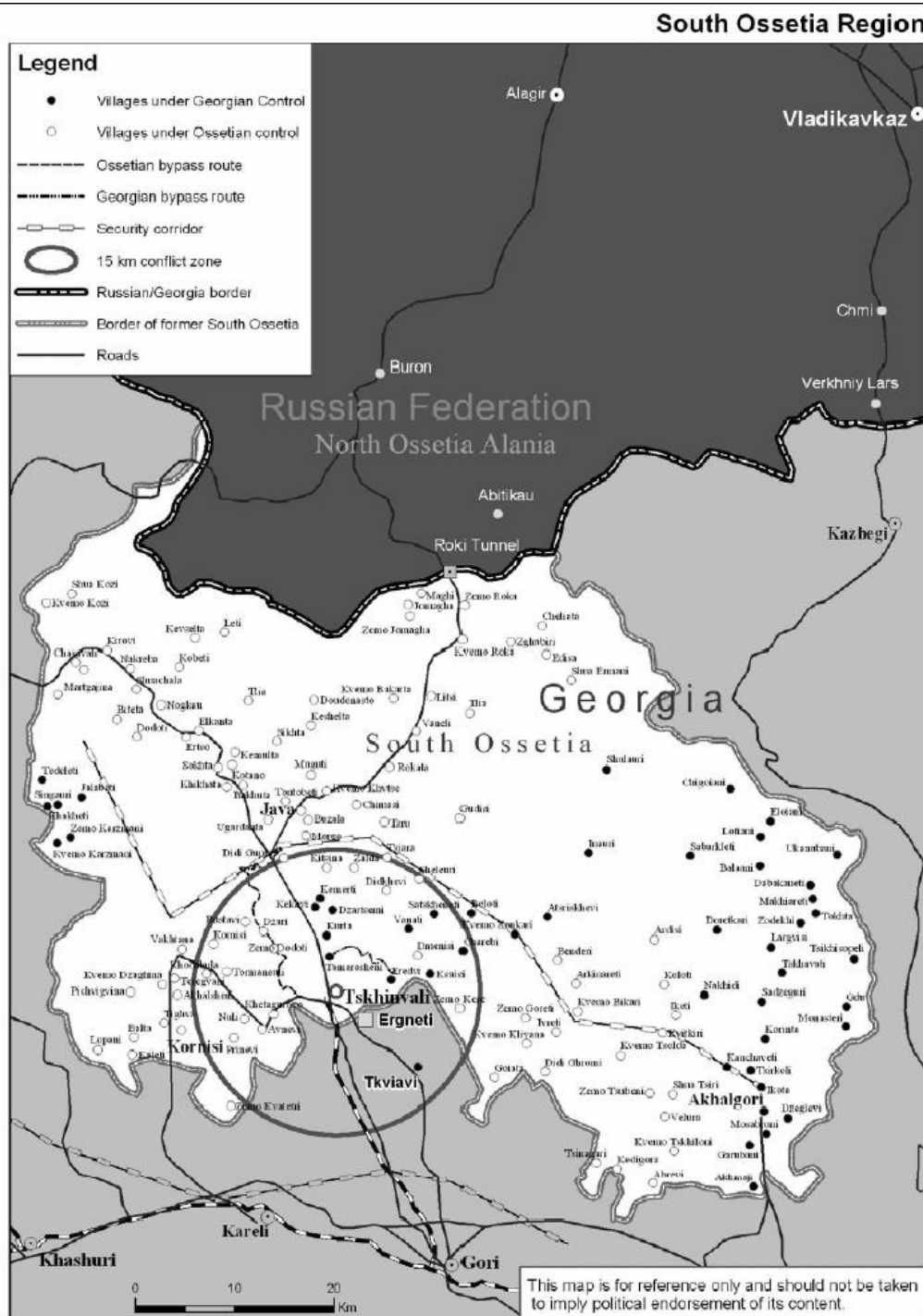
Sumber : Mapsof.net, diakses dari [http://mapsof.net/uploads/static-maps/russia\\_map\\_physical.jpg](http://mapsof.net/uploads/static-maps/russia_map_physical.jpg)

PETA GEORGIA



Sumber: University of Texas Libraries, diakses dari [http://www.lib.utexas.edu/maps/commonwealth/georgia\\_pol99.jpg](http://www.lib.utexas.edu/maps/commonwealth/georgia_pol99.jpg)

PETA OSSETIA SELATAN



Sumber: Wikipedia, diakses dari [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/SouthOssetia\\_region\\_detail\\_d\\_map.JPG](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/SouthOssetia_region_detail_d_map.JPG)

**PETA PERGERAKAN PASUKAN RUSIA DAN GEORGIA SELAMA MASA PERANG**



Sumber: The Tonka Report, diakses dari

[http://www.azer.com/aiweb/categories/caucasus\\_crisis/index/cc\\_maps/maps\\_large/georgia\\_war\\_map\\_big.jpg](http://www.azer.com/aiweb/categories/caucasus_crisis/index/cc_maps/maps_large/georgia_war_map_big.jpg)

Lampiran 6

Population of Georgia According to Ethnic Group 1926-2002

Ethnic Groups	Census 1926		Census 1939		Census 1959		Census 1970		Census 1979		Census 1989		Census 2002	
	Number	%	Number	%	Number	%	Number	%	Number	%	Number	%	Number	%
Georgian	1,788,186	66.8	2,173,922	61.4	2,600,588	64.3	3,130,741	66.8	3,433,011	68.8	3,787,393	70.7	3,661,173	83.8
Azeris	137,921	5.2	188,058	5.3	153,600	3.8	217,758	4.6	255,678	5.1	307,556	5.7	284,761	6.5
Armenians	307,018	11.5	415,013	11.7	442,916	11.0	452,309	9.7	448,000	9.0	437,211	8.1	248,929	5.7
Russians	96,085	3.6	308,684	8.7	407,886	10.1	396,694	8.5	371,608	7.4	341,172	6.3	67,671	1.5
Ossetians	113,298	4.2	147,677	4.2	141,178	3.5	150,185	3.2	160,497	3.2	164,055	3.0	38,028	0.9
Yazidis	2,262	0.1	12,915	0.4	16,212	0.4	20,690	0.4	20,688	0.5	33,331	0.6	18,329	0.4
Kurds	7,955	0.3												
Greeks	54,051	2.0	84,636	2.4	72,938	1.8	89,246	1.9	95,105	1.9	100,324	1.9	15,166	0.3
Ukrainians	14,356	0.5	45,595	1.3	52,236	1.3	49,622	1.1	45,036	0.9	52,443	1.0	7,039	0.2
Abkhazians	56,847	2.1	57,805	1.6	62,878	1.6	79,449	1.7	85,285	1.7	95,853	1.8	3,527	0.1
Assyrians	2,904	0.1	4,707	0.1	5,005	0.1	5,617	0.1	5,286	0.1	6,206	0.1	3,299	0.1
Jews	30,389	1.1	42,300	1.2	51,582	1.3	55,382	1.2	28,298	0.6	24,795	0.5	2,333	0.1
Others	65,961	2.5	58,711	1.7	37,015	0.9	38,665	0.8	39,690	0.8	50,502	0.9	18,766	0.5
<b>Total</b>	<b>2,677,233</b>		<b>3,540,023</b>		<b>4,044,045</b>		<b>4,686,358</b>		<b>4,993,182</b>		<b>5,400,841</b>		<b>4,371,535</b>	

Sumber: Geographics of Georgia, diakses dari

[http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics\\_of\\_Georgia\\_%28country%29](http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Georgia_%28country%29)

